

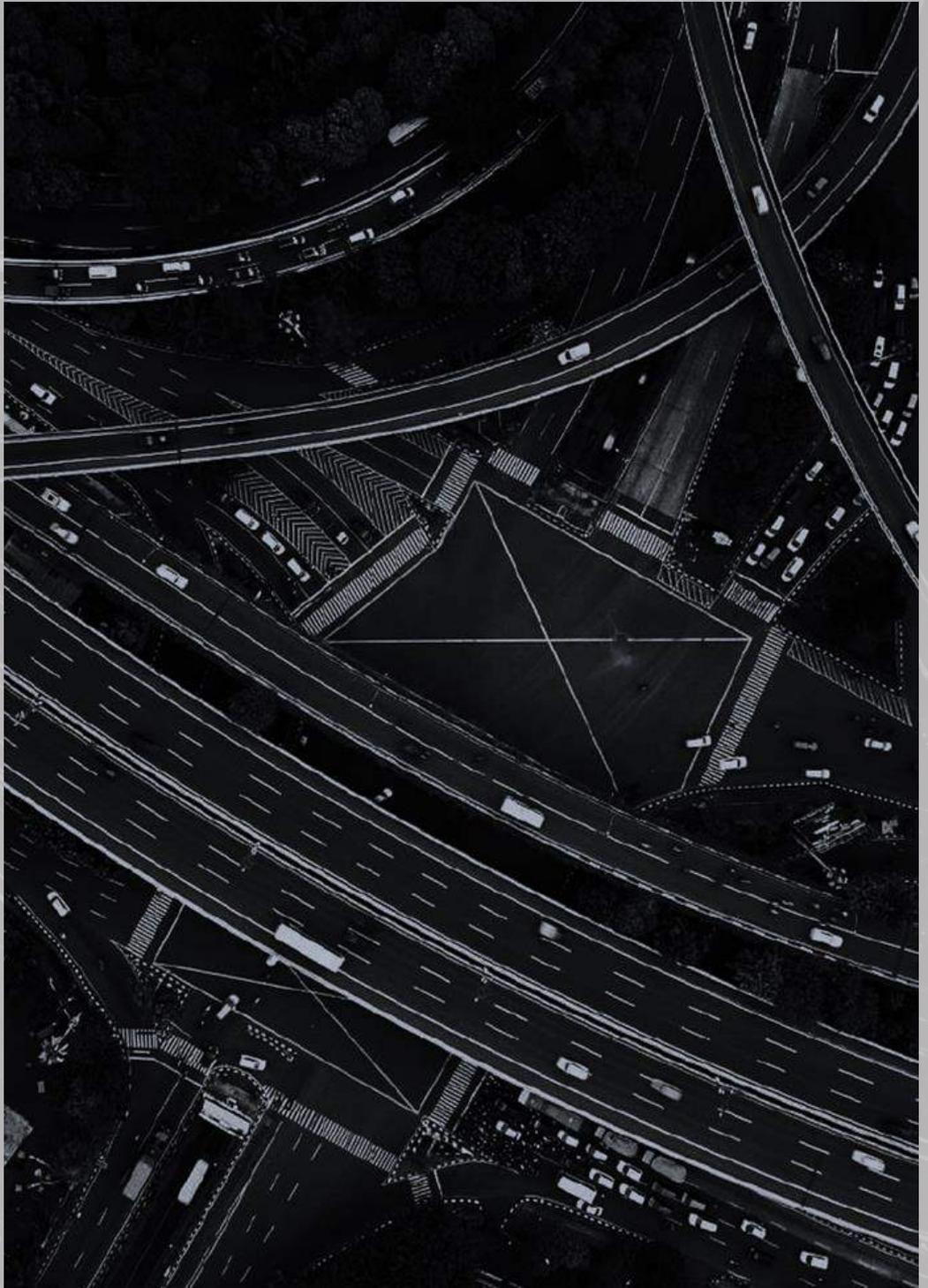


BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN TAHUNAN

BADAN PENGELOLA
TRANSPORTASI JABODETABEK

2019



   bptj151

 bptjkemenhub

 bptj@dephub.go.id

KATA PENGANTAR

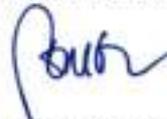
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2019 ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya.

Bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan transportasi yang unggul dan handal, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek mempunyai tugas mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik. Selanjutnya, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara pada Pasal 89 dinyatakan bahwa "Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya". Salah satu bentuk laporan berkala dimaksud adalah Laporan Tahunan.

Laporan Tahunan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2019 disusun selain sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan, juga sebagai pertanggungjawaban kepada publik terkait pelaksanaan tugas dan kebijakan di sektor transportasi selama satu tahun anggaran 2019. Laporan Tahunan ini menyajikan berbagai informasi terkait pembangunan dan pengembangan sarana, prasarana dan pelayanan transportasi di wilayah Jabodetabek dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor. 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018 – 2029.

Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Laporan Tahunan ini dapat diselesaikan. Meskipun dalam laporan ini masih dijumpai sejumlah kekurangan, namun diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan masukan dan rujukan bagi para pemangku kepentingan serta umpan balik bagi jajaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Ungkapan terima kasih dan apresiasi yang tulus kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Tahunan Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2019 ini.

**KEPALA
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK**



POLANA B. PRAMESTI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	13
A. Gambaran Umum	13
B. Tugas dan Fungsi	13
C. Struktur Organisasi	14
D. Komposisi Pegawai	17
BAB II SEKRETARIAT	18
A. Bagian Perencanaan dan Keuangan	18
1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja), dan Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)	18
2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran untuk Tahun 2020	19
3. Pembahasan <i>Draft</i> Rencana Strategis (Renstra) BPTJ Periode Tahun 2020- 2024	21
4. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Transportasi di Wilayah Jabodetabek bersama Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga Terkait	22
5. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Unit Eselon I dan Eselon II di Lingkungan BPTJ	23
6. Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemanfaatan Aplikasi Capaian Kinerja	24
7. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Eselon I dan Eselon II di Lingkungan BPTJ	25
8. Koordinasi Penilaian Sistem Akauntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan BPTJ Bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	26
9. Rapat Koordinasi Rencana Aksi Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) Periode Tahun 2018-2024	29
10. Penyusunan Laporan Daya Serap	30
11. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan BPTJ	31
12. Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan BPTJ	32
B. Bagian Hukum	33
1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	33
2. Kerjasama di Bidang Transportasi	36
3. Pemberian Bantuan Hukum dan Pertimbangan Hukum	36

C. Bagian Kepegawaian dan Umum.....	37
1. Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi.....	37
2. <i>Capacity Building</i> Sumber Daya Manusia BPTJ.....	38
3. Sosialisasi Bidang Kepegawaian.....	38
4. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019.....	39
5. Peningkatan Jiwa Korsa.....	40
6. Penyuluhan Gerakan Anti Narkoba.....	40
7. Seleksi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan Caraka.....	41
8. Keikutsertaan Dalam Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)/Bimbingan Teknis (Bimtek).....	41
D. Bagian Hubungan Masyarakat.....	42
1. Pencanaan Kampanye Jalan Hijau.....	42
2. Sosialisasi Kegiatan <i>Save Puncak</i>	48
3. Partisipasi Dalam Pameran <i>Railway Tech 2019</i>	51
4. Kegiatan Publikasi dan Edukasi Kepada Anak-Anak Tentang Pentingnya Menggunakan Transportasi Umum.....	52
5. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Bagi Masyarakat Umum.....	53
6. Kegiatan Publikasi Melalui Media Cetak dan Elektronik.....	53
7. Publikasi Melalui Media Sosial Internet (<i>Facebook, Instagram, Twitter</i>).....	54
8. Pengembangan Portal BPTJ.....	55
9. Penyusunan Buku dan Video BPTJ.....	62
BAB III DIREKTORAT TEKNIS.....	63
A. Direktorat Prasarana.....	63
1. Lanjutan Pembangunan Terminal Tipe A Jatijajar.....	63
2. Supervisi Lanjutan Pembangunan Terminal Tipe A Jatijajar.....	63
3. Pengadaan Alat dan Fasilitas Penunjang Terminal Tipe A di Jabodetabek ...	64
4. Reviu DED Lanjutan Pembangunan Terminal Jatijajar untuk Pembangunan <i>Transit Oriented Development (TOD)</i>	65
5. Pembangunan <i>Area Traffic Control System (ATCS)</i> Koridor DKI Jakarta - Tangerang.....	66
6. Supervisi Pembangunan <i>Area Traffic Control System (ATCS)</i> Koridor DKI Jakarta - Tangerang.....	66
7. Perencanaan Teknis Penanganan <i>Missing Link</i> di Wilayah Jabodetabek.....	67
8. Studi Pendahuluan Pembangunan Terminal Jatiasih Bekasi.....	67
9. <i>Feasibility Study (FS)</i> dan <i>Basic Design</i> Gardu Traksi Sisipan di Wilayah Jabodetabek.....	68
10. <i>Feasibility Study (FS)</i> dan <i>Basic Design</i> Perlintasan Tidak Sebidang pada Lintas Tanah Abang.....	69
11. Pengadaan Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian Tahap I....	69
12. <i>Feasibility Study (FS)</i> dan <i>Basic Design</i> Peningkatan Persinyalan pada Lintas Tanah Abang - Rangkas Bitung.....	70

13.	Studi Pendahuluan Pembangunan <i>Mass Rapid Transit</i> (MRT) Jalur Ujung Menteng - Cikarang.....	71
14.	<i>Review Detailed Engineering Design</i> (DED) Pembangunan <i>Underpass</i> Bojonggede.....	72
15.	Penyusunan Pedoman Penilaian Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Fasilitas Integrasi pada Simpul Transportasi dan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD) di Jabodetabek.....	72
16.	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terminal Penumpang Angkutan Jalan di Jabodetabek.....	73
17.	Bimbingan Teknis Terminal Tipe A di Jabodetabek.....	74
18.	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Jalan Nasional di Jabodetabek.....	75
19.	Survei <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Stasiun Kereta Api di Jabodetabek.....	76
20.	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Integrasi Moda dan Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit/ <i>Transit Oriented Development</i> (TOD).....	79
21.	Pendampingan <i>Public Private Partnership</i> (PPP)/Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).....	81
22.	Bimbingan Teknis Integrasi Prasarana Transportasi Jalan dan Perkeretaapian.....	85
23.	Penataan Integrasi Simpul Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) di Jabodetabek.....	85
B. Direktorat Lalu Lintas.....		86
1.	Pembangunan Sistem Perizinan Online Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).....	86
2.	Studi Trase <i>Light Rail Transit</i> (LRT) Cibubur - Baranangsiang Kota Bogor ...	87
3.	Pembangunan e-SPT dengan SMS Gateway.....	88
4.	Pengadaan Perangkat SMS Gateway.....	88
5.	Perencanaan Teknis Pengembangan Matrik Asal Tujuan Jabodetabek.....	89
6.	Pembangunan Aplikasi <i>e-Ticketing</i>	89
7.	Pengadaan Hardware <i>e-Ticketing</i>	90
8.	<i>Monitoring</i> Dampak Kebijakan Sektor Transportasi Tahun 2017 s.d. 2018 di Wilayah Jabodetabek.....	90
9.	Peningkatan Kinerja Lalu Lintas Ruas dan Simpang di Wilayah Jabodetabek.....	92
10.	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).....	93
11.	Pelatihan Sistem Operasi <i>Mass Rapid Transit</i> (MRT).....	94
12.	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi Kinerja Jaringan dan Lalu Lintas Kereta Api Perkotaan di Wilayah Jabodetabek.....	94
13.	Pengoperasian <i>Area Traffic Control System</i> (ATCS) BPTJ.....	96
14.	<i>Monitoring</i> Infrastruktur pada Titik Simpang.....	99
15.	Pemeliharaan <i>Area Traffic Control System</i> (ATCS) BPTJ.....	102
16.	Uji Coba Sistem 2-1 Jalur Puncak.....	103

C. Direktorat Angkutan	105
1. Fasilitasi Teknis Antar <i>Stakeholder</i> Dalam Penyediaan Layanan Angkutan Umum	105
2. Penghargaan Pramudi dan Masinis Teladan di Wilayah Jabodetabek	109
3. Penghargaan Operator Angkutan Umum Terbaik di Wilayah Jabodetabek ..	110
4. Evaluasi Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan di Wilayah Jabodetabek	112
5. Rencana Induk Terminal Barang Jabodetabek.....	113
6. Pendataan, Penataan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan.....	116
7. Pengawasan Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan di Wilayah Jabodetabek	118
8. Koordinasi Teknis Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Se-Jabodetabek	124
9. Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru.....	124
10. Pengawasan dan <i>Monitoring</i> Pelaksanaan Perizinan Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek	125
11. Pengawasan dan <i>Monitoring</i> Kinerja Operasional Terminal Tipe A Jabodetabek.....	126
12. Rencana Teknis Pengembangan Dana <i>Electronic Road Pricing</i> (ERP)	126
13. Kajian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Angkutan Umum dan Peningkatan Keselamatan Jabodetabek	127
14. Pengadaan Peralatan Penunjang Pengawasan Angkutan.....	127
15. Pemeliharaan Aplikasi Pengawasan Angkutan Jalan di Terminal Tipe A Jabodetabek.....	128
BAB IV PENUTUP	129

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPTJ	15
Gambar 2. (a) Penyusunan PK di Lingkungan BPTJ di Hotel Salak Tower Bogor pada Bulan Januari 2019 (b) Penyusunan Revisi PK di Lingkungan BPTJ Berdasarkan IKU Berbasis Outcome di Hotel Sahira Butik Bogor pada Tanggal 22 Agustus 2019.....	18
Gambar 3. (a) Reviu Pagu Anggaran BPTJ TA 2020 di Hotel Mercure Sabang Jakarta pada Tanggal 7-9 Agustus 2019 (b) Penelitian Pagu Anggaran BPTJ Tahun 2020 Bersama Biro Perencanaan di Hotel Aone Jakarta pada Tanggal 24-25 Juli 2019.....	20
Gambar 4. Pembahasan Draft Renstra BPTJ 2020-2024 di Ruang Rapat Utama BPTJ pada Bulan November 2019	22
Gambar 5. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Transportasi di Wilayah Jabodetabek di Hotel Best Western Premiere The Hive Jakarta pada Tanggal 23-25 Januari 2019.....	23
Gambar 6. Sosialisasi dan Bimtek Pelaksanaan SPIP Unit Eselon I dan Eselon II di Lingkungan BPTJ di Hotel Bogor Valley pada Tanggal 22-24 April 2019	24
Gambar 7. (a) Bimtek Pemanfaatan Aplikasi e-Performance dan e-SAKIP Reviu di Hotel Salak Heritage Bogor pada Tanggal 11 Maret 2019 (b) Bimtek Pemanfaatan Aplikasi e-Monev dan SMART di Hotel Salak Padjajaran Bogor pada Tanggal 4-6 Juli 2019	25
Gambar 8. Penyusunan LAKIP Unit Eselon I dan Eselon II di Lingkungan BPTJ di Hotel Salak Tower Bogor pada Tanggal 18-19 Januari 2019	25
Gambar 9. Koordinasi Penilaian SAKIP dan SPIP di Lingkungan BPTJ Bersama APIP Tahun 2019 di Hotel Mercure Sabang Jakarta pada Tanggal 08 Agustus 2019.....	26
Gambar 10. Rapat Koordinasi Rencana Aksi RITJ 2018-2024 di Hotel Best Western Premiere The Hive Jakarta pada Tanggal 22-24 Januari 2019.....	29
Gambar 11. Grafik Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran terhadap Target dan Prognosa Tahun 2019	31
Gambar 12. Persiapan Rekonsiliasi BMN Semester 2 dan Tahunan Tahun 2019 di Hotel Arch Bogor pada Tanggal 10 Januari 2020	32
Gambar 13. Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan Serta Penegakan Hukum Terhadap Over Dimension dan Overload di Hotel JW Marriot Yogyakarta pada Tanggal 4-6 September 2019	33
Gambar 14. Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dengan Jalan di Hotel The Trans Resort Bali pada Tanggal 10-12 Juli 2019	34
Gambar 15. Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Pelaksanaan Urusan Pemerintah Konkuren (RPP PUPK) di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang Diikuti oleh Bagian Hukum BPTJ pada Tanggal 22 Juli 2019	35
Gambar 16. Pendampingan Sebagai Saksi Sidang di KPPU Perkara Nomor 13/KPPU-1/2019 pada Tanggal 26 November 2019 tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan PT. Solusi Transportasi Indonesia dan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia terkait Angkutan Sewa Khusus.....	37

Gambar 17. Sosialisasi dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan BPTJ Tahun 2019 oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Perhubungan di Hotel The Anaya Bogor pada Tanggal 12 April 2019	38
Gambar 18. Bimbingan Teknis Hospitality di Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan pada Tanggal 18 November 2019.....	38
Gambar 19. Sosialisasi Administrasi Kepegawaian di Terminal Jatijajar pada Tanggal 13 September 2019	39
Gambar 20. Koordinasi Proses Verifikasi Berkas Pelamar CPNS Formasi Tahun 2019 di Hotel Ara Gading Serpong pada Tanggal 04 Desember 2019.....	39
Gambar 21. Pengembangan Karakter Bagi Pegawai Non ASN di Lingkungan BPTJ di STTD pada Tanggal 14 April 2019	40
Gambar 22. Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Hote Permana Bogor pada Tanggal 20 Agustus 2019.....	40
Gambar 23. Wawancara PPNPN dan Caraka di Terminal Jatijajar pada Tanggal 28 Desember 2019	41
Gambar 24. Kehadiran SDM BPTJ Dalam Diklat (a) Pembangunan Karakter di Ciwidy Bandung pada Tanggal 28 Oktober – 2 November 2019 (b) Hospitality di PPSDMAP Semplak Bogor pada Tanggal 18-20 November 2019	42
Gambar 25. Press Background Kampanye Jalan Hijau di Hotel Redtop Jakarta pada Tanggal 16 Agustus 2019.....	43
Gambar 26. Penyampaian Informasi Kepada Media pada Saat Berlangsungnya Kampanye Jalan Hijau di Jalan Kendal pada Tanggal 19 Agustus 2019.....	43
Gambar 27. Kampanye Jalan Hijau pada tanggal 19 Agustus 2019 di 4 Lokasi (a) Bekasi (b) Depok (c) Dukuh Atas (d) Juanda	44
Gambar 28. Kampanye Jalan Hijau pada tanggal 20 Agustus 2019 di 4 Lokasi (a) Bekasi (b) Depok (c) Dukuh Atas (d) Juanda	44
Gambar 29. Kampanye Jalan Hijau pada tanggal 21 Agustus 2019 di 4 Lokasi (a) Bekasi (b) Depok (c) Dukuh Atas (d) Juanda	45
Gambar 30. Kampanye Jalan Hijau pada tanggal 22 Agustus 2019 di 4 Lokasi (a) Bekasi (b) Depok (c) Dukuh Atas (d) Juanda	45
Gambar 31. Pelaksanaan Kampanye Jalan Hijau di Jalan Kendal pada Tanggal 19 Agustus 2019	46
Gambar 32. Pemanfaatan Media Sosial Mengenai Pelaksanaan Kampanye Jalan Hijau ...	46
Gambar 33. Pemberitaan dan Publikasi Mengenai Kampanye Jalan Hijau di Beberapa Media Online	47
Gambar 34. Puncak Pelaksanaan Kampanye Jalan Hijau di Jalan Kendal dan Jalan Imam Bonjol, Jakarta pada Tanggal 01 September 2019	48
Gambar 35. Sosialisasi Uji Coba Sistem 2-1 Jalur Puncak di Simpang Gadog, Megamendung, Bogor pada tanggal 12 Oktober 2019	48
Gambar 36. Press Tour Uji Coba Sistem 2-1 Jalur Puncak di Simpang Gadog, Megamendung, Bogor pada Tanggal 12 Oktober 2019	49
Gambar 37. Penyebaran Informasi Kepada Masyarakat Melalui Media Sosial.....	49

Gambar 38. Informasi yang Disebarluaskan Kepada Masyarakat Melalui Pembagian Flyer di (a) Riung Gunung dan (b) Gadog serta Pemasangan Spanduk di (c) Pintu Tol Ciawi.....	50
Gambar 39. Flag Off dan Doorstop Uji Coba Sistem 2-1 Jalur Puncak di Pasaraya Blok M pada Tanggal 28 September 2019.....	51
Gambar 40. Konferensi Pers Kegiatan Peluncuran Layanan Angkutan Umum Massal Menuju Kawasan Wisata Puncak	51
Gambar 41. Pameran Railway Tech 2019 di JIExpo pada Tanggal 20-22 Maret 2019.....	52
Gambar 42. Plakat dan Sertifikat BPTJ Sebagai Apresiasi pada Pameran Railway Tech 2019	52
Gambar 43. Kegiatan Publikasi dan Edukasi Kepada Anak-Anak di Terminal Pondok Cabe pada Tanggal 28 Mei 2019 dan Terminal Jatijajar pada Tanggal 29 Mei 2019.....	52
Gambar 44. Pelayanan Informasi Publik BPTJ melalui CC 151	53
Gambar 45. Publikasi Dalam Bentuk Iklan/Advertorial di Media Massa.....	53
Gambar 46. Publikasi Melalui Talkshow di Radio Hard Rock dan Elshinta.....	54
Gambar 47. Publikasi Melalui Media Instagram (@Bptjkemenhub).....	54
Gambar 48. Publikasi Melalui Media Facebook (BPTJ151).....	55
Gambar 49. Publikasi Melalui Media Twitter (@bptj151).....	55
Gambar 50. Tampilan Pengembangan Portal BPTJ.....	56
Gambar 51. Produksi Video (a) Sistem Transportasi Perkotaan di Wilayah Teraglomerasi; (b) Buku dan Video BPTJ Mendobrak Tabu; dan (c) Video Angkutan Umum Listrik di Wilayah Jabodetabek.....	62
Gambar 52. Progres Pembangunan Terminal Tipe A Jatijajar	63
Gambar 53. Kegiatan Supervisi Lanjutan Pembangunan Terminal Tipe A Jatijajar untuk Hall Keberangkatan dan Kedatangan Serta IPAL	64
Gambar 54. Pengadaan Alat dan Fasilitas Penunjang di Terminal Tipe A Jatijajar Tahun 2019	65
Gambar 55. Rapat Pembahasan Reviu DED Lanjutan Pembangunan Terminal Jatijajar untuk Pembangunan TOD di Ruang Rapat BPTJ pada Tanggal	65
Gambar 56. Pembangunan ATCS Koridor DKI – Tangerang	66
Gambar 57. Pelaksana Kegiatan Supervisi Pembangunan ATCS Koridor DKI Tangerang .	67
Gambar 58. Rapat Studi Perencanaan Teknis Penanganan Missing Link di Wilayah Jabodetabek.....	67
Gambar 59. Rapat Studi Pendahuluan Pembangunan Terminal Jatiasih	68
Gambar 60. Rapat FS dan Basic Design Gardu Traksi Sisipan di Wilayah Jabodetabek	68
Gambar 61. Rapat FS dan Basic Design Perlintasan Tidak Sebidang Pada Lintas Tanah Abang - Merak	69
Gambar 62. Pengadaan Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian.....	70
Gambar 63. Pelaksanaan Rapat FS dan Basic Design Peningkatan Persinyalan pada Lintas Tanah Abang - Rangka Bitung.....	71
Gambar 64. Rapat Studi Pendahuluan Pembangunan MRT Jalur Ujung Menteng - Cikarang	71
Gambar 65. Pelaksanaan Rapat Review DED Pembangunan Underpass Bojonggede	72

Gambar 66. Rapat Penyusunan Pedoman Penilaian Pemenuhan SPM Fasilitas Integrasi pada Simpul Transportasi di Jabodetabek	73
Gambar 67. Fasilitas di Terminal Kampung Rambutan	73
Gambar 68. Fasilitas di Terminal Kalideres	73
Gambar 69. Fasilitas di Terminal Jatijajar	74
Gambar 70. Bimbingan Teknis Simulasi Pelaksanaan Sewa	74
Gambar 71. Sambutan Direktur Prasarana dalam Bimbingan Teknis Simulasi Pelaksanaan Sewa	75
Gambar 72. Pelaksanaan Survey Fasilitas Pendukung	76
Gambar 73. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Integrasi Moda dan Pengembangan Kawasan Bertransit Angkutan Umum	81
Gambar 74. KPBU dalam Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe A Jabodetabek	85
Gambar 75. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Integrasi Prasarana Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	85
Gambar 76. Survey Kondisi Eksisting Integrasi di Titik Simpul SAUM Jabodetabek	86
Gambar 77. Sistem Perizinan Online Andalalin BPTJ	87
Gambar 78. Kegiatan Studi Trase LRT Cibubur - Baranangsiang Kota Bogor	88
Gambar 79. Pembangunan e-SPT dengan SMS Gateway	88
Gambar 80. Perangkat SMS Gateway	89
Gambar 81. Perencanaan Teknis Pengembangan Matrik Asal Tujuan Jabodetabek	89
Gambar 82. Aplikasi e-Ticketing	90
Gambar 83. Hardware e-Ticketing	90
Gambar 84. Monitoring Dampak Kebijakan Sektor Transportasi Tahun 2017-2018 di Wilayah Jabodetabek	92
Gambar 85. Monitoring Dampak Kebijakan Sektor Transportasi Tahun 2017-2018 di Wilayah Jabodetabek	92
Gambar 86. Kegiatan Peningkatan Kinerja Ruas dan Simpang di Wilayah Jabodetabek	93
Gambar 87. Realisasi PNBK dari Rekomendasi Andalalin di BPTJ	93
Gambar 88. Pelatihan Sistem Operasi MRT	94
Gambar 89. Pemantauan Jalan Nasional Simpang Ciawi dan Simpang Terminal Parung Kabupaten Bogor	97
Gambar 90. Pemantauan Jalan Nasional Simpang Ciawi dan Simpang Pal UI Depok	97
Gambar 91. Pemantauan Jalan Nasional Simpang Ciawi dan Simpang Rawa Panjang Kota Bekasi	98
Gambar 92. Kegiatan Pemeliharaan ATCS di Jl. Jend. Ahmad Yani Kota Bekasi	102
Gambar 93. Uji Coba Skema Optimasi Sistem 2-1 Jalur Puncak yang Dikombinasikan dengan Sistem One-way	103
Gambar 94. Flag Off JR Connexion oleh Kepala BPTJ di Scientia Square Park Serpong, Tanggal 12 Juni 2019	106
Gambar 95. Jaringan Trayek Jabodetabek Residence Connexion	107

Gambar 96. Flag Off JA Connexion Lorena Halim Perdana Kusuma ke Bandara Soekarno Hatta (22 April 2019) dan JA Connexion Sinar Jaya di Perumahan Vida Bekasi ke Bandara Soekarno Hatta (16 Mei 2019).....	107
Gambar 97. Peta Jaringan Trayek Jabodetabek Airport Connexion.....	108
Gambar 98. Flag Off Tansjabodetabek Premium Puncak di Pasaraya Blok M pada Tanggal 28 September 2019	109
Gambar 99. Pemberian Penghargaan Pramudi dan Tes Praktek Pramudi di Hotel Redtop Jakarta pada Tanggal 15 Agustus 2019.....	110
Gambar 100. Pemberian Penghargaan Kepada Operator Angkutan Terbaik di Hotel Redtop Jakarta pada Tanggal 29 Oktober 2019 dan Tinjauan Lapangan ke Perusahaan Angkutan pada Tanggal 27 Agustus 2019	111
Gambar 101. FGD Evaluasi Kinerja Lalu Lintas dan Pelayanan Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek pada Tanggal 27 Agustus 2019	113
Gambar 102. Peta Sebaran Terminal Barang Eksisting dan Rencana di Jabodetabek	114
Gambar 103. Peta Potensi Lokasi Terminal Barang di Jabodetabek.....	114
Gambar 104. Kawasan Rencana Lokasi Terminal Barang Setu.....	116
Gambar 105. Kawasan Rencana Lokasi Terminal Barang Rawa Pasung	116
Gambar 106. Kawasan Rencana Lokasi Terminal Barang Kawasan Industri Delta Mas ...	116
Gambar 107. Kegiatan Pendataan, Penataan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan Barang di JICT (15-16 Agustus 2019) dan Jakarta Gudang (5-6 September 2019)	118
Gambar 108. Kegiatan Ujicoba Konsep Sinkronisasi Pengaturan Operasional Angkutan Barang Tambang Pada Tanggal 4 Februari 2019 di Jalan Tambang Wilayah Bogor – Tangerang	118
Gambar 109. Rekap Jumlah Kendaraan yang Melanggar.....	119
Gambar 110. Diagram Prosentase Pelanggaran.....	119
Gambar 111. Penegakan Hukum Angkutan Umum Bandara Soekarno-Hatta pada Tanggal 19 Agustus 2019.....	120
Gambar 112. Rekapitulasi Kegiatan Ramp Check Angkutan Lebaran Tahun 2019 (1440 H) Periode 29 Mei s.d 13 Juni 2019.....	121
Gambar 113. Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan LLAJ oleh Personil PKB Tangerang Selatan di Terminal Pondok Cabe pada Tanggal 13 Juni 2019.....	122
Gambar 114. Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019	123
Gambar 115. Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019 di Terminal Pulo Gebang pada Tanggal 21 Desember 2019	124
Gambar 116. Koordinasi Teknis Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Se-Jabodetabek Tahun 2019 di Arch Hotel pada Tanggal 14 November 2019.....	124
Gambar 117. Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal 2019 dan Tahun Baru 2020	125
Gambar 118. Pengawasan dan Monitoring Pelaksanaan Perizinan Angkutan Umum di 9 (Sembilan) Wilayah Jabodetabek di Kabupaten Bogor pada Tanggal 26 Agustus 2019 ...	125
Gambar 119. Pengawasan dan Monitoring Kinerja Operasional Terminal Tipe A Jabodetabek di Terminal Baranangsiang dan Terminal Pulo Gebang pada Tanggal 11 Februari 2019..	126

Gambar 120. Rapat Rencana Teknis Pengembangan Dana ERP di Hotel Akmani pada tanggal 22 November 2019.....	126
Gambar 121. Dokumen Kajian DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk Angkutan Umum dan Peningkatan Keselamatan Jabodetabek.....	127
Gambar 122. Pengadaan Peralatan Penunjang Pengawasan Angkutan.....	127
Gambar 123. Pemeliharaan Aplikasi Pengawasan Angkutan Jalan di Terminal Tipe A Jabodetabek.....	128

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi Pegawai Menurut Unit Kerja	17
Tabel 2. Perbandingan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP di Lingkungan BPTJ Tahun 2017-2018	27
Tabel 3. Target dan Realisasi PNBPN di BPTJ Tahun 2019.....	32
Tabel 4. Perkembangan Pelaksanaan KPBU Terminal Tipe A.....	81
Tabel 5. Lokasi ATCS Tempat Pelaksanaan Pengoperasian dan Pemantauan	96
Tabel 6. Laporan Hasil Pemantauan Ruas Jalan Tol Jakarta - Cikampek pada Bulan April 2019	98
Tabel 7. Laporan Hasil Pemantauan Ruas Jalan Tol Jakarta - Tangerang pada Bulan April 2019	99
Tabel 8. Laporan Hasil Pemantauan Ruas Jalan Tol Jakarta - Ciawi pada Bulan April 2019	99
Tabel 9. Laporan Survei Monitoring Simpang Area Traffic Control System Bulan April 2019	100
Tabel 10. Laporan Survei Monitoring Simpang Area Traffic Control System Bulan Mei 2019	100
Tabel 11. Laporan Survei Monitoring Simpang Area Traffic Control System Bulan Juni 2019	101
Tabel 12. Pembangunan dan Pengembangan Terminal Barang di Jabodetabek	114
Tabel 13. Indikasi Potensi Lokasi Terminal Barang di Jabodetabek	115
Tabel 14. Kedekatan lokasi Potensi Lokasi Terminal Barang di Jabodetabek dengan Rencana	115

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan transportasi yang unggul dan handal, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek mempunyai tugas mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik. Selanjutnya, dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara pada Pasal 89 dinyatakan bahwa "Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya". Salah satu bentuk laporan berkala dimaksud adalah Laporan Tahunan.

Laporan Tahunan selain merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih organisasi dalam setahun, juga merupakan salah satu bentuk laporan berkala yang disusun berjenjang mulai dari Unit Kerja Eselon II, Unit Kerja Eselon I, hingga tingkat Kementerian. Laporan Tahunan yang disusun oleh Unit Kerja Eselon II akan menjadi salah satu bahan penyusunan Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon I, untuk selanjutnya menjadi bahan penyusunan Laporan Tahunan Kementerian. Data dan informasi yang akurat menjadi kunci penulisan Laporan Tahunan. Laporan Tahunan BPTJ Tahun 2019 disusun dengan pendekatan pada tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Konsep Laporan Tahunan berisi isu-isu strategis disertai dengan narasi singkat, padat, dan jelas.

B. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi BPTJ sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Pasal 2 dan Pasal 3, sebagai berikut:

1. Tugas

Mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik.

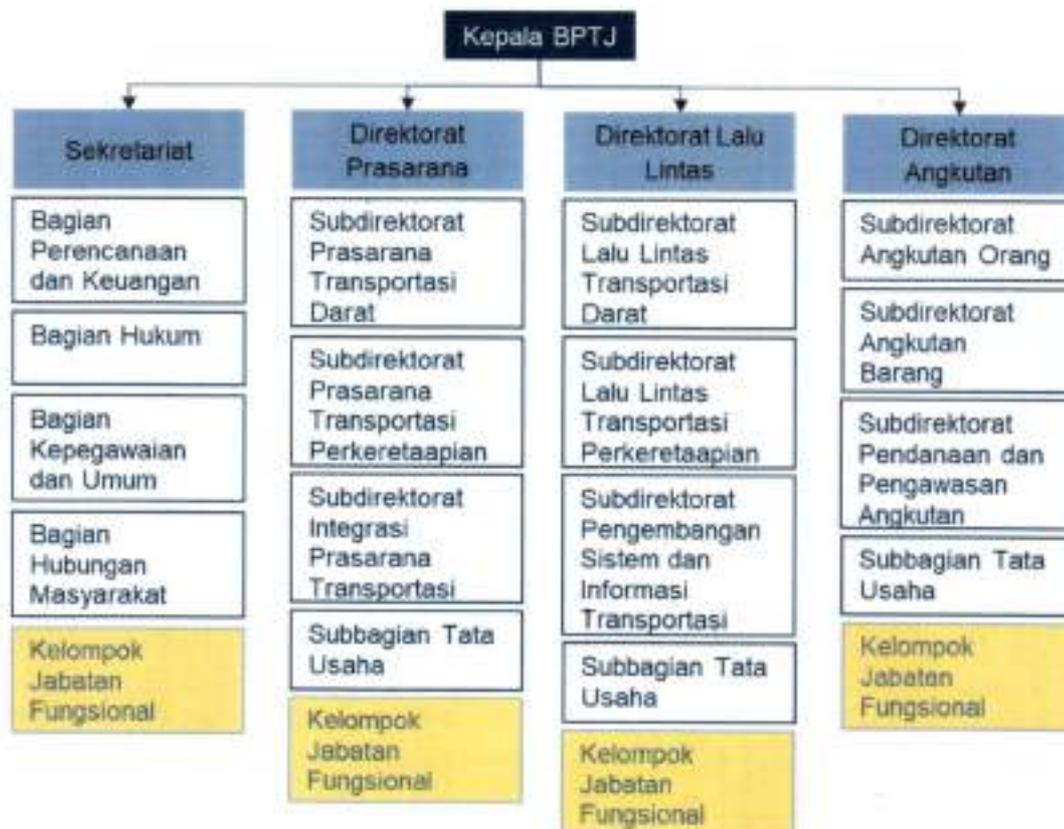
2. Fungsi

- a. Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana umum dan rencana program kegiatan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek berdasarkan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ).

- b. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan rencana umum dan rencana program kegiatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek.
- c. Fasilitasi teknis, pembiayaan dan/atau manajemen dalam rangka peningkatan penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek.
- d. Fasilitasi teknis, pembiayaan dan/atau manajemen dalam rangka pengembangan serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek.
- e. Fasilitasi teknis, pembiayaan dan/atau manajemen dalam rangka pelaksanaan manajemen permintaan lalu lintas di wilayah Jabodetabek.
- f. Penyusunan rencana pelaksanaan, perencanaan kebutuhan anggaran, dan pelaksanaan program kegiatan transportasi dalam RITJ yang tidak termasuk dalam rencana umum dan rencana program kegiatan transportasi dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- g. Penyiapan bahan usulan regulasi dan kebijakan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek.
- h. Pemberian rekomendasi penataan ruang yang berorientasi angkutan umum massal.
- i. Pemberian perizinan angkutan umum yang melampaui batas provinsi di wilayah Jabodetabek.
- j. Pemberian rekomendasi untuk angkutan terusan (*feeder service*).
- k. Pementauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana umum serta program pengembangan dan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek.
- l. Melakukan koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran RITJ yang dilakukan oleh instansi, operator, dan pihak lainnya.
- m. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

C. Struktur Organisasi

Susunan organisasi BPTJ sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi BPTJ

Sumber: Lampiran PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTJ

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap Unit Kerja Eselon II mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan, dukungan teknis, dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BPTJ. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana dan program, pelaksanaan anggaran, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta evaluasi dan pelaporan.
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dokumentasi dan sosialisasi peraturan, penyusunan perjanjian dan kerjasama antar lembaga, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum.
- Penyiapan pelaksanaan manajemen kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, administrasi perkantoran, kearsipan serta urusan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan umum.

- d. Penyiapan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, komunikasi dan informasi publik, edukasi, publikasi dan dokumentasi, serta pelayanan informasi dan dokumentasi.

2. Direktorat Prasarana

Direktorat Prasarana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan regulasi dan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi darat, perkeretaapian, serta integrasi prasarana transportasi di wilayah Jabodetabek. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi darat di wilayah Jabodetabek.
- b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi perkeretaapian di wilayah Jabodetabek.
- c. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang integrasi prasarana transportasi di wilayah Jabodetabek.

3. Direktorat Lalu Lintas

Direktorat Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas transportasi darat, perkeretaapian serta pengembangan sistem dan informasi transportasi di wilayah Jabodetabek. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas transportasi darat di wilayah Jabodetabek.
- b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas transportasi perkeretaapian di wilayah Jabodetabek.
- c. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan

kebijakan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan informasi di wilayah Jabodetabek.

4. Direktorat Angkutan

Direktorat Angkutan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang, angkutan barang, serta pengawasan angkutan di wilayah Jabodetabek. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Angkutan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang di wilayah Jabodetabek.
- b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan barang di wilayah Jabodetabek.
- c. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pendanaan dan pengawasan angkutan di wilayah Jabodetabek.

D. Komposisi Pegawai

Dalam menjalankan tugasnya, pada tahun 2019 Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek didukung oleh 420 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1. Komposisi Pegawai Menurut Unit Kerja

Unit Kerja	PNS	PPNP	Caraka	Pramubakti	Security	Pengemudi
Sekretariat	45	22	5	13	11	5
Dit. Prasarana	25	14	3	0	0	0
Dit. Lalu - lintas	26	12	7	0	0	0
Dit. Angkutan	27	13	8	0	0	0
Setker	0	7	2	0	0	0
T. Pondok Cabe	1	15	3	8	8	0
T. Jatijajar	7	18	2	9	10	0
T. Poris Plawad	2	14	2	7	12	0
T. Baranangsiang	13	23	2	10	9	0
Total	146	138	34	47	50	5

BAB II SEKRETARIAT

A. Bagian Perencanaan dan Keuangan

1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja), dan Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)

Sistem perencanaan di lingkungan BPTJ telah dilakukan secara berjenjang dan bertahap guna meningkatkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan dan handal. Proses perencanaan dilakukan kepada seluruh unit kerja, yaitu dari tingkat Eselon I hingga tingkat Eselon IV yang dikoordinasikan dan disinkronkan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Perencanaan di tahun 2019 dimulai dengan penyusunan RKT dan Renja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran di tahun 2019. RKT dan Renja disusun berdasarkan penerjemahan terhadap target Renstra BPTJ pada tahun pelaksanaan 2019. Dokumen Renstra BPTJ Tahun 2016-2019, RKT/Renja Tahun 2019 dan DIPA BPTJ TA 2019 kemudian menjadi acuan dalam penyusunan PK.

Dokumen PK disusun oleh seluruh pejabat di lingkungan BPTJ mulai dari Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) hingga Pejabat Pengawas (Eselon IV). Dokumen ini menjadi acuan bagi masing-masing pejabat dalam melaksanakan kegiatan dan kemudian menjadi acuan untuk dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja level Eselon I dan Eselon II.



(a)

(b)

Gambar 2. (a) Penyusunan PK di Lingkungan BPTJ di Hotel Salak Tower Bogor pada Bulan Januari 2019 (b) Penyusunan Revisi PK di Lingkungan BPTJ Berdasarkan IKU Berbasis *Outcome* di Hotel Sahira Butik Bogor pada Tanggal 22 Agustus 2019

Dokumen RKT dan Renja merupakan acuan yang digunakan dalam penyusunan PK. Dokumen PK di lingkungan BPTJ mulai disusun pada bulan Januari 2019, dan dikarenakan adanya re-organisasi menyesuaikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTJ yang menggantikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 103 Tahun 2016 maka PK dilakukan revisi menyesuaikan dengan organisasi dan tata kerja yang baru. Pada bulan September, dokumen PK kembali direvisi sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi Kementerian PAN-RB dan Inspektorat Jenderal

Kementerian Perhubungan berkaitan dengan ketentuan IKU tingkat Unit Eselon I yang harus bersifat *outcome* dan yang bersifat *output* dan yang bersifat *output* harus diturunkan ke tingkat Unit Eselon II.

Jumlah IKU BPTJ yang semula pada tahun 2017 ada sebanyak 11 IKU, dan berdasarkan hasil revidi terhadap tujuan dan sasaran dalam Revidi Renstra BPTJ Tahun 2016-2019 dan berdasarkan masukan dari Kementerian PAN-RB, telah dilakukan penyesuaian, yaitu dengan menurunkan tujuan dan sasaran yang masih berkualitas *output* dari Unit Kerja Eselon I ke Unit Kerja Eselon II, sehingga sasaran Unit Kerja Eselon I hanya yang berkualitas *outcome* sebanyak 4 (empat), yaitu:

- a. SP1 meningkatnya peran moda angkutan umum di wilayah Jabodetabek;
- b. SP2 menurunnya angka kecelakaan yang melibatkan angkutan umum di wilayah Jabodetabek;
- c. SP3 meningkatnya kecepatan rata-rata kendaraan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek; dan
- d. SP4 meningkatnya cakupan pelayanan angkutan umum di kawasan perkotaan Jabodetabek.

Re-organisasi BPTJ sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 menyebabkan pergantian nomenklatur serta tugas pokok dan fungsi Unit Kerja Eselon II dan III diikuti dengan penambahan 19 struktur Eselon IV di masing-masing Direktorat sehingga perlu dilakukan revisi terhadap PK yang telah disusun dan penyesuaian terhadap *timeline* dan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebagaimana tertuang dalam DIPA 2019. Rekomendasi solusi dari persoalan ini yakni dengan melakukan persiapan sebelum re-organisasi diberlakukan dan sebelum tahun anggaran dimulai ataupun berakhir sehingga kegiatan dapat terlaksana secara tepat waktu.

Evaluasi terhadap IKU BPTJ oleh Kementerian PAN-RB yang mengharuskan IKU untuk bersifat *outcome* sehingga IKU bersifat *output* harus diturunkan ke tingkat Unit Eselon II. Hal ini menyebabkan perbaikan terhadap LAKIP dan perubahan PK menyesuaikan IKU Eselon I yang telah bersifat *outcome* dan penambahan indikator program Eselon II yang bersifat *output*. Rekomendasi solusi dari persoalan ini adalah dengan memastikan bahwa IKU BPTJ kedepannya telah bersifat *outcome* dan merupakan *business core* dari unit kerja sehingga dapat terhindar dari revisi LAKIP dan PK.

2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran untuk Tahun 2020

Perencanaan tidak hanya dilakukan pada tahun berjalan melainkan juga untuk tahun kedepan yakni tahun 2020. Pada tahun 2019, Bagian Perencanaan dan Keuangan telah mengakomodir dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran untuk tahun 2020. Diawali dengan penyusunan daftar usulan kegiatan (*long list*) tahun 2020 beserta dengan data dukung terkait seperti dokumen perencanaan, sertifikat, surat persetujuan dan lainnya untuk kemudian diajukan menjadi pagu kebutuhan.

Dengan dasar pagu kebutuhan tersebut, kemudian dikoordinasikan dengan *stakeholder* terkait yang meliputi Biro Perencanaan, Inspektorat Jenderal, BAPPENAS dan Kementerian Keuangan untuk dikemudian dirundingkan dan dinilai sehingga menghasilkan pagu alokasi anggaran untuk kemudian dikeluarkan menjadi DIPA.



(a)

(b)

Gambar 3. (a) Reviu Pagu Anggaran BPTJ TA 2020 di Hotel Mercure Sabang Jakarta pada Tanggal 7-9 Agustus 2019 (b) Penelitian Pagu Anggaran BPTJ Tahun 2020 Bersama Biro Perencanaan di Hotel Aone Jakarta pada Tanggal 24-25 Juli 2019

DIPA BPTJ Tahun 2020 Nomor: SP DIPA-022.13.1.015413/2020 terbit pada tanggal 12 November 2019 oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan yang dirilis di aplikasi SatuDJA sebesar Rp 406.587.093.000. Dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp. 25.189.700.000, belanja barang Rp. 120.611.810.000 dan belanja modal sebesar Rp. 260.785.583.000 untuk 216 kegiatan dan layanan dengan blokir 1 kegiatan, yaitu FS LRT Bandara Soekarno-Hatta – Kemayoran sebesar Rp. 843.260.000.

Pada proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2020, setiap usulan kegiatan harus diteliti baik dari sisi keterkaitannya terhadap sasaran dan program, kewenangannya serta kelengkapan data dukung. Adapun yang melakukan penelitian di internal BPTJ adalah Bagian Perencanaan dan Keuangan. Namun, terdapat permasalahan yang terjadi pada proses penginputan di aplikasi e-planning. Selama ini Satuan Kerja (Satker) BPTJ hanya memiliki satu akses, yaitu di Bagian Perencanaan dan Keuangan, sehingga fungsi perencanaan sebagai validator tidak dapat berjalan dengan maksimal karena Bagian Perencanaan dan Keuangan melakukan dua fungsi sekaligus, baik sebagai penginput data dan sebagai validator.

Blokir 1 kegiatan terjadi karena tidak tersampaikan studi awal trase Direktorat Jenderal Perkeretaapian kepada Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal sehingga kegiatan FS LRT Bandara Soekarno-Hatta – Kemayoran dianggap telah dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Satuan Kerja (Satker) BPTJ telah menyampaikan permasalahan ini secara verbal kepada Biro Perencanaan agar Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustikom) membuat *user* tersendiri untuk masing-masing Unit Kerja Eselon II di lingkungan BPTJ agar dapat mengakses aplikasi e-planning. Sementara itu, untuk buka blokir 1 kegiatan akan dilakukan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2020.

Rekomendasi solusi dari persoalan ini perlu ditindaklanjuti dengan penyampaian surat permohonan penambahan *user* aplikasi e-planning kepada pihak Pustikom sehingga pada saat memasuki RKA tahun 2021, masing-masing Unit Kerja Eselon II di lingkungan BPTJ sudah dapat mengakses aplikasi e-planning dengan *user* tersebut. Untuk menghindari dari adanya blokir kegiatan karena tumpang tindih kegiatan dengan subsektor lain yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan, maka BPTJ akan menyampaikan surat kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memuat daftar usulan kegiatan BPTJ Tahun 2021 sebelum pagu kebutuhan tahun 2021 ditetapkan.

3. **Pembahasan *Draft Rencana Strategis (Renstra) BPTJ Periode Tahun 2020-2024***

Sehubungan dengan akan berakhirnya periode perencanaan Renstra BPTJ periode 2016-2019 maka perlu Bagian Perencanaan telah mengakomodir penyusunan *draft* Renstra BPTJ periode tahun 2020-2024. Dokumen ini disusun dengan berkoordinasi kepada seluruh direktorat di lingkungan BPTJ serta dengan unit kerja lain di luar BPTJ baik di dalam maupun di luar Kementerian Perhubungan untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang handal dan tidak tumpang tindih dengan kebijakan dan perencanaan di unit lainnya.

Draft Renstra disusun berdasarkan penurunan atas sasaran, indikator dan program pembangunan infrastruktur transportasi yang tertuang pada *draft* RPJMN yang disusun oleh BAPPENAS dan *draft* Renstra Kementerian Perhubungan yang disusun oleh Biro Perencanaan. Selain itu *draft* Renstra BPTJ Tahun 2020-2024 juga telah diselaraskan dengan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) sebagai landasan BPTJ dalam penyelenggaraan transportasi Jabodetabek. *Draft* Renstra tersebut kemudian akan disosialisasikan kepada Pemerintah Daerah di Jabodetabek dan kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk mendapat masukan dan koreksi.

Saat ini progres penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam *draft* Renstra BPTJ periode tahun 2020-2024 telah diselaraskan dengan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) dan akan menyesuaikan juga dengan Renstra Kementerian Perhubungan.

Dalam penyusunan Renstra BPTJ Tahun 2020-2024, BPTJ kesulitan untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPTJ karena IKU dalam *draft* Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 berbeda dengan IKU yang menjadi target BPTJ sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (RITJ) Tahun 2018-2019. Selain itu BPTJ terkendala dengan biaya penyusunan Renstra Tahun 2020-2024 karena kegiatan ini tidak dianggarkan di RKA BPTJ Tahun 2019.



Gambar 4. Pembahasan Draft Renstra BPTJ 2020-2024 di Ruang Rapat Utama BPTJ pada Bulan November 2019

BPTJ telah menyusun matriks Sasaran Program, Indikator Kinerja Utama/Program (IKU) yang merupakan hasil sinkronisasi dari Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan dengan IKU dalam Perpres 55 Tahun 2018. Sedangkan biaya penyusunan Renstra menggunakan anggaran dari kegiatan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan.

Rekomendasi solusi dari persoalan ini perlunya penyiapan anggaran penyusunan Renstra untuk biaya konsultan, hal ini karena semua sub sektor yang ada di Lingkungan Kementerian Perhubungan menggunakan bantuan konsultan dalam penyusunan Renstra, sehingga Renstra BPTJ Tahun 2020-2024 diharapkan dapat dijadikan acuan BPTJ dalam menyelesaikan tugas BPTJ sebagaimana dimuat dalam dokumen RITJ untuk 5 (lima) tahun ke depan.

4. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Transportasi di Wilayah Jabodetabek bersama Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga Terkait

Dalam mewujudkan sistem manajemen perencanaan yang lebih baik maka tidak hanya dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran saja yang perlu sinkronisasi tetapi juga dokumen perencanaan jangka Panjang dan dokumen perencanaan lainnya. Hal ini dapat terlaksana melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Transportasi Jabodetabek. Melalui Rapat tersebut dilakukan pembahasan terkait rencana program dan kegiatan masing-masing Pemerintah Daerah di Jabodetabek dan di Kementerian/Lembaga terkait untuk disinkronkan dengan program dan kegiatan di RITJ.



Gambar 5. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Transportasi di Wilayah Jabodetabek di Hotel *Best Western Premiere The Hive* Jakarta pada Tanggal 23-25 Januari 2019

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Transportasi di Wilayah Jabodetabek bersama Pemerintah Daerah dan K/L Terkait merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden dan Menteri Perhubungan setelah Rapat Terbatas yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2016 untuk memperbaiki penataan transportasi Jabodetabek melalui integrasi dan sinkronisasi. Dokumen yang ditelaah meliputi dokumen Renstra Provinsi, Kota/Kabupaten dan Kementerian/Lembaga terkait serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kota/Kabupaten.

Permasalahan yang dihadapi adalah belum tersusunnya rencana aksi RITJ di lingkungan BPTJ maupun di tingkat Kementerian/Lembaga yang berakibat pada kurang jelasnya pembagian tugas dalam pelaksanaan program dan kegiatan RITJ khususnya pembagian tanggung jawab dan peran antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta masih banyaknya saran dan masukan baru dari Pemerintah Daerah dan *stakeholder* yang belum dapat ditampung dalam sinkronisasi RITJ.

5. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Unit Eselon I dan Eselon II di Lingkungan BPTJ

Dalam mendukung terlaksananya kegiatan yang direncanakan maka telah dilaksanakan SPIP di lingkungan BPTJ. SPIP sendiri merupakan sebuah sistem pengendalian yang berfungsi untuk memberikan keyakinan pada instansi pemerintah dalam pencapaian tujuan melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien disertai laporan keuangan dan pengelolaan aset yang akuntabel.

Pada tahun 2019, BPTJ telah mengimplementasikan SPIP pada tingkat Unit Eselon I dan Eselon II dengan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dan BPKP. SPIP diimplementasikan melalui pelaksanaan 25 sub unsur sistem pengendalian internal (SPI) yang salah satunya adalah analisis dan pemetaan risiko untuk menghasilkan rencana tindak pengendalian (RTP) terhadap risiko tersebut. Hingga Desember 2019, 87 kegiatan telah dianalisis dan menghasilkan 568 peta risiko dan RTP yang diikuti dengan evaluasi berkala yakni evaluasi penyelenggaraan SPIP Tahun 2018 dan evaluasi penyelenggaraan SPIP Semester 1 Tahun 2019. Dokumen-dokumen tersebutlah menjadi salah data dukung penilaian maturitas SPIP Unit Eselon I dan Eselon II.



Gambar 6. Sosialisasi dan Bimtek Pelaksanaan SPIP Unit Eselon I dan Eselon II di Lingkungan BPTJ di Hotel Bogor Valley pada Tanggal 22-24 April 2019

Maturitas SPIP dinilai terhadap 25 sub unsur yang ada dalam SPI. Secara garis besar, tiap sub unsur dinilai berdasarkan pada lima tingkat, yaitu:

- a. ketersediaan peraturan ataupun acuan (TOR/SOP) pelaksanaan kegiatan;
- b. sosialisasi atas peraturan dan acuan pelaksanaan kegiatan;
- c. implementasi atas peraturan dan acuan pelaksanaan kegiatan;
- d. terlaksananya evaluasi atas implementasi pelaksanaan kegiatan secara berkala; dan
- e. pemantauan atas evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan.

Berdasarkan penilaian maturitas SPIP di Lingkungan BPTJ yang telah dilakukan oleh Tim Assessor Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan didapati nilai maturitas SPIP Tahun 2019 sebesar 3,08 atau "Terdefinisi". Nilai tersebut lebih tinggi dibanding tahun 2018 yakni 2,96 atau "Berkembang". Peningkatan maturitas didorong oleh pelaksanaan evaluasi secara berkala.

6. Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemanfaatan Aplikasi Capaian Kinerja

Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan BPTJ yakni dengan meningkatkan kapasitas SDM BPTJ dalam mengukur, memantau dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja yang merupakan rangkaian dari pelaksanaan evaluasi internal. Pada tahun 2019 Bagian Perencanaan dan Keuangan telah melakukan Bimtek Pemanfaatan Aplikasi e-Performance dan e-SAKIP Reviu dan Bimtek Pemanfaatan Aplikasi e-Monev dan SMART di lingkungan BPTJ dan melaksanakan *monitoring* dan pelaporan berkala terhadap pencapaian kinerja dan pelaksanaan rencana dan program.

Pencapaian kinerja telah dilaporkan melalui aplikasi berbasis web yakni e-Performance, e-SAKIP Reviu, e-Monev dan SMART serta telah dilaporkan pula capaian kinerja tersebut setiap triwulan kepada Biro Perencanaan. Pencapaian kinerja yang dimaksud berkaitan dengan pencapaian kinerja atas capaian target Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Unit Eselon I dan Eselon II.



(a)

(b)

Gambar 7. (a) Bimtek Pemanfaatan Aplikasi e-Performance dan e-SAKIP Reviu di Hotel Salak Herritage Bogor pada Tanggal 11 Maret 2019 (b) Bimtek Pemanfaatan Aplikasi e-Monev dan SMART di Hotel Salak Padjajaran Bogor pada Tanggal 4-6 Juli 2019

7. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Eselon I dan Eselon II di Lingkungan BPTJ

Hasil *monitoring* tersebut digunakan untuk evaluasi capaian kinerja dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program. Bagian Perencanaan dan Evaluasi telah menyusun Laporan Evaluasi Rencana dan Program Tahun 2018 dan Evaluasi Rencana dan Program Semester 1 Tahun 2019. Evaluasi juga telah dilakukan pada pelaksanaan Rencana Strategis BPTJ Periode 2016-2019 untuk menjadi masukan bagi perencanaan Renstra BPTJ Periode 2020-2024.

Adapun hasil *monitoring* dan evaluasi tersebut telah dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Tahunan (LAPTAH) tingkat Unit Eselon I dan Eselon II. LAKIP sebagai laporan akuntabilitas atas kinerja pada tahun 2018 tingkat Eselon I telah disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal untuk kemudian dievaluasi.



Gambar 8. Penyusunan LAKIP Unit Eselon I dan Eselon II di Lingkungan BPTJ di Hotel Salak Tower Bogor pada Tanggal 18-19 Januari 2019

Berdasarkan hasil *reviu* dan evaluasi, dilakukan revisi atas LAKIP yang meliputi penambahan capaian kinerja secara periodik dari tahun 2016 hingga 2018 disertai dengan analisis pencapaian tren periodik tersebut. Revisi juga menambahkan analisis keberhasilan dan kegagalan terhadap pencapaian IKU BPTJ yang telah bersifat *outcome* beserta dengan analisis capaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

8. Koordinasi Penilaian Sistem Akauntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan BPTJ Bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Tolak ukur atas akuntabilitas kinerja adalah melalui penilaian terhadap implementasi SAKIP. Pelaksanaan SAKIP berpedoman pada PM Perhubungan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan sedangkan Penilaian didasari pada PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Penilaian didasari pada lima komponen, yaitu:

- a. Perencanaan Kinerja, terdiri dari penilaian atas kualitas Rencana Startegis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang disusun secara berjenjang dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan;
- b. Pengukuran Kinerja, terdiri dari penilaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai landasan dalam penilaian capaian kinerja;
- c. Laporan Kinerja, terdiri dari penilaian atas ketepatan waktu, kualitas laporan kinerja serta pemanfaatannya dalam perbaikan perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja;
- d. Evaluasi Internal, terdiri dari penilaian atas kualitas dan pemanfaatan hasil evaluasi beserta dengan frekuensi pelaksanaan evaluasi; dan
- e. Pencapaian Kinerja Organisasi, terdiri dari penilaian atas ketercapaian kinerja serta rasio ketercapaian terhadap periode sebelumnya.



Gambar 9. Koordinasi Penilaian SAKIP dan SPIP di Lingkungan BPTJ Bersama APIP Tahun 2019 di Hotel Mercure Sabang Jakarta pada Tanggal 08 Agustus 2019

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP BPTJ yang telah dilakukan oleh Tim Assessor Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, didapati nilai implementasi SAKIP atau nilai AKIP BPTJ tahun 2018 sebesar 72.24. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 66.66 dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 2. Perbandingan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP di Lingkungan BPTJ Tahun 2017-2018

No.	Komponen	Bobot Maks.	Nilai Tahunan		Keterangan
			2017	2018	
1	Perencanaan Kinerja	30%	22,17%	23,12%	Lebih Tinggi
2	Pengukuran Kinerja	25%	18,85%	17,92%	Lebih Rendah
3	Pelaporan Kinerja	15%	9,64%	8,63%	Lebih Rendah
4	Evaluasi Internal	10%	2,94%	9,19%	Lebih Tinggi
5	Pencapaian Sasaran	20%	13,00%	13,38%	Lebih Tinggi
Total			66,66%	72,24%	Lebih Tinggi

Sumber: Hasil Penilaian Tim Assessor Itjen Kementerian Perhubungan Tahun 2018 & 2019.

Peningkatan nilai AKIP didukung oleh peningkatan sejumlah komponen yaitu komponen perencanaan, komponen evaluasi dan pencapaian sasaran. Peningkatan nilai perencanaan kinerja tidak terlepas dari tindak lanjut dalam hasil evaluasi IKU oleh Kementerian PAN-RB yakni dengan melakukan reviu Renstra dan PK khususnya terhadap Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) agar seluruhnya dapat bersifat outcome dan menurunkan IKU yang masih bersifat output ke tingkat Unit Eselon II.

Adapun peningkatan signifikan pada komponen evaluasi internal didorong oleh pelaksanaan evaluasi yang dilakukan secara konsisten, terbuka serta berisikan rekomendasi yang disertai dengan tindak lanjut untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja dan pada pelaksanaan program kegiatan. Hal ini tidak terlepas dari terbentuknya Subbagian Evaluasi sehingga dapat berfokus dalam melaksanakan pemantauan, perhitungan, analisis dan pelaporan secara berkala dan akurat. Dan peningkatan pada komponen pencapaian sasaran didorong oleh peningkatan ketercapaian sasaran yang konsisten terus meningkat dari tahun ke tahun.

Disisi lain, penurunan nilai terjadi pada 2 komponen lainnya, yaitu pada komponen pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Penurunan nilai pengukuran kinerja disebabkan reviu terhadap IKU tidak dilakukan secara berkala dan belum diterapkannya sistem reward and punishment atas kinerja unit yang didasari pada capaian IKU. Sedangkan penurunan pelaporan kinerja disebabkan adanya miskoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal sehingga LAKIP tidak disampaikan tepat waktu yang turut menyebabkan penurunan nilai pada sub komponen lainnya. Berikut rekomendasi yang dapat diberikan untuk beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu:

- a. Menyampaikan Laporan Kinerja secara tepat waktu sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2016. Sekretaris BPTJ melalui Nota Dinas Nomor 327/STB/X/2019 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada BPTJ Tahun 2018 telah menginstruksikan Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk dapat mengkoordinasikan penyusunan LAKIP yang kemudian disampaikan

kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan paling lambat 40 hari setelah tahun anggaran berakhir sebagaimana sesuai dengan Pasal 23 Ayat 1 Poin b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2016.

- b. Menyusun secara tertulis mekanisme dan implementasi *reward and punishment* terhadap keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja karena belum ada aturan yang jelas. Sekretaris BPTJ melalui Nota Dinas Nomor 327/STB/X/2019 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP [ada BPTJ Tahun 2018 telah menginstruksikan Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk berkoordinasi dengan Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum dalam penyelenggaraan sistem *reward and punishment* atas keberhasilan/ kegagalan pencapaian target kinerja di lingkungan BPTJ. Mekanisme pelaksanaan sistem *reward and punishment* akan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala BPTJ beserta dengan tim yang akan menjadi penanggung jawab pelaksanaan sistem tersebut.
- c. Pemantauan rencana aksi dibuat secara detail dengan dibuat analisis keberhasilan dan kegagalan. Sekretaris BPTJ melalui Nota Dinas Nomor 327/STB/X/2019 telah menyampaikan rekomendasi kepada seluruh Unit Kerja Eselon II di lingkungan BPTJ untuk melaporkan capaian kinerja secara berkala sekaligus menyertakan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian rencana aksi disertai tindak lanjut perbaikan dengan memanfaatkan aplikasi capaian kinerja seperti aplikasi e-Performance, e-SAKIP, SMART dan e-Monev.
- d. Membuat evaluasi program pada akhir tahun dengan disertai rekomendasi perbaikan perencanaan dan ada bentuk dokumen tindak lanjut untuk perbaikan di tahun yang akan datang. BPTJ telah melakukan evaluasi pelaksanaan program pada akhir tahun 2018 dan pada akhir semester 1 tahun 2019. Evaluasi telah memuat hasil evaluasi yang disertai dengan keberhasilan, kegagalan serta rekomendasi saran perbaikan yang ditujukan kepada masing-masing Unit Eselon II di lingkungan BPTJ untuk menjadi acuan pada pelaksanaan program periode berikutnya.

Sekretaris BPTJ melalui Nota Dinas Nomor 327/STB/X/2019 telah menyampaikan rekomendasi kepada seluruh Unit Kerja Eselon II untuk melakukan evaluasi atas keseluruhan program tahun 2019 dengan memuat evaluasi atas perencanaan, pelaksanaan dan capaian program terhadap target yang telah ditentukan serta tindak lanjut perbaikan. Hasil evaluasi kemudian disampaikan kepada Sekretaris BPTJ untuk dikonsolidasikan guna pelaksanaan evaluasi program Unit Kerja Eselon I.
- e. Evaluasi atas rencana aksi sebaiknya dilakukan secara periodik dan ada bentuk dokumen tindak lanjut dalam bentuk langkah2 nyata. Evaluasi program yang dilakukan pada semester 1 tahun 2019 telah menghasilkan rekomendasi atau rencana aksi atas evaluasi yang ditujukan kepada seluruh Unit Kerja Eselon II dan Eselon III di lingkungan BPTJ. Rencana aksi tersebut kemudian akan dievaluasi pada evaluasi program tahun 2019 yang akan dilakukan pada bulan Desember 2019.

Sekretaris BPTJ melalui Nota Dinas Nomor 327/STB/X/2019 telah menyampaikan rekomendasi kepada Unit Kerja Eselon II untuk melakukan evaluasi atas rencana aksi setiap bulannya dengan memanfaatkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan dan pencapaian rencana aksi.

9. Rapat Koordinasi Rencana Aksi Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) Periode Tahun 2018-2024

Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) merupakan salah satu acuan bagi BPTJ dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan dan mewujudkan integrasi layanan transportasi di Jabodetabek yang nyaman, aman, efisien dan terjangkau. RITJ tersusun untuk mencapai 8 (delapan) sasaran yang dijawantahkan melalui 9 (sembilan) pilar kebijakan yang kemudian dijabarkan kedalam lebih dari 79 program dan 908 kegiatan untuk dilaksanakan selama periode tahun 2018 hingga 2029.

Dalam hal ini BPTJ mengkoordinasikan dan menyinkronisasikan perencanaan pembangunan dan pengelolaan layanan transportasi di wilayah Jabodetabek dengan cara bekerja sama dengan seluruh *stakeholder* terkait yang meliputi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dan Kementerian/Lembaga terkait. Sinkronisasi dan koordinasi pada umumnya telah dilakukan secara terus menerus oleh masing-masing direktorat di Lingkungan BPTJ bersama dengan *stakeholder* terkait, sedangkan pembahasan terkait pemutakhiran kinerja pelaksanaan RITJ dilakukan setiap tahunnya melalui Rapat Koordinasi bersama dengan *stakeholder* terkait.



Gambar 10. Rapat Koordinasi Rencana Aksi RITJ 2018-2024 di Hotel Best Western Premiere The Hive Jakarta pada Tanggal 22-24 Januari 2019

Berdasarkan hasil rapat koordinasi Rencana Aksi RITJ Periode Tahun 2018-2024 yang telah dilakukan bersama dengan *stakeholder* terkait pada awal Bulan Januari 2019 didapati bahwa 154 kegiatan atau 16% dari total kegiatan telah mulai dilaksanakan hingga tahun 2019. Kegiatan tersebut mulai dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga dengan berkoordinasi dengan BPTJ.

Capaian tersebut masih lebih rendah daripada yang ditargetkan yaitu 22%. Ketidaktercapaian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Belum tercapainya alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pengelolaan transportasi Jabodetabek.
- b. Minimnya pemanfaatan sumber pembiayaan diluar APBN dan APBD seperti KPBU dan PINA dalam pendanaan pembangunan dan pengelolaan layanan transportasi di Wilayah Jabodetabek.
- c. Belum ada penetapan rincian tahapan pelaksanaan dan penanggung jawab utama pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam RITJ.

Belum tersusunnya daftar kegiatan prioritas beserta tahapan pelaksanaannya dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan yang memiliki tingkat kerumitan tinggi dan tingkat kebermanfaatan yang besar.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan RITJ, sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi secara aktif dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kota/Kabupaten beserta Kementerian/Lembaga terkait untuk menyusun secara detail tahapan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tiap kegiatan yang diikuti dengan pemilihan penanggung jawab/pelaksana atas setiap kegiatan tersebut.
- b. Bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk menyusun model bisnis atas rencana layanan transportasi yang dianggap strategis dan prioritas sebagai cara untuk mempermudah keterlibatan swasta dalam pembiayaan pembangunan dan pengelolaan layanan transportasi.
- c. Secara berkala memantau kemajuan (*progress*) dan mengevaluasi pelaksanaan tiap kegiatan baik yang dilakukan oleh BPTJ maupun oleh stakeholder terkait.

10. Penyusunan Laporan Daya Serap

Pengelolaan belanja anggaran dilaksanakan dengan penyusunan laporan daya serap sebagai salah satu bagian dari laporan keuangan. Laporan daya serap telah disusun dan dilaporkan setiap bulannya dengan bantuan aplikasi SAS. Laporan disusun dengan membandingkan antara pagu dan daya serap (realisasi) tiap bulannya.

Pada tahun anggaran 2019 total alokasi anggaran Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebesar Rp. 74.215.456.000,00 realisasi anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 73.980.925.114,00 (99,68%) Capaian ini melebihi target realisasi (*prognosa*) anggaran yang telah ditetapkan, yaitu 97%. Pencapaian ini tidak terlepas dari beberapa faktor, sebagai berikut:

- a. Restrukturisasi organisasi BPTJ yang terjadi di awal tahun 2019 dengan penambahan 19 Eselon IV yang menyebabkan tingginya penerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan khususnya pada seluruh Direktorat.
- b. Pengelolaan terminal yang baru dimulai tahun 2019 yang meliputi Terminal Pondok Cabe, Terminal Poris Plawad, Terminal Jatijajar dan Terminal

Baranangsiang, dipergunakan untuk biaya pemeliharaan dan penyediaan fasilitas untuk pengguna jasa.

- c. Tidak adanya kegiatan yang diblokir pada tahun 2019.



Gambar 11. Grafik Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran terhadap Target dan Prognosa Tahun 2019

Terdapat sejumlah alternatif solusi untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan di Lingkungan BPTJ, sebagai berikut:

- Perlu perbaikan terhadap perencanaan anggaran yang memperhatikan isu strategis di lingkungan BPTJ seperti re-organisasi dan peningkatan kebutuhan anggaran dalam pengelolaan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok unit kerja sehingga dapat mengajukan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang sesuai dengan kebutuhan.
- Melakukan koordinasi secara intens dengan Kementerian Keuangan cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) beserta Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) dalam pengurusan sertifikasi lahan empat terminal yang dikelola oleh BPTJ.
- Menyusun model bisnis yang komprehensif terkait layanan trayek yang belum beroperasi di lingkungan Jabodetabek guna meningkatkan daya tarik bagi para operator dan investor layanan transportasi.
- Berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait pelayanan angkutan sewa khusus berbasis online untuk dapat patuh terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 khususnya dalam hal pengajuan izin layanan.

11. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan BPTJ

Pengelolaan penerimaan di lingkungan BPTJ dilaksanakan dengan mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan BPTJ berasal dari 2 kegiatan, yaitu Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek dan Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) di Wilayah Jabodetabek. Hingga Desember 2019, realisasi total PNBP di lingkungan

BPTJ mencapai Rp 6.358.563.186 atau 85.4% dari target yang telah ditentukan, yaitu Rp 7.445.250.000.

Tidak tercapainya target PNBPN disebabkan adanya penurunan jumlah pengajuan izin trayek baik pengajuan baru maupun perpanjangan izin akibat dari bangkrutnya sejumlah perusahaan operator layanan transportasi (PO) imbas dari ketatnya persaingan dengan layanan transportasi online. Meski sudah ada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Angkutan Sewa Khusus yang mengatur terkait izin layanan angkutan sewa khusus berbasis *online*, namun belum ada kejelasan pelaksanaan dan penindakan yang jelas sehingga pengajuan izin sebagian besar belum terlaksana.

Tabel 3. Target dan Realisasi PNBPN di BPTJ Tahun 2019

Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek	7.358.850.000	5.947.950.000	81
Angkutan Umum Dalam Trayek	35.2000.000	40.9550.000	116
Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek	7.006.850.000	553.8400.000	79
Penyelenggaraan Andalalin di Wilayah Jabodetabek	86.400.000	110.400.000	128
Pendapatan Non Fungsional	-	300.213.186	-
Total	7.445.250.000	6.358.563.186	85%

12. Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan BPTJ

Pengelolaan terhadap aset di Lingkungan BPTJ dilaksanakan dengan penyusunan Laporan BMN. Laporan BMN disusun secara berkala yakni pada Semester 1 dan Semester 2 Tahun 2019. Laporan disusun menggunakan sistem aplikasi SIMAK BMN untuk mempermudah dalam melakukan penatausahaan BMN. Laporan ini terdiri dari Neraca, Laporan Barang Persediaan, Laporan Aset Tetap, Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan, Laporan Aset Tak Berwujud, Laporan penyusutan, Laporan Barang Rusak Berata yang telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang, Daftar Monitoring Pengelolaan BMN, Catatan atas Laporan BMN, BAR Internal SAKPA-SIMAK BMN dan Arsip Data Komputer (ADK).



Gambar 12. Persiapan Rekonsiliasi BMN Semester 2 dan Tahunan Tahun 2019 di Hotel Arch Bogor pada Tanggal 10 Januari 2020

Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan BPTJ pada tahun 2019, terdapat sejumlah persoalan dalam pengelolaan BMN yakni dalam urusan sertifikat tanah 4 terminal yang dikelola oleh BPTJ. Keempat terminal tersebut belum memiliki sertifikat tanah yang mengatasnamakan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) c.q. Kementerian Perhubungan. Sebagian diantaranya masih dalam proses balik nama dari pemilik lahan sebelumnya sedangkan sebagian lainnya masih dalam proses penerbitan sertifikat tanah baru disebabkan sertifikat tidak ditemukan saat proses hibah.

B. Bagian Hukum

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan yang telah disusun dan disahkan disosialisasikan sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan partisipasi *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPTJ. *Stakeholder* tersebut meliputi Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota, Unit Pelaksana Teknis, Operator di bidang transportasi, Asosiasi, Praktisi serta Akademisi. Adapun sosialisasi yang telah dilaksanakan dan diikuti oleh BPTJ, meliputi:

- a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perhubungan Darat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan Serta Penegakan Hukum Terhadap *Over Dimension* dan *Overload* tanggal 4-6 September 2019 di Hotel Marriott, Yogyakarta.



Gambar 13. Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan Serta Penegakan Hukum Terhadap *Over Dimension* dan *Overload* di Hotel JW Marriot Yogyakarta pada Tanggal 4-6 September 2019

- b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perhubungan Perkeretaapian Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur

Kereta Api dengan Jalan tanggal 10-12 Juli 2019 di Hotel *The Trans Resort* Bali.



Gambar 14. Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dengan Jalan di Hotel *The Trans Resort* Bali pada Tanggal 10-12 Juli 2019

Sebagai bagian dari institusi pemerintah, BPTJ memerlukan payung hukum dapat melangkah dan bertindak guna meningkatkan pelayanan, keterpaduan, konektivitas dan mobilitas pergerakan orang dan barang di wilayah Jabodetabek secara terintegrasi. Payung hukum tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Perhubungan, Keputusan Menteri Perhubungan hingga Surat Keputusan Kepala BPTJ.

Beberapa Rencana Peraturan yang disusun pada tahun 2019, sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menhub Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menhub Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Fasilitasi Teknis Alat Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi dan atau Jalan Kabupaten Kota di Wilayah Jabodetabek.
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Perhubungan Kepada Kepala BPTJ.
- e. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja sama dalam Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha pembangunan Proyek Cikarang Bekasi Laut kepada Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.
- f. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 175 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.



Gambar 15. Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Pelaksanaan Urusan Pemerintah Konkuren (RPP PUPK) di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang Diikuti oleh Bagian Hukum BPTJ pada Tanggal 22 Juli 2019

Pimpinan Rapat Kepala Biro Hukum Kementerian Koordinator Kemaritiman, peserta rapat perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Kementerian BPTJ dan Bagian Hukum BPTJ. Rapat bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, dengan agenda rapat melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Pelaksanaan Urusan Pemerintah Konkuren (RPP PUPK).

Peraturan perundang-undangan yang tersebut merupakan pendetailan dari peraturan sebelumnya, sebagian merupakan perubahan dari peraturan sebelumnya dan sebagian lainnya merupakan peraturan yang sifatnya baru sebagai pedoman untuk kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPTJ.

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan jaringan dokumentasi dan informasi hukum adalah terbatasnya koleksi peraturan perundang-undangan yang dimiliki di luar peraturan perundang-undangan di bidang transportasi, khususnya transportasi Jabodetabek. Mengingat dalam pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum tidak hanya terbatas untuk bidang transportasi Jabodetabek, namun juga bidang lain yang mempunyai keterkaitan secara langsung maupun tidak dengan transportasi Jabodetabek. Selain itu, belum tersedianya penyimpanan di BPTJ yang dapat menampung peraturan perundang-undangan di bidang transportasi, maupun hasil studi yang dikerjakan turut menjadi salah permasalahan dalam pelaksanaan pendokumentasian.

Adapun alternatif solusi dalam memperbaiki kinerja peningkatan jumlah regulasi dan sosialisasi peraturan di bidang transportasi Jabodetabek, sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah serta Kementerian/Lembaga terkait yang memiliki kewenangan dan peran dalam mengatur dan melaksanakan pelayanan

transportasi di lingkungan Jabodetabek dalam hal penyusunan regulasi yang komprehensif dan pendokumentasian jaringan informasi hukum yang masif dan akurat.

- b. Berkoordinasi dengan bagian umum dan penyediaan tempat penyimpanan peraturan maupun hasil studi guna memudahkan akses bagi seluruh pihak.

2. Kerjasama di Bidang Transportasi

Dalam menjalankan tugasnya BPTJ perlu menjalin kerja sama dan kesepakatan di bidang transportasi bersama dengan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Jabodetabek serta para *stakeholder* di bidang transportasi. Hal ini ditujukan untuk membentuk hubungan yang bersinergi dan berkesinambungan antar *stakeholder* di bidang transportasi di Wilayah Jabodetabek. Adapun kerja sama ini juga terjalin dengan pihak akademisi dari Universitas dan Sekolah Tinggi.

Beberapa perjanjian kerja sama dan kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh BPTJ, sebagai berikut:

- a. Perjanjian Novasi dengan PT. Pancakarya Grahatama Indonesia (PGI) dan Pemerintah Kota Bogor;
- b. Perjanjian Kerahasiaan dengan Kereta Commuter Indonesia;
- c. Kesepakatan Bersama dengan Kereta Commuter Indonesia;
- d. Kesepakatan Bersama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD);
- e. Kesepakatan Bersama antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Dengan Kementerian Perhubungan; dan
- f. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dengan Universitas Indonesia.

3. Pemberian Bantuan Hukum dan Pertimbangan Hukum

Tidak hanya menjalin perjanjian kerja sama dan kesepakatan, BPTJ juga memberikan bantuan hukum pada SDM baik itu pegawai maupun pejabat serta kepada pihak terkait guna memperlancar pelayanan transportasi Jabodetabek, selain itu BPTJ juga memberikan pertimbangan hukum/*legal opinion*.

Berikut beberapa contoh kegiatan pemberian bantuan hukum yang sudah dilakukan di lingkungan BPTJ, sebagai berikut:

- a. *Judicial review* Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Khusus Angkutan Sewa Khusus;
- b. Pendampingan sebagai saksi dalam sidang perkara arbitrase nomor 42010/III/ARB-BANI/2019 tentang Perkara Arbitrase antara PT. Pancakarya Grahatama Indonesia dengan PT. Lotte Mart Indonesia tanggal 2 Oktober 2019 di Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
- c. Pendampingan dalam sidang perkara KPPU nomor 13/KPPU-I/2019 tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan PT. Solusi Transportasi

Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia terkait Angkutan Sewa Khusus;

- d. Pendampingan sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang terkait surat panggilan saksi nomor B-PDM-18/O.6.16/EUH.2/1/2019.



Gambar 16. Pendampingan Sebagai Saksi Sidang di KPPU Perkara Nomor 13/KPPU-1/2019 pada Tanggal 26 November 2019 tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan PT. Solusi Transportasi Indonesia dan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia terkait Angkutan Sewa Khusus

BPTJ juga memberikan pertimbangan hukum/*legal opinion* diantaranya mengenai hal-hal berikut:

- a. Bangun Guna Serah Terminal Baranangsiang;
- b. Sertifikat Terminal Pondok Cabe dan Terminal Jatijajar;
- c. *Transit Oriented Development* (TOD) Terminal Poris Plawad;
- d. Proyek Strategis Nasional Cikarang Bekasi Laut (CBL);
- e. Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- f. Angkutan Sewa Khusus;
- g. *Electronic Road Pricing* (ERP).

C. Bagian Kepegawaian dan Umum

1. Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Kegiatan ini meliputi reorganisasi BPTJ guna meningkatkan kinerja instansi serta menyukseskan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek 2018–2029. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan jangka panjang pengembangan organisasi, SDM dan reformasi birokrasi di lingkungan BPTJ.



Gambar 17. Sosialisasi dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan BPTJ Tahun 2019 oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Perhubungan di Hotel The Anaya Bogor pada Tanggal 12 April 2019

2. *Capacity Building* Sumber Daya Manusia BPTJ

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan potensi SDM di lingkungan BPTJ dan memberikan penyegaran kemampuan pegawai dalam pelaksanaan tugas bekerja sama dengan subsektor lain seperti STTD, Bekasi ataupun PPSDMAP, Bogor.



Gambar 18. Bimbingan Teknis *Hospitality* di Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan pada Tanggal 18 November 2019

3. Sosialisasi Bidang Kepegawaian

Kegiatan sosialisasi terkait isu-isu kepegawaian kepada semua pegawai di lingkungan BPTJ. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan menghadirkan

narasumber di bidang kepegawaian maupun dari luar instansi Kementerian Perhubungan. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberi pemahaman mengenai hal-hal yang terkait di bidang kepegawaian di tiap-tiap unit kerja di lingkungan BPTJ.



Gambar 19. Sosialisasi Administrasi Kepegawaian di Terminal Jatijajar pada Tanggal 13 September 2019

4. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019

Kegiatan ini untuk mendukung penyelenggaraan pengadaan CPNS tahun 2019 yang meliputi kegiatan seleksi administratif hingga kegiatan supervisi selama periode pendaftaran CPNS 2019, kemudian dilanjutkan dengan proses menjawab sanggahan calon pelamar hingga pengumuman kelulusan tahap administrasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan penyelenggaraan pengadaan CPNS tahun 2019 dengan baik dan sesuai ketentuan serta terselenggaranya koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait.



Gambar 20. Koordinasi Proses Verifikasi Berkas Pelamar CPNS Formasi Tahun 2019 di Hotel Ara Gading Serpong pada Tanggal 04 Desember 2019

5. Peningkatan Jiwa Korsa

Kegiatan peningkatan kebersamaan yang melibatkan seluruh pegawai di lingkungan BPTJ. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pelatihan dasar mengenai kedisiplinan dan jiwa korsa pegawai serta menumbuhkan rasa tanggung jawab.



Gambar 21. Pengembangan Karakter Bagi Pegawai Non ASN di Lingkungan BPTJ di STTD pada Tanggal 14 April 2019

6. Penyuluhan Gerakan Anti Narkoba

Kegiatan penyuluhan dan tes kesehatan dari penggunaan narkoba yang dilakukan untuk semua pegawai di lingkungan BPTJ. Kegiatan ini juga dilakukan di sejumlah terminal yang dikelola oleh BPTJ. Tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyuluhan anti narkoba dan pemeriksaan terhadap pegawai dan pengemudi di beberapa terminal di kawasan Jabodetabek.



Gambar 22. Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Hote Permana Bogor pada Tanggal 20 Agustus 2019

7. Seleksi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) dan Caraka

Kegiatan ini meliputi seleksi pengadaan PPNPN dan evaluasi kinerja PPNPN yang bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu Universitas Indonesia. Tujuan dari kegiatan ini adalah mendapatkan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNP) yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Salah satu contoh kegiatan ini adalah kegiatan wawancara PPNPN dan Caraka pada hari Sabtu, 28 Desember 2019 di Terminal Jatijajar.



Gambar 23. Wawancara PPNPN dan Caraka di Terminal Jatijajar pada Tanggal 28 Desember 2019

8. Keikutsertaan Dalam Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)/Bimbingan Teknis (Bimtek)

Untuk meningkatkan kompetensi SDM, Subbagian Kepegawaian dan Organisasi bekerja sama dengan pihak penyelenggara diklat/bimtek untuk mengirimkan pegawai guna mengikuti diklat/bimtek. Pegawai yang diusulkan adalah pegawai yang memang memiliki minat telah mengikuti kegiatan diklat/bimtek ataupun pegawai yang memang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kegiatan tersebut guna meningkatkan kompetensi SDM yang mereka miliki.

Dalam pelaksanaannya, usulan pegawai yang akan mengikuti diklat/bimtek tersebut dapat disampaikan secara langsung ataupun secara *online*. Keikutsertaan pegawai dalam mengikuti bimtek tidak serta merta mengindikasikan minat/keinginan pegawai untuk mengikuti diklat/bimtek tersebut. Prosedur pendaftaran secara *online*, batas waktu penyampaian usulan pegawai ataupun jumlah kuota yang terbatas menjadi kendala dalam keikutsertaan pegawai dalam mengikuti diklat.



(a) (b)
Gambar 24. Kehadiran SDM BPTJ Dalam Diklat (a) Pembangunan Karakter di Ciwidey Bandung pada Tanggal 28 Oktober – 2 November 2019 (b) Hospitality di PPSDMAP Semplak Bogor pada Tanggal 18-20 November 2019

Sebagai tindak lanjut perbaikan dari kondisi diatas, perlu adanya upaya dari semua pihak baik dari Subbagian Kepegawaian dan Organisasi maupun dari pegawai itu sendiri. Adapun usulan terhadap perbaikan, sebagai berikut:

- a. Mengirimkan usulan peserta diklat sebelum tanggal jatuh tempo penyampaian. Jika sampai 1 (satu) hari menjelang tanggal jatuh tempo pendaftaran diklat/bimtek masih belum ada nota dinas usulan dari masing-masing unit kerja di lingkungan BPTJ terkait pegawai yang diusulkan untuk mengikuti diklat/bimtek dimaksud, maka usulan peserta diklat akan dikirimkan apa adanya, tidak perlu menunggu hingga semua unit kerja mengirimkan usulannya.
- b. Pemantauan surat usulan peserta diklat. Nota dinas terkait penyelenggaraan diklat/bimtek yang dikirim ke masing-masing unit kerja di lingkungan BPTJ dipantau tanggal pengirimannya dan diingatkan kembali menjelang tanggal jatuh tempo penyampaian usulan peserta diklat/bimtek.

Surat penawaran diklat/bimtek yang diterima oleh Subbagian Kepegawaian dan Organisasi langsung ditindak lanjuti dengan membuat nota dinas pemberitahuan penyelenggaraan diklat/bimtek kepada masing-masing unit kerja di lingkungan BPTJ agar segera diusulkan nama-nama pegawai dari masing-masing unit kerja yang akan mengikuti diklat/bimtek dimaksud.

D. Bagian Hubungan Masyarakat

1. Pencanaan Kampanye Jalan Hijau

Pencanangan Kampanye Jalan Hijau dilakukan dengan beberapa rangkaian kegiatan yang diawali dengan *press background* yang merupakan media penyampaian informasi yang bersifat *background* (latar belakang) kepada kalangan pers dan media. Pemberian informasi ini bersifat mendalam dan komprehensif sehingga dapat dijadikan pengetahuan dasar kalangan pers/media massa dalam menyajikan pemberitaan mengenai BPTJ dan isu transportasi Jabodetabek berdasarkan pijakan pengetahuan dan pemahaman yang benar serta utuh. *Press background* dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2019

dengan melibatkan Kepala BPTJ dan Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.



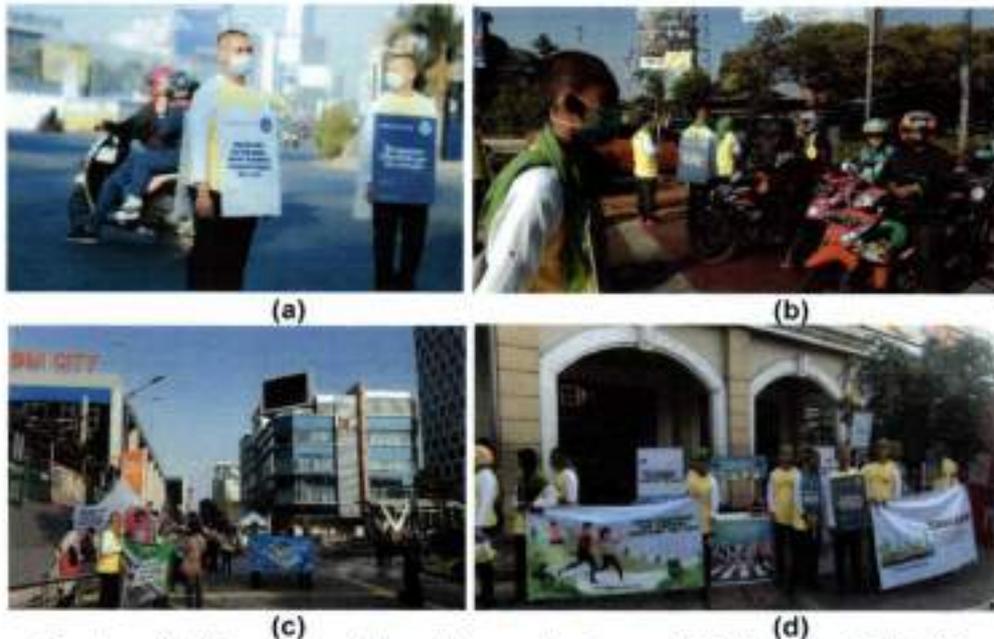
Gambar 25. Press Background Kampanye Jalan Hijau di Hotel Redtop Jakarta pada Tanggal 16 Agustus 2019

Rangkaian kampanye Jalan Hijau lainnya dilakukan melalui kegiatan *press tour* di Jalur Pedestrian Jalan Kendal pada tanggal 19 Agustus 2019. Melalui kegiatan *press tour* dimaksud, awak media dapat mengetahui secara langsung bagaimana kegiatan Kampanye Jalan Hijau berlangsung. Acara dilanjutkan dengan *doorstop* oleh media dan pernyataan oleh Kepala BPTJ dan Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga. Dalam pernyataannya, Kepala BPTJ memaparkan terkait Kampanye Jalan Hijau yang diinisiasi oleh BPTJ bertujuan untuk mendorong semaksimal mungkin masyarakat untuk berpindah dari kendaraan (bermotor) pribadi ke angkutan umum massal dan berjalan kaki. Rangkaian kampanye berikutnya yaitu memberikan informasi mengenai kampanye Jalan Hijau secara langsung kepada masyarakat melalui *talkshow* bersama Radio El Shinta.



Gambar 26. Penyampaian Informasi Kepada Media pada Saat Berlangsungnya Kampanye Jalan Hijau di Jalan Kendal pada Tanggal 19 Agustus 2019

Selain itu, kampanye Jalan Hijau juga dilaksanakan melalui aksi turun ke jalan selama 4 (empat) hari yaitu tanggal 19 s.d. 22 Agustus 2019 dengan titik-titik penting antara lain di sekitar Stasiun MRT Dukuh Atas, sekitar Stasiun Kereta Juanda, Depok dan Bekasi dengan melibatkan tim Humas BPTJ, Tim ATCS dan 60 Taruna/i Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) serta melibatkan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olah Raga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.



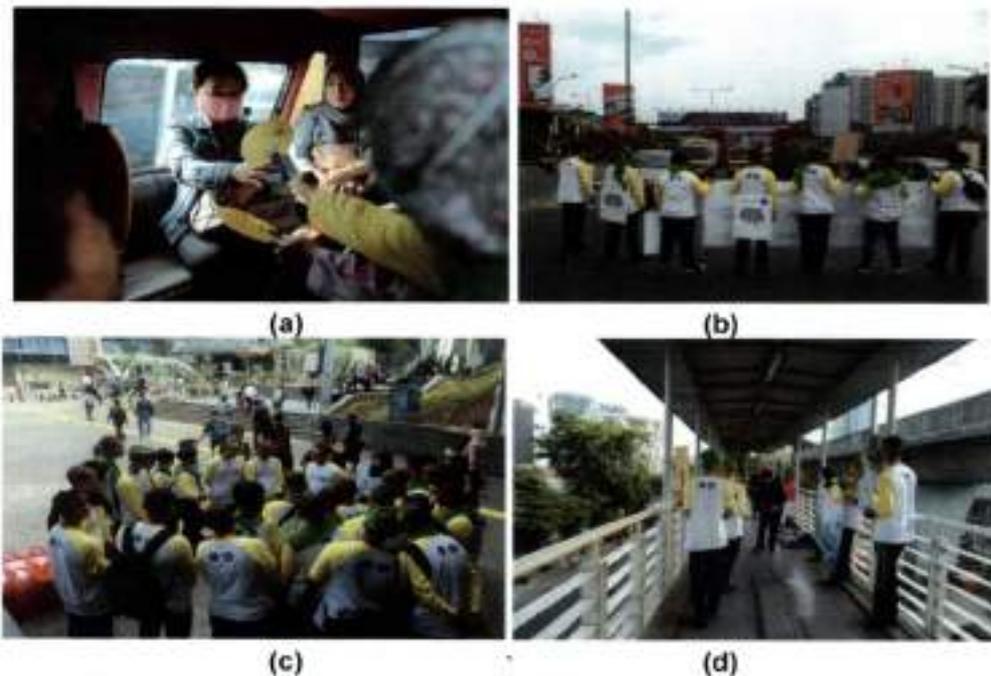
Gambar 27. Kampanye Jalan Hijau pada tanggal 19 Agustus 2019 di 4 Lokasi (a) Bekasi (b) Depok (c) Dukuh Atas (d) Juanda



Gambar 28. Kampanye Jalan Hijau pada tanggal 20 Agustus 2019 di 4 Lokasi (a) Bekasi (b) Depok (c) Dukuh Atas (d) Juanda



Gambar 29. Kampanye Jalan Hijau pada tanggal 21 Agustus 2019 di 4 Lokasi (a) Bekasi (b) Depok (c) Dukuh Atas (d) Juanda



Gambar 30. Kampanye Jalan Hijau pada tanggal 22 Agustus 2019 di 4 Lokasi (a) Bekasi (b) Depok (c) Dukuh Atas (d) Juanda

Pesan yang disampaikan melalui kegiatan ini berupa:

- a. Menyampaikan pesan-pesan yang bersifat apresiasi kepada masyarakat komuter/pelaju Jabodetabek yang telah melakukan kegiatan berjalan kaki

sebagai bagian aktifitas menggunakan angkutan umum massal sehari-hari yang berdampak pada perilaku hidup sehat bagi diri sendiri dan lingkungan,

- b. Menyampaikan pesan-pesan ajakan untuk melakukan kegiatan berjalan kaki kepada masyarakat komuter/pelaju yang selama ini belum banyak melakukannya sebagai bagian dari aktifitas menggunakan angkutan umum massal, dengan pendekatan isu kesehatan.
- c. Menggalang masukan dari masyarakat komuter/pelaju tentang hal-hal apa saja yang diharapkan guna mendorong semakin banyak mereka melakukan aktifitas berjalan kaki sebagai bagian dari aktifitas menggunakan angkutan umum massal, menuju transportasi berkelanjutan.



Gambar 31. Pelaksanaan Kampanye Jalan Hijau di Jalan Kendal pada Tanggal 19 Agustus 2019

Penyampaian pesan Kampanye Jalan Hijau diperkuat dengan pemanfaatan media *mainstream* maupun media sosial, walaupun dalam skala terbatas, cukup mendapat perhatian publik. Hal ini diantaranya dapat diindikasikan dengan beberapa kali tagar isu Kampanye Jalan Hijau menjadi *trending topic* di media sosial.



Gambar 32. Pemanfaatan Media Sosial Mengenai Pelaksanaan Kampanye Jalan Hijau

Selain itu untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kampanye melalui media (*above the line*), publikasi juga dilakukan melalui advetorial detik.com pada kanal news, isu strategis yang diangkat dalam pemberitaan tersebut adalah program baru BPTJ yang disebut dengan jalan hijau untuk mendorong orang menggunakan transportasi umum yang sekaligus berdampak pada upaya mengurangi kondisi polusi udara Jakarta yang makin parah. Media *online* berskala nasional lainnya juga menggaungkan pemberitaan kampanye jalan hijau secara masif, diantaranya adalah Kompas dan BisnisNews.



Gambar 33. Pemberitaan dan Publikasi Mengenai Kampanye Jalan Hijau di Beberapa Media Online

Kegiatan kampanye juga berhasil menjaring masukan dari 1.068 pejalan kaki untuk perbaikan penyelenggaraan angkutan umum massal dan berjalan kaki. Puncak pelaksanaan kampanye jalan hijau juga dilaksanakan dengan kegiatan *below the line*, yaitu penyelenggaraan kampanye di area *car free day* Jalan Imam Bonjol, Bundaran HI Jakarta, tanggal 1 September 2019. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pejabat dan karyawan di lingkungan BPTJ serta Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kementerian Kesehatan beserta jajarannya, masyarakat, taruna/i STTD. Kampanye dilakukan dengan berjalan kaki sejauh 1,26 Km bersama seluruh peserta dari MRT Dukuh Atas (Jalan Kendal) menuju arena panggung terbuka di Bundaran HI (Jalan Imam Bonjol). Pesan yang disampaikan melalui kegiatan ini adalah apresiasi kepada para pejalan kaki sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran tentang pentingnya berjalan kaki dan menggunakan angkutan umum massal sebagai bagian aktifitas bertransportasi yang berdampak positif mengurangi kemacetan, polusi udara dan pembentukan pola hidup sehat.

Selain kampanye berjalan kaki, kegiatan juga diisi dengan *talkshow* bersama Sekretaris BPTJ dan Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kementerian Kesehatan yang dipandu oleh *influencer* Ivy Batutah. Kegiatan ditutup dengan *games* dan *band* hiburan di panggung terbuka. Kegiatan *below the line* ini pada

dasarnya merupakan kegiatan inti dari keseluruhan kegiatan kampanye jalan hijau yang dilakukan.



Gambar 34. Puncak Pelaksanaan Kampanye Jalan Hijau di Jalan Kendal dan Jalan Imam Bonjol, Jakarta pada Tanggal 01 September 2019

2. Sosialisasi Kegiatan Save Puncak

a. Sosialisasi Uji Coba Sistem 2-1 Jalur Puncak

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Kementerian Perhubungan beserta instansi terkait seperti Polres Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor berupaya untuk merumuskan sistem Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRL) yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang selalu terjadi di Kawasan Puncak setiap akhir pekan. Sistem MRL baru yang diuji coba disebut dengan Sistem 2-1 dan hanya diberlakukan pada akhir pekan.

Upaya untuk mensosialisasikan uji coba sistem 2-1 jalur Puncak dilakukan di Simpang Gadog dengan melibatkan wartawan media cetak, *online* dan elektronik dengan narasumber Kepala BPTJ dan Kapolres Bogor pada 12 Oktober 2019.



Gambar 35. Sosialisasi Uji Coba Sistem 2-1 Jalur Puncak di Simpang Gadog, Megamendung, Bogor pada tanggal 12 Oktober 2019

Guna mendukung pelaksanaan uji coba system 2-1 jalur Puncak maka telah dilakukan sosialisasi melalui *press tour* dengan melibatkan wartawan media cetak, online dan elektronik baik lokal maupun nasional dengan narasumber Bupati Bogor, Dirjen Perhubungan Darat, Kapolres Bogor, Kasatlantas Polres Bogor, dan seluruh Pejabat Eselon II BPTJ.



Gambar 36. Press Tour Uji Coba Sistem 2-1 Jalur Puncak di Simpang Gadog, Megamendung, Bogor pada Tanggal 12 Oktober 2019

Melalui kegiatan *press tour* diharapkan awak media dapat mengetahui secara langsung bagaimana sistem MRLL diuji coba. Jika dalam rekayasa lalu lintas buka-tutup kendaraan hanya bisa bergerak satu arah pada waktu tertentu (hanya Simpang Gadog menuju Puncak atau hanya arah sebaliknya), maka pada skema optimasi lajur 2-1 kendaraan dapat bergerak dari dua arah dalam waktu bersamaan. Pada skema ini, jalur Puncak akan dioptimalkan menjadi 3 lajur. Pemisahan lajur dilakukan dengan menempatkan *traffic cone* sepanjang Jalur Puncak mulai dari Simpang Gadog hingga Taman Safari Indonesia.

MRLL Sistem 2-1 melibatkan peran masyarakat setempat untuk ikut mengawasi. Penyampaian informasi kepada masyarakat selain dilakukan melalui media sosial juga dilakukan secara langsung melalui pembagian *flyer* dan pemasangan spanduk.



Gambar 37. Penyebaran Informasi Kepada Masyarakat Melalui Media Sosial



Gambar 38. Informasi yang Disebarluaskan Kepada Masyarakat Melalui Pembagian Flyer di (a) Riung Gunung dan (b) Gadog serta Pemasangan Spanduk di (c) Pintu Tol Ciawi

Rencana implementasi MRL dengan sistem 2-1 ini merupakan bagian dari usulan jangka pendek penanganan transportasi jalur Puncak. Upaya lain yang termasuk dalam kerangka jangka pendek diantaranya adalah penyediaan program wisata ke puncak dengan angkutan umum massal point to point dari Jakarta ke berbagai tempat wisata di Puncak, penyediaan *shuttle service* dan *park & ride* menuju jalur Puncak, sosialisasi jalur alternatif (menjelang *exit* Cibubur), percepatan pelaksanaan pelebaran jalan dari Gadog - Puncak, dan percepatan pembangunan *rest area* di Gunung Mas.

b. Sosialisasi Layanan Angkutan Umum Massal Menuju Kawasan Puncak

Program wisata dengan angkutan umum massal *point-to-point* dilakukan melalui *flag off* Bus Transjabodetabek Premium Puncak dilakukan bersama-sama Kepala BPTJ dan Direktur Big Bird Indonesia pada tanggal 28 September 2019 di Pasaraya Blok M dan Taman Safari Indonesia. Layanan wisata yang ditawarkan adalah paket perjalanan dari Pasaraya Blok M menuju Taman Safari Indonesia. Dengan tarif Rp 400.000, paket tersebut sudah termasuk tiket PP, tiket masuk wisata Taman Safari Indonesia, dan makanan ringan.



Gambar 39. Flag Off dan Doorstop Uji Coba Sistem 2-1 Jalur Puncak di Pasaraya Blok M pada Tanggal 28 September 2019

Tidak hanya sebatas pada seremonial *flag off* semata, untuk dapat memberikan gambaran melalui pengalaman langsung, dilaksanakan kegiatan *press tour* dengan mengajak awak media baik *online* maupun elektronik dengan menikmati langsung layanan bus yang melayani perjalanan pariwisata hingga ke Taman Safari Indonesia. Setelah rangkaian kegiatan dilangsungkan, acara dilanjutkan dengan *doorstop* oleh media dan pernyataan oleh Kepala BPTJ. Kegiatan *doorstop* dilakukan di Taman Safari Indonesia.



Gambar 40. Konferensi Pers Kegiatan Peluncuran Layanan Angkutan Umum Massal Menuju Kawasan Wisata Puncak

3. Partisipasi Dalam Pameran *Railway Tech* 2019

BPTJ berkesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan Indonesia Railway Tech Conference 2019 dengan tema *Jakarta Rail Transport Planning* pada tanggal 20-22 Maret 2019 di JIExpo Kemayoran. Dalam acara ini, BPTJ mendapatkan apresiasi karena telah berpartisipasi dan mendukung acara kegiatan pameran tersebut. Pengunjung yang datang dalam pameran ke *booth* BPTJ, antara lain mahasiswa, pebisnis, WNA, *stakeholder* dan masyarakat umum.



Gambar 41. Pameran *Railway Tech* 2019 di JIExpo pada Tanggal 20-22 Maret 2019



Gambar 42. Plakat dan Sertifikat BPTJ Sebagai Apresiasi pada Pameran *Railway Tech* 2019

4. **Kegiatan Publikasi dan Edukasi Kepada Anak-Anak Tentang Pentingnya Menggunakan Transportasi Umum**

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan publikasi dan memberikan pengetahuan dini mengenai pentingnya menggunakan transportasi umum kepada anak-anak dan calon penumpang pada masa mudik angkutan lebaran tahun 2019. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2019 di Terminal Pondok Cabe dan tanggal 29 Mei 2019 di Terminal Jatijajar dengan narasumber Sekretaris BPTJ.

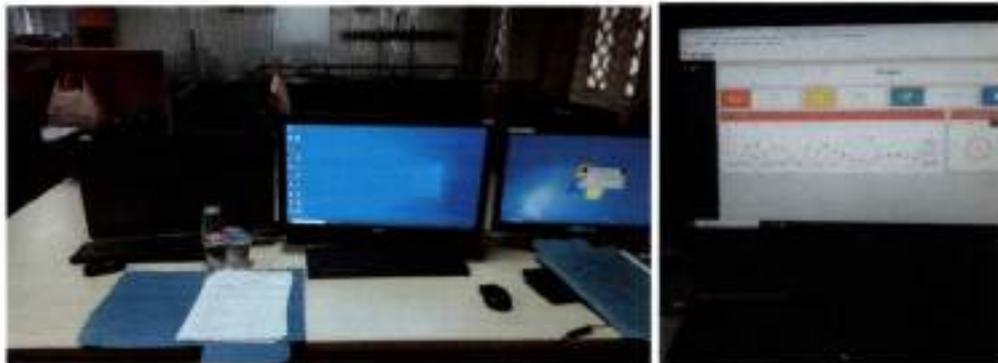


Gambar 43. Kegiatan Publikasi dan Edukasi Kepada Anak-Anak di Terminal Pondok Cabe pada Tanggal 28 Mei 2019 dan Terminal Jatijajar pada Tanggal 29 Mei 2019

5. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Bagi Masyarakat Umum

Pelayanan informasi publik BPTJ dilaksanakan melalui *Contact Center* (CC) 151 adalah penugasan langsung dari Menteri Perhubungan, sebagaimana Unit Eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Perhubungan. Sejak 2019, BPTJ mendapatkan penugasan CC 151 sebagai salah satu bentuk pelayanan informasi kepada publik dan menerima pengaduan masyarakat.

Pelaksanaan CC 151 BPTJ pada tahun 2019 dilaksanakan setiap hari kerja pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB bertempat di Jl. Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Anggota CC 151 BPTJ berjumlah 40 orang dengan komposisi petugas sebanyak 10 orang, baik ASN maupun PPNPN, yang berasal dari masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat dan Direktorat Teknis terkait.



Gambar 44. Pelayanan Informasi Publik BPTJ melalui CC 151

6. Kegiatan Publikasi Melalui Media Cetak dan Elektronik

Publikasi dalam bentuk iklan/advertorial di media massa bertujuan untuk menyampaikan informasi mendalam mengenai kebijakan yang dilakukan oleh BPTJ khususnya pada pelaksanaan angkutan lebaran tahun 2019 (disampaikan melalui *Bisnis Indonesia*) dan dukungan BPTJ terhadap layanan integrasi di bidang sistem tiket (disampaikan melalui *Rakyat Merdeka*).



Gambar 45. Publikasi Dalam Bentuk Iklan/Advertorial di Media Massa

Publikasi juga dilakukan pada Agustus 2019 melalui *talkshow* di Radio Elshinta dan *Hard Rock* yang mempunyai segmentasi pendengar eksekutif muda yang masih menggunakan kendaraan pribadi sebagai pilihan transportasinya.



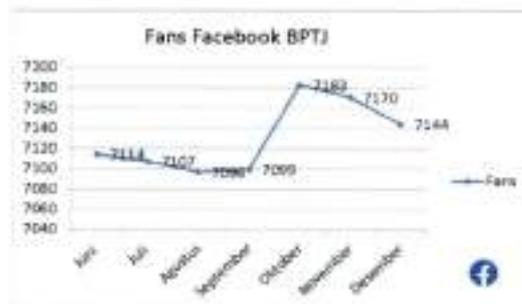
Gambar 46. Publikasi Melalui *Talkshow* di Radio *Hard Rock* dan Elshinta

7. Publikasi Melalui Media Sosial Internet (*Facebook, Instagram, Twitter*)

Pemanfaatan media sosial yang mempunyai segmentasi pengguna dari segala kalangan merupakan sarana media yang sangat tepat untuk menyampaikan informasi mendalam mengenai kebijakan yang dilakukan oleh BPTJ, dan media sosial ini juga merupakan sarana dalam mengajak masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan umum sebagai alat transportasinya.



Gambar 47. Publikasi Melalui Media Instagram (@Bptjkemenhub)



Gambar 48. Publikasi Melalui Media Facebook (BPTJ151)



Gambar 49. Publikasi Melalui Media Twitter (@bptj151)

8. Pengembangan Portal BPTJ

Pengembangan portal BPTJ di alamat <http://bptj.dephub.go.id> dilakukan guna menyelaraskan tampilan dengan portal Kementerian Perhubungan.

pengembangan portal BPTJ juga dimaksudkan guna memaksimalkan penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media elektronik yang telah terintegrasi dengan media sosial BPTJ. Sepanjang tahun 2019, portal BPTJ telah dilihat sebanyak 88.181 kali. Dampak dari kegiatan pengelolaan *website* pada tahun 2019 adalah terpenuhinya informasi mengenai kebijakan transportasi di wilayah perkotaan, khususnya Jabodetabek.



Gambar 50. Tampilan Pengembangan Portal BPTJ

Sepanjang tahun 2019, Bagian Hubungan Masyarakat telah menyelesaikan 7 program kegiatan pokok yang ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kegiatan pokok yang dilakukan secara swakelola berupa 3 (tiga) kegiatan pada Subbagian Pemberitaan dan Pengelolaan Media Sosial, yaitu: hubungan media; pengelolaan media sosial dan jejaring komunikasi; serta analisis berita dan opini publik dan 4 (empat) kegiatan pada Subbagian Publikasi dan Pelayanan Informasi yaitu: penyelenggaraan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat; kegiatan penyusunan materi publikasi (non-pemberitaan); penyusunan dokumentasi dan pengelolaan website BPTJ.

Dari pelaksanaan kegiatan 2019, kegiatan Hubungan Masyarakat BPTJ telah berhasil melaksanakan kegiatan sesuai capaian yang ditentukan. Secara kuantitatif seluruh kegiatan telah dilaksanakan meskipun secara kualitatif terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun sasaran strategis pelaksanaan kegiatan Bagian Hubungan Masyarakat adalah terlaksananya kegiatan hubungan media, terlaksananya pengelolaan media sosial dan jejaring komunikasi, terselenggaranya kegiatan publikasi dan dokumentasi menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan transportasi di Jabodetabek serta terselenggaranya pelayanan informasi publik menyangkut penyelenggaraan transportasi di Jabodetabek. Sejalan dengan sasaran tersebut, hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan Bagian Hubungan Masyarakat diuraikan, sebagai berikut:

- a. Media sosial telah menjadi media paling mudah untuk melihat respon dan interaksi masyarakat (*netizen*) terkait kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan oleh BPTJ.

- b. Analisis berita dan opini publik telah dapat memetakan kecenderungan yang terdapat pada pemberitaan media maupun opini publik yang berkembang di tengah masyarakat sekaligus merumuskan rekomendasi sebagai upaya dalam merespon baik pemberitaan maupun opini publik yang berkembang serta mampu mewujudkan pemberitaan yang seimbang/proporsional terkait dengan penyelenggaraan transportasi di Jabodetabek sehingga mampu meningkatkan citra positif BPTJ.
- c. BPTJ telah menerima masukan dan saran dari masyarakat di wilayah Jabodetabek, melalui pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat sebanyak 14 pengaduan dan telah diproses dengan memberikan jawaban kepada pemohon informasi. Secara keseluruhan, permasalahan yang menonjol dari pengaduan yang masuk adalah mengenai Angkutan Sewa Khusus (ASK) dan rute bus Transjabodetabek serta beberapa permohonan yang tidak bersinggungan secara langsung dengan tugas dan fungsi BPTJ.
- d. BPTJ melalui Bagian Hubungan Masyarakat, meskipun dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran yang dimiliki, telah berhasil memproduksi buku dan video mengenai Sistem Transportasi Perkotaan Ibu Kota Negara (IKN) Baru, video Angkutan Umum Bertenaga Listrik di Jabodetabek, video Kiprah BPTJ dalam Upaya Mengintegrasikan Mempercepat Integrasi Transportasi di Jabodetabek dan video Pengelolaan Terminal di Jabodetabek.
- e. BPTJ juga telah berhasil melakukan publikasi dalam bentuk iklan/advertorial pada media massa cetak atau *online* di Bisnis Indonesia yang memuat informasi mengenai kebutuhan ATCS pada penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2019 dan Rakyat Merdeka yang memuat informasi mengenai upaya pengintegrasian tiket antarmoda di Jabodetabek.
- f. BPTJ sudah memulai penggunaan *website* sebagai media penyampai informasi tentang berbagai hal terkait pengelolaan transportasi di lingkup Jabodetabek yang dibutuhkan publik. Sebagian besar pengunjung yang mengakses *website* BPTJ adalah pengunjung baru (*new visitors*), bukan pengunjung yang mengakses berulang-ulang (*returning visitors*). Hal ini menunjukkan bahwa informasi mengenai BPTJ dibutuhkan oleh masyarakat seputar pelayanan transportasi di wilayah Jabodetabek.

Beberapa permasalahan yang menjadi kendala pelaksanaan kegiatan kehumasan sepanjang tahun 2019 adalah kurangnya sarana pendukung kerja, kurangnya jumlah dan kualitas SDM, keterbatasan dalam pengelolaan data dan pelayanan informasi berbasis digital, terbatasnya daya dukung sumber data dari unit kerja lainnya dan kemungkinan tumpang tindih pelaksanaan tugas serta perbedaan visi dengan unit kerja/instansi lain. Secara detail permasalahan dari setiap kegiatan diuraikan, sebagai berikut:

- a. Analisis pemberitaan dan opini publik belum terlaksana dengan optimal dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia yang bertugas mengolah hasil analisa pemberitaan dari pihak ketiga.
- b. Permasalahan menonjol mengenai kegiatan CC 151 BPTJ selama tahun 2019 baik secara teknis maupun administratif antara lain adalah mengenai

kuantitas dan kualitas petugas tier II CC 151, dimana banyak petugas CC 151 BPTJ keberatan menerima tanggung jawab penugasan CC 151 karena merasa beban kerja di unit kerja masing-masing sudah cukup padat. Selain itu, honor yang diberikan oleh BKIP kepada petugas CC 151 BPTJ belum mengacu pada SBU. Sehubungan dengan kehadiran petugas CC 151 BPTJ pada saat pelaksanaan piket, masih ditemukan anggota Tier 2 *Contact Center* BPTJ 151 yang tidak hadir dan tidak menyampaikan daftar pengganti kepada Bagian Hubungan Masyarakat sehingga sering terjadi kekosongan petugas pada jam layanan operasional. Dari sisi pengawasan, BKIP dan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustikom) sebagai koordinator pengelolaan layanan CC 151 Kementerian Perhubungan belum melakukan monitoring secara berkala, sehingga memberikan celah bagi para Tier 2 (petugas posko dari masing-masing sub sektor di lingkungan Kemenhub) untuk tidak hadir pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut.

- c. Titik berat pelaksanaan publikasi melalui non-pemberitaan yakni belum matangnya pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksanaan cenderung kurang terstruktur dan terorganisir dengan baik. Pada saat penyelenggaraan pameran contohnya BPTJ masih menghadapi kendala berupa keterbatasan SDM dan anggaran sehingga juru penerang hanya diikuti oleh beberapa staf saja.
- d. Sementara itu, dari pelaksanaan kegiatan edukasi di terminal idealnya dapat dilakukan di empat (4) terminal yang berada di bawah tanggungjawab BPTJ, tidak hanya di tempat publik yang berhubungan dengan transportasi namun juga dapat dilakukan di sekolah-sekolah dengan melibatkan peran aktif para pelajar. Rentang kegiatan pelaksanaan publikasi dapat ditambah dari pelaksanaan yang hanya 1 hari menjadi 3 hari, sehingga pelaksanaan menjadi maksimal dan meninggalkan kesan yang baik bagi para pengguna angkutan umum di terminal.
- e. Adapun permasalahan mendasar dalam penyusunan content BPTJ adalah sulitnya mengidentifikasi data dari setiap subsektor, kurangnya koordinasi antar subsektor dan komunikasi yang tidak di pelihara antara subsektor dengan para operator pengelola transportasi di wilayah Jabodetabek. Hal ini menyebabkan lamanya proses pembuatan desain karena informasi yang seringkali berubah dan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk memvalidasi data-data yang disampaikan oleh setiap subsektor.
- f. Dalam hal penyusunan advertorial minimnya anggaran merupakan permasalahan yang seringkali ditemukan sehingga informasi yang di ekspose ke masyarakat terbatas pada isu tertentu saja.
- g. Berkaitan dengan pengelolaan *website* BPTJ, minimnya SDM dan pengembangan content yang dirasa masih sangat kurang menjadi isu yang penting untuk ditingkatkan kualitasnya di tahun 2020 sehingga pembaharuan dengan konsep yang lebih terarah diharapkan mampu memenuhi layanan informasi kepada publik.

Hasil penting dari terlaksananya kegiatan kehumasan pada tahun 2019 dimanfaatkan untuk meningkatkan citra BPTJ di masyarakat dan

memperkenalkan BPTJ kepada stakeholder terkait dengan capaian sebagai berikut:

- a. BPTJ banyak terekspose pada pemberitaan media massa sepanjang tahun 2019 dan cenderung memiliki tone positif dan netral. Dampak dari kegiatan analisis pemberitaan dan opini publik adalah rekomendasi pemberitaan maupun opini publik yang dapat termitigasi dengan baik sehingga terwujud pemberitaan yang seimbang/proporsional, serta positif tentang BPTJ dan pengelolaan transportasi di Jabodetabek
- b. Pada kegiatan penyusunan media sosial, sepanjang tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah followers akun media sosial BPTJ terutama pada kanal Instagram. Hingga akhir tahun 2019, jumlah pengikut akun IG @BPTJKemenhub mencapai jumlah lebih dari 10,600 followers. Sedangkan untuk kanal Facebook dan Twitter masih diperlukan penyesuaian dan optimalisasi konten sesuai dengan ciri khas dari tiap kanal media sosial. Selain penyusunan konten media sosial yang menarik dan interaktif, pelaksanaan kegiatan-kegiatan *below the line* seperti Kampanye Jalan Hijau dan kegiatan bersama komunitas (Ngobrass: Ngobrol Bareng Komunitas) juga turut berpengaruh dalam meningkatnya keterikatan sosial media BPTJ. Sehingga hasil dari kegiatan penyusunan media sosial dapat berdampak pada eksistensi BPTJ di ranah media sosial serta menjadi kanal untuk mengetahui respon dan pendapat masyarakat (netizen) terkait kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh BPTJ.
- c. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna menjalin jejaring komunikasi baik dengan dengan *influencer*, *blogger*, dan pegiat media sosial, serta para *opinion leader* di sektor transportasi. Selain itu, tahun 2019 juga menjadi tahun perdana penyelenggaraan kegiatan Forum Kehumasan Sektor Transportasi se-Jabodetabek yang bertujuan menjalin relasi dan kolaborasi dengan stakeholder transportasi Pemerintah Daerah dan operator BUMN/BUMD. Selain menjadi acara yang akan menjadi agenda rutin setiap tahun, diharapkan kegiatan ini dapat menjadi awal mula dari kegiatan kerjasama lainnya antar stakeholder transportasi se-Jabodetabek.
- d. Melalui platform layanan CC 151, BPTJ banyak menerima masukan dan saran dari masyarakat di wilayah Jabodetabek, sehingga perbaikan terhadap layanan transportasi dapat terselenggara dengan baik.
- e. Melalui kegiatan kampanye jalan hijau dampak yang diberikan cukup baik, hal ini terbukti dari telah dimulainya kegiatan berjalan kaki yang diakomodir oleh stakeholder di sector transportasi. Selain itu, kegiatan kampanye juga berhasil menjangkit masukan dari 1068 pejalan kaki di sekitar Stasiun MRT Dukuh Atas dan Sekitar Stasiun Kereta Juanda untuk perbaikan penyelenggaraan angkutan umum massal dan berjalan kaki dengan hasil 32% diperlukan penambahan dan perbaikan fasilitas pedestrian, 31% penambahan angkutan umum, 24% trotoar dikembalikan sesuai fungsinya dan 13% layanan angkutan umum yang tepat waktu. Hal ini juga diimbangi dengan gerakan menggunakan angkutan umum di lingkungan BPTJ dari level atas hingga bawah.

- f. Pengelolaan website pada tahun 2019 telah memenuhi informasi mengenai kebijakan transportasi di wilayah perkotaan hal ini terbukti dari bertambahnya jumlah pengunjung yang mengakses website BPTJ.
- g. Selain upaya peningkatan awareness masyarakat menyangkut keberadaan BPTJ dari sisi pemberitaan, pemanfaatan dari pelaksanaan kegiatan publikasi non pemberitaan juga telah dianggap cukup signifikan. Hal ini terlihat dari tingginya antusias pengunjung pada pelaksanaan pameran *railway expo*, publik mengetahui lebih dalam mengenai progress pembangunan transportasi perkeretaapian di Jabodetabek dan peluang bagi masyarakat terutama kalangan akademisi untuk mengetahui inovasi dan teknologi terbaru yang dapat diimplementasikan dalam mengubah transportasi Indonesia ke arah yang lebih baik lagi khususnya untuk transportasi di wilayah Jabodetabek. Investor baik dalam maupun luar negeri juga ikut merasakan manfaat positif dari terselenggaranya kegiatan pameran karena banyaknya pengunjung yang menanyakan prosedur untuk berinvestasi di sektor transportasi kereta api Jabodetabek.

Hal ini juga terlihat dari tingginya antusias pengunjung terutama anak usia dini pada saat edukasi di terminal Jatijajar dan terminal Pondok Cabe. Dampak yang diberikan tentunya dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mendasar mengenai transportasi dan mendekatkan BPTJ kepada masyarakat serta memberikan kesan yang positif terhadap layanan transportasi umum khususnya di Jabodetabek. Antusiasme pengunjung pada setiap pelaksanaan kegiatan publikasi dan pemberitaan menunjukkan bahwa kegiatan publikasi di terminal cukup berperan penting untuk memberikan pemahaman kepada pengunjung terutama anak-anak dan berhasil menarik simpatik dari para penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik, hal ini terlihat dari jumlah peserta yang melebihi dari 50 orang. Di sisi lain, produksi buku dan video juga memberikan manfaat yang cukup signifikan dalam mempublikasi peran dan fungsi BPTJ sehingga berdampak pada pemahaman public yang terus meningkat.

Beberapa upaya penting yang dilakukan Bagian Hubungan Masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap keberadaan BPTJ adalah selalu hadir dalam setiap permasalahan kemacetan di Jabodetabek melalui pengelolaan isu terhadap setiap kebijakan terobosan yang dilakukan BPTJ dengan mengutamakan pendekatan diterima melalui (*unpaid*) media. Secara rinci upaya tersebut disampaikan, sebagai berikut:

- a. Kegiatan penyusunan media sosial dan jejaring komunikasi merupakan kegiatan yang membutuhkan daya kreatifitas serta penyesuaian dengan perkembangan budaya populer. Kebijakan yang dilaksanakan oleh BPTJ yang menjadi bahan konten media sosial diolah sedemikian rupa sesuai ciri khas tiap kanal media sosial agar dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat. Begitu juga dengan kegiatan jejaring komunikasi. Selain membutuhkan substansi isu dengan materi terpaan yang kuat, ide-ide kreatif dan pengetahuan terkait budaya populer disusun agar dapat terlaksana sesuai target yang ingin dicapai.

- b. Kekurangan SDM merupakan salah satu tantangan pada Bagian Hubungan Masyarakat, terutama terkait kegiatan analisis pemberitaan dan opini publik. Meskipun kegiatan analisis pemberitaan dan opini publik telah diserahkan kepada pihak ketiga, namun hasilnya hanya berupa data dan informasi serta laporan rutin per bulan. Diperlukan staff khusus yang bertugas dan bertanggung-jawab untuk mengolah kembali data dan informasi tersebut secara optimal agar pemberitaan dan opini publik dapat termitigasi dengan baik sehingga terwujud pemberitaan yang seimbang/proporsional, serta positif tentang BPTJ dan pengelolaan transportasi di Jabodetabek.
- c. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan CC 151 BPTJ didukung oleh penyediaan honor yang disediakan oleh BKIP, staf Bagian Hubungan Masyarakat cukup bertanggungjawab terhadap jadwal piket CC 151 sehingga dapat menggantikan setiap petugas yang berhalangan hadir. Hal ini mendukung pelaksanaan CC 151 BPTJ tahun 2019 sehingga tidak ada kekosongan petugas dalam memberikan layanan informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai solusi dan upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Bagian Hubungan Masyarakat BPTJ, yaitu:
- 1) Pada tahun 2019, Bagian Hubungan Masyarakat telah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan honorarium bagi petugas CC 151 BPTJ Tahun 2020 yang telah disesuaikan dengan SBU.
 - 2) Melakukan pembaharuan materi untuk mendukung kerja para petugas CC 151 yang selanjutnya akan dilakukan rapat pembahasan awal guna mendapat masukan dari Direktorat Teknis dan Bagian di lingkungan Sekretariat BPTJ.
- d. Diperlukan dukungan penuh dari seluruh unsur mengenai pelaksanaan kegiatan publikasi melalui non-pemberitaan, tidak hanya berupa anggaran yang memadai mengingat publikasi yang dilakukan melalui pemberitaan berbayar membutuhkan biaya yang tidak sedikit namun juga diperlukan SDM yang cukup untuk melakukan kegiatan dengan skala besar. Kevalidan data juga menjadi concern dalam penyusunan setiap materi publikasi non-pemberitaan. Direktorat Teknis terkait sudah harus mampu menyediakan data yang terintegrasi, update, dan tidak tumpang tindih antara satu data dengan data lain sehingga memudahkan bagi siapapun yang akan mengaksesnya.
- e. Dalam hal pengelolaan website di tahun 2020, pemenuhan layanan informasi terhadap konsep tampilan website lebih *clean*, tidak bercampur antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya dengan penyajian informasi yang rutin dan berkesinambungan sesuai kebutuhan. Dalam pelaksanaan pekerjaan Tim Website akan diatur dalam sebuah mekanisme selayaknya redaksional media serta diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu diperlukan Tenaga Ahli yang akan mendukung kualitas penulisan dan pengemasan desain/*layout* konten.
- f. Sebagai *concern* terhadap penyempurnaan kegiatan penyusunan dokumentasi, diperlukan pusat data terpadu yang dapat dijadikan acuan dalam mengutip data pada setiap direktorat teknis di lingkungan BPTJ.

Selain itu, rencana program kerja penyusunan buku dan video perlu disusun secara sistematis, terprogram dan diupdate secara berkala dengan subsektor terkait.

9. Penyusunan Buku dan Video BPTJ

Pada tahun 2019, Bagian Hubungan Masyarakat BPTJ telah memproduksi video mengenai Sistem Transportasi Perkotaan di Wilayah Teraglomerasi yang memberikan masukan terhadap pengelolaan transportasi perkotaan di wilayah Ibukota Negara Baru. Selain itu, Bagian Hubungan Masyarakat juga telah memproduksi Buku sekaligus video BPTJ Mendobrak Tabu yang berisi perjalanan BPTJ dalam mempercepat Integrasi Transportasi Jabodetabek. Dalam Buku dan video tersebut, dijelaskan mengenai kehadiran BPTJ dan strategi-strategi dalam mengurai kemacetan melalui penerapan sistem Ganjil Genap sebagai langkah awal diikuti dengan kisah sukses ASIAN Games 2018. Buku dan video tersebut juga menjelaskan mengenai paradigma baru yang terjadi dalam pengelolaan transportasi perkotaan khususnya di Jabodetabek yang dapat dijadikan sebagai percontohan bagi wilayah teraglomerasi lainnya di Indonesia. Tidak hanya itu, video lain mengenai upaya BPTJ dalam mengurangi polusi udara dilakukan melalui penyusunan video Angkutan Listrik di Wilayah Jabodetabek. Secara garis besar, video tersebut hadir sebagai upaya mempublikasikan program kerja BPTJ bersama mitra kerja dalam menyiapkan sarana dan prasarana pengembangan angkutan listrik.



Gambar 51. Produksi Video (a) Sistem Transportasi Perkotaan di Wilayah Teraglomerasi; (b) Buku dan Video BPTJ Mendobrak Tabu; dan (c) Video Angkutan Umum Listrik di Wilayah Jabodetabek

BAB III DIREKTORAT TÉKNIS

A. Direktorat Prasarana

1. Lanjutan Pembangunan Terminal Tipe A Jatijajar

Pada tahun 2019 dilaksanakan pekerjaan lanjutan pembangunan Terminal Jatijajar di Kota Depok yang meliputi 5 item pekerjaan, sebagai berikut:

- a. Hall Keberangkatan;
- b. Selasar;
- c. Masjid;
- d. Hall Kedatangan; dan
- e. IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah).



Gambar 52. Progres Pembangunan Terminal Tipe A Jatijajar

2. Supervisi Lanjutan Pembangunan Terminal Tipe A Jatijajar

Untuk mendukung penyelesaian pekerjaan tersebut, Satuan Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Kementerian Perhubungan memerlukan layanan jasa konsultasi untuk supervisi lanjutan pembangunan Terminal Tipe A Jatijajar Kota Depok yang dibiayai dari sumber dana ABPN Tahun Anggaran 2019.

Maksud dari kegiatan supervisi lanjutan pembangunan Terminal Tipe A Jatijajar Kota Depok adalah melakukan pengawasan pembangunan Terminal Tipe A Jatijajar Kota Depok. Sementara itu, tujuan dari kegiatan tersebut antara lain:

- a. mengawasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan Terminal tipe A Jatijajar; dan
- b. meningkatnya pelayanan Terminal Tipe A Jatijajar.



Gambar 53. Kegiatan Supervisi Lanjutan Pembangunan Terminal Tipe A Jatijajar untuk Hall Keberangkatan dan Kedatangan Serta IPAL

3. Pengadaan Alat dan Fasilitas Penunjang Terminal Tipe A di Jabodetabek

Pengadaan alat dan fasilitas penunjang di Terminal Tipe A Jatijajar Tahun 2019, dilakukan guna mendukung fungsi pelayanan pada terminal. Pengadaan tersebut berupa pengadaan televisi, HT, lampu sorot LED, dry fan, AC *standing floor*, APAR, kursi roda, jet pump, trolley janitor, trolley barang, *finger door lock closer*, jam dinding, tangga dorong, tiang bendera, meubelair pos pelayanan, kursi ruang tunggu, meja dan kursi informasi, *filing cabinet*, *locker*, tong sampah, velbed TNI, serta *kitchen set*.





Gambar 54. Pengadaan Alat dan Fasilitas Penunjang di Terminal Tipe A Jatijajar Tahun 2019

4. Reviu DED Lanjutan Pembangunan Terminal Jatijajar untuk Pembangunan *Transit Oriented Development* (TOD)

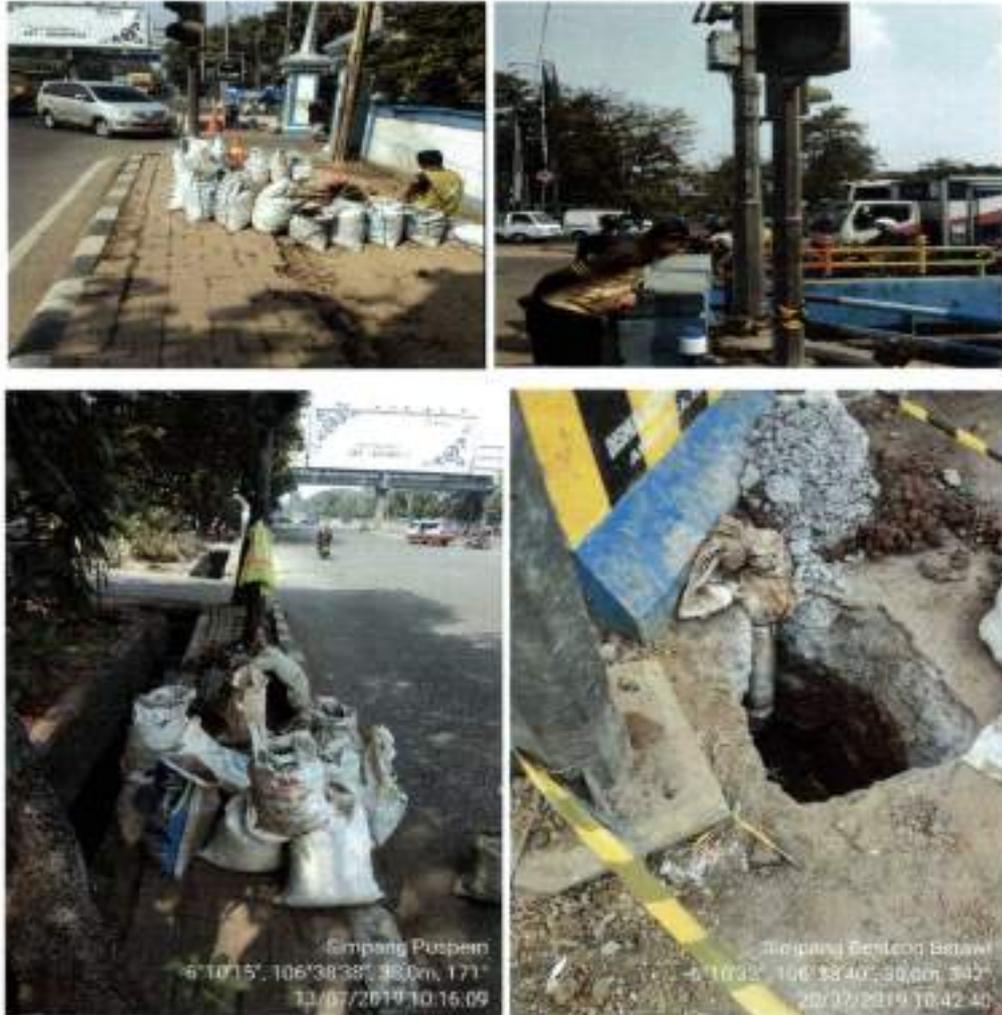
Maksud dari kegiatan reviu DED Terminal Jatijajar adalah melakukan penelaahan DED Terminal Jatijajar yang sudah ada dan mengusulkan perubahan-perubahan sesuai kondisi dan perkembangan konsep pembangunan terminal terbaru.



Gambar 55. Rapat Pembahasan Reviu DED Lanjutan Pembangunan Terminal Jatijajar untuk Pembangunan TOD di Ruang Rapat BPTJ

5. **Pembangunan Area Traffic Control System (ATCS) Koridor DKI Jakarta - Tangerang**

Pada pekerjaan pembangunan ATCS koridor DKI Jakarta - Tangerang secara umum merupakan pekerjaan lanjutan pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan yang dikerjakan oleh kontraktor selama pelaksanaan berlangsung.



Gambar 56. Pembangunan ATCS Koridor DKI – Tangerang

6. **Supervisi Pembangunan Area Traffic Control System (ATCS) Koridor DKI Jakarta - Tangerang**

Pada pekerjaan Supervisi Pembangunan ATCS Koridor DKI - Tangerang, setiap prosesnya akan memerlukan tindakan pengawasan sehingga prosesnya dapat berlangsung dengan arah yang benar dan mengurangi adanya deviasi akibat penyimpangan pekerjaan yang mungkin terjadi. Pada pekerjaan Supervisi Pembangunan ATCS Koridor DKI - Tangerang, secara umum pekerjaan pengawasan pelaksanaan fisik di lapangan ditugaskan kepada Pihak Kedua sebagai Konsultan Pengawas. Konsultan Pengawas akan melakukan

pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Pemborong, yang menyangkut aspek mutu, waktu dan biaya. Disamping juga bertanggung jawab atas semua kegiatan teknik yang dikerjakan oleh Kontraktor selama pelaksanaan berlangsung.



Gambar 57. Pelaksana Kegiatan Supervisi Pembangunan ATCS Koridor DKI Tangerang

7. Perencanaan Teknis Penanganan *Missing Link* di Wilayah Jabodetabek

Kegiatan perencanaan teknis penanganan *missing link* di wilayah Jabodetabek bermaksud untuk menunjang pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi teknis dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan program/perencanaan teknis dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. Hal tersebut meliputi pula koordinasi teknis terhadap kendala dan permasalahan untuk penyelarasan tata ruang baik secara nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.



Gambar 58. Rapat Studi Perencanaan Teknis Penanganan *Missing Link* di Wilayah Jabodetabek

8. Studi Pendahuluan Pembangunan Terminal Jatiasih Bekasi

Kegiatan Studi Pendahuluan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A di Wilayah Kabupaten Bekasi adalah melakukan kegiatan perencanaan Terminal Tipe A di Kabupaten Bekasi dalam bentuk feasibility study (FS) untuk lokasi terminal tipe A yang sesuai dengan bangkitan dan tarikan pergerakan perjalanan orang yang menggunakan angkutan umum serta Basic Design dari usulan

Terminal Penumpang Tipe A di Wilayah Kabupaten Bekasi dalam rangka Peningkatan Pelayanan transportasi jalan sesuai kondisi dan perkembangan ekonomi di Wilayah Kabupaten Bekasi.



Gambar 59. Rapat Studi Pendahuluan Pembangunan Terminal Jatiasih

9. *Feasibility Study (FS) dan Basic Design* Gardu Traksi Sisipan di Wilayah Jabodetabek

Saat ini, sistem gardu traksi menggunakan teknologi peyearah siliconrectifier. Namun saat ini, gardu traksi yang ada belim dapat melayani secara maksimal kebutuhan operasional Kereta Api Commuter Line di wilayah Jabodetabek. Oleh sebab itu perlu adanya penambahan Gardu Traksi demi kelancaran perjalanan KA Commuter Line di wilayah Jabodetabek melalui kegiatan FS dan Basic Design gardu traksi sisipan di wilayah Jabodetabek.



Gambar 60. Rapat FS dan *Basic Design* Gardu Traksi Sisipan di Wilayah Jabodetabek

10. Feasibility Study (FS) dan Basic Design Perlintasan Tidak Sebidang pada Lintas Tanah Abang

Untuk pembuatan permodelan persinyalan modern yang sesuai dengan *Communication Based Train Control (CBTC)* atau *moving block*, maka salah satu syarat yaitu tidak ada lagi perlintasan sebidang. Adapun syarat adanya perlintasan sebidang itu yaitu dibuat *flyover*, *underpass* atau ditutup perlintasannya. Dari hasil studi diperoleh data kondisi setiap perlintasan yang nantinya dapat ditentukan titik mana saja yang menjadi prioritas.



Gambar 61. Rapat FS dan Basic Design Perlintasan Tidak Sebidang Pada Lintas Tanah Abang - Merak

11. Pengadaan Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian Tahap I

Dalam rangka menjamin keselamatan, kenyamanan, keamanan, kelancaran dan ketertiban operasional kereta api, maka penyediaan dan pembangunan prasarana perkeretaapian harus didasarkan pada persyaratan yang telah ditentukan dan dilakukan pengujian serta secara berkala dilakukan pemeriksaan dan perawatan oleh tenaga yang telah memiliki kualifikasi keahlian sesuai dengan bidangnya. Guna menunjang hal tersebut, maka diperlukan monitoring dan evaluasi kelaikan prasarana perkeretaapian yang didukung dengan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian demi tercapainya penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang aman, nyaman dan selamat. Pengadaan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian berupa peralatan pengujian jalur kereta api, sebagai berikut:

- a. *Track Gauge Meter*;
- b. *Rail Wear Gauge*;
- c. *Hummer Test*;
- d. Meteran 50 meter;
- e. Alat ukur ketebalan;
- f. Alat pelindung diri;
- g. Drone;

- h. Laptop *high grade*; dan
- i. Kamera.



Gambar 62. Pengadaan Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian

12. ***Feasibility Study (FS)*** dan ***Basic Design*** Peningkatan Persinyalan pada Lintas Tanah Abang - Rangkas Bitung

Salah satu rencana pengembangan perkeretaapian di wilayah Jabodetabek adalah rehabilitasi/peningkatan persinyalan dan telekomunikasi lintas Tanah Abang - Maja/Rangkasbitung. Untuk mendukung rehabilitasi/peningkatan persinyalan dan telekomunikasi lintas Tanah Abang - Maja/Rangkasbitung diperlukan dokumen perencanaan sebagai tahap awal pelaksanaan melalui kegiatan FS dan *Basic Design* Peningkatan Persinyalan pada lintas Tanah Abang - Rangkasbitung.

Feasibility Study pada Lintas Tanah Abang - Rangka Bitung yaitu peningkatan persinyalan, pembobotan, analisis perhitungan lainnya seperti jangka waktu

dalam proses pengereman. Untuk *Communication Based Train Control* (CBTC) dari arah Tanah Abang-Merak bukan hanya kereta batu bara, barang, dan penumpang. Untuk emplasemen, baik sarana, prasarana, gapeka lebih memperhatikan aspek keselamatan.



Gambar 63. Pelaksanaan Rapat FS dan *Basic Design* Peningkatan Persinyalan pada Lintas Tanah Abang - Rangka Bitung

13. Studi Pendahuluan Pembangunan *Mass Rapid Transit* (MRT) Jalur Ujung Menteng - Cikarang

Salah satu rencana pengembangan perkeretaapian di wilayah Jabodetabek adalah lanjutan pembangunan MRT jalur Ujung Menteng - Cikarang. Untuk mendukung pembangunan jalur MRT tersebut maka dibuatlah dokumen perencanaan sebagai tahap awal pelaksanaan melalui kegiatan penyusunan studi pendahuluan pembangunan jalur MRT lintas Ujung Menteng - Cikarang.



Gambar 64. Rapat Studi Pendahuluan Pembangunan MRT Jalur Ujung Menteng - Cikarang

Dari hasil studi pendahuluan menyepakati bahwa rencana pembangunan MRT jalur Ujung Menteng - Cikarang akan dimasukkan ke dalam RTRW pemerintah kota dan pemerintah daerah untuk disinkronkan dan dikoordinasikan.

14. *Review Detailed Engineering Design (DED) Pembangunan Underpass Bojonggede*

Kegiatan *Review DED* Pembangunan *Underpass* Bojonggede dilaksanakan berupa pekerjaan pembangunan *underpass* di bawah jalur kereta api. Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kinerja prasarana kereta api, khususnya jalur KA di wilayah Jabodetabek.



Gambar 65. Pelaksanaan Rapat *Review DED* Pembangunan *Underpass* Bojonggede

15. *Penyusunan Pedoman Penilaian Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Fasilitas Integrasi pada Simpul Transportasi dan Transit Oriented Development (TOD) di Jabodetabek*

Pendapat konsumen dan nilai kepuasan konsumen merupakan salah satu indikator dalam pedoman penilaian pemenuhan SPM fasilitas integrasi. Tujuan penilaian SPM adalah peningkatan pelayanan oleh para pengelola fasilitas integrasi, sehingga perlu mencantumkan ketentuan mengenai sanksi yang terjadi jika fasilitas integrasi yang ada tidak terpenuhi.



Gambar 66. Rapat Penyusunan Pedoman Penilaian Pemenuhan SPM Fasilitas Integrasi pada Simpul Transportasi di Jabodetabek

16. *Monitoring* dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terminal Penumpang Angkutan Jalan di Jabodetabek

Monitoring dan evaluasi kondisi prasarana terminal tipe A di Jabodetabek sebagai pengawasan dan evaluasi teknis terminal penumpang angkutan jalan di Jabodetabek sehingga terselenggara fungsi BPTJ dalam pengawasan penyelenggaraan prasarana transportasi jalan di Jabodetabek.



Gambar 67. Fasilitas di Terminal Kampung Rambutan



Gambar 68. Fasilitas di Terminal Kalideres



Gambar 69. Fasilitas di Terminal Jatijajar

17. Bimbingan Teknis Terminal Tipe A di Jabodetabek

Dengan dilaksanakannya kegiatan Bimbingan Teknis Simulasi Pelaksanaan Sewa di Lingkungan BPTJ, diharapkan dapat memahami esensi mengenai simulasi pelaksanaan sewa untuk di lingkungan BPTJ dari pemaparan yang akan diberikan oleh para narasumber serta memberikan masukan mengenai tantangan dan hambatan yang sekiranya ditemui dalam pelaksanaan dan membahas program-program pengembangannya untuk kepentingan BPTJ.

Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Balairung, Matraman, Jakarta Pusat. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk diskusi, dimana para narasumber memaparkan materi yang disampaikan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara peserta dan para narasumber.



Gambar 70. Bimbingan Teknis Simulasi Pelaksanaan Sewa

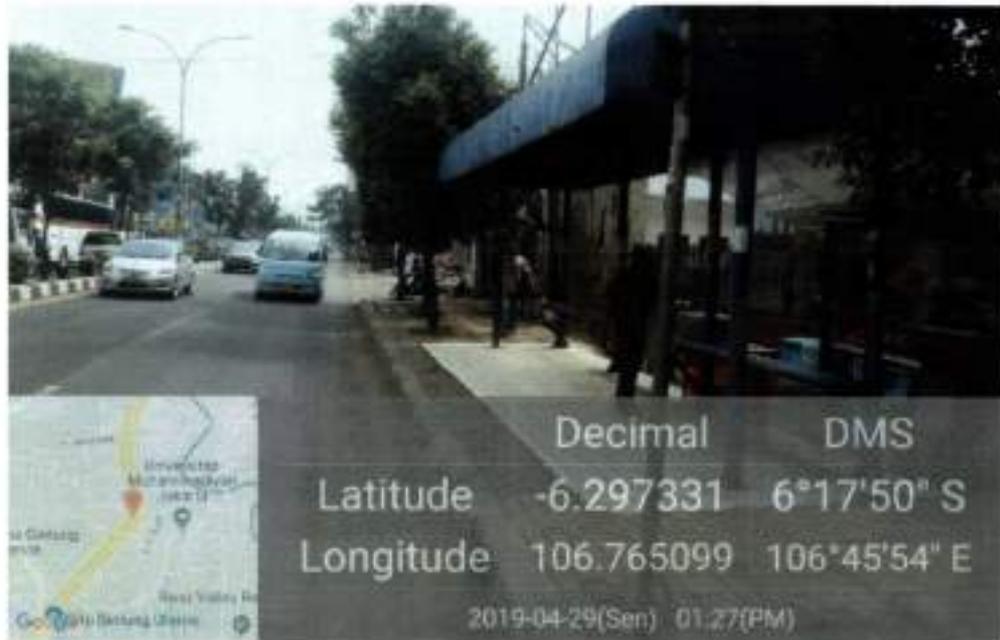


Gambar 71. Sambutan Direktur Prasarana dalam Bimbingan Teknis Simulasi Pelaksanaan Sewa

18. *Monitoring* dan Evaluasi Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Jalan Nasional di Jabodetabek

Monitoring terhadap fasilitas pendukung di wilayah Jabodetabek sebagai pengawasan dan evaluasi teknis terhadap penyelenggaraan prasarana transportasi jalan. Tujuan dari kegiatan tersebut, antara lain:

- a. diperolehnya informasi tentang fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan di jabodetabek;
- b. memberikan hasil kajian tentang permasalahan lalu lintas di wilayah jabodetabek;
- c. memberikan saran dan rekomendasi terhadap pemerintah (pusat dan daerah) terkait permasalahan lalu lintas; dan
- d. melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelola fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan di Jabodetabek.



Gambar 72. Pelaksanaan Survey Fasilitas Pendukung

19. Survei *Monitoring* dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Stasiun Kereta Api di Jabodetabek

Berikut aspek-aspek dalam monitoring dan evaluasi dari implementasi SPM stasiun penumpang di Jabodetabek:

a. Keselamatan

No.	Item Monitoring	Standar	Hasil	Keterangan
1	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Ada	Ada	6 unit
2	Petunjuk jalur dan prosedur evakuasi	Ada	Ada	
3	Titik kumpul evakuasi	Ada	Ada	
4	Nomor-nomor telepon darurat	Ada	Ada	
5	Perlengkapan P3K	Ada	Ada	Poskes gabung di Cibitung
6	Kursi roda	Ada	Ada	2 unit (1 rusak)
7	Tandu	Ada	Ada	1 unit
8	Lampu penerangan	200-250 lux	-	

b. Keamanan

No.	Item Monitoring	Standar	Hasil	Keterangan
1	CCTV	Ada	Ada	7 unit
2	Security	Ada	Ada	23 personil dibagi 3 shift
3	Stiker nomor telepon/ SMS pengaduan tentang gangguan keamanan	Ada	Ada	

c. Kehandalan

No.	Item Monitoring	Standar	Hasil	Keterangan
1	Penjualan tiket	maksimal 180 detik per orang	OK	11.44 detik per orang
2	Tersedianya papan informasi tentang ketersediaan tempat duduk penumpang	Ada	Tidak ada	Karena tidak melayani kereta jarak jauh

d. Kenyamanan

No.	Item Monitoring	Standar	Hasil	Keterangan
1	Ruang tunggu penumpang (0,6 m ² per penumpang) dan dilengkapi tempat duduk	0,6 m ² per penumpang	-	
2	Kebersihan ruang tunggu	Bersih	Bersih	
3	Tempat <i>boarding</i>	Ada	Ada	
4	Toilet	Ada	Ada	
5	Mushola	Ada	Ada	
6	Pengatur sirkulasi udara (AC di ruang tunggu)	-	-	Tidak tersedia ruang tunggu berpendingin

e. Kemudahan

No.	Item Monitoring	Standar	Hasil	Keterangan
1	Layout/denah stasiun	Ada	Tidak Ada	
2	Tarif KA	Ada	Ada	
3	Peta jaringan KA	Ada	Ada	

No.	Item Monitoring	Standar	Hasil	Keterangan
4	Tersedianya papan informasi tentang ketersediaan tempat duduk penumpang	Ada	Tidak ada	Karena tidak melayani kereta jarak jauh
5	Ketersediaan informasi gangguan kereta	Ada	Ada	Melalui <i>announcer</i>
6	Lokasi dan petunjuk arah angkutan lanjutan	Ada	Tidak ada	
7	Informasi perjalanan KA dan layanan menerima pengaduan	Ada	Ada	
8	Alat bantu naik turun penumpang	Ada	Ada	
9	Tempat parkir	Ada	Ada	
10	Sirkulasi kendaraan keluar masuk	Lancar	Lancar	
11	Suara informasi dari PPKA	minimal lebih 20 dBA dari kebisingan yang ada	-	

f. Kesetaraan

No.	Item Monitoring	Standar	Hasil	Keterangan
1	Fasilitas untuk penyandang disabilitas	Ada	Ada	Garis kuning
2	Terdapat ramp dengan kemiringan maks 10 0	Ada	Tidak ada	
3	Akses jalan penyambung antar peron	Ada	Ada	
4	Ruang ibu menyusui	Ada	Tidak ada	

g. Integrasi dengan Angkutan Umum

No.	Item Monitoring		Standar	Hasil	Kondisi	Selamat	Aman	Handal	Mudah	Setara
1	Park and Ride	Rambu2	Ada	-	-	-	-	-	-	-
		Lahan parkir motor	Ada	√	√	√	√	√	√	√

No.	Item Monitoring	Standar	Hasil	Kondisi	Selamat	Aman	Handal	Mudah	Setara
	Lahan parkir mobil	Ada	√	√	√	√	√	√	√
	Pedestrian	Ada	√	√	√	√	√	√	√
2	Kiss and Ride	Rambu2	Ada	-	-	-	-	-	-
	Lahan Drop Zone/Pick up zone motor (Layby)	Ada	√	√	√	√	√	√	√
	Lahan Drop Zone/Pick up zone mobil (Layby)	Ada	√	√	√	√	√	√	√
	Pedestrian	Ada	√	√	√	√	√	√	√
3	Angkutan Umum	Lahan parkir Angkutan umum (motor, mobil)	Ada	√	√	√	√	√	√
	Lahan Drop Zone/Pick up zone motor (Layby)	Ada	√	√	√	√	√	√	√
	Lahan Drop Zone/Pick up zone mobil (Layby)	Ada	√	√	√	√	√	√	√
	Transjakarta	Ada	-	-	-	-	-	-	-
	JPO	Ada	-	-	-	-	-	-	-
	Zebra cross	Ada	-	-	-	-	-	-	-
	Pedestrian	Ada	-	-	-	-	-	-	-
	Penutup atas	Ada	-	-	-	-	-	-	-
4	Akses jalan penyambung antar peron	Ada	√	√	√	√	√	√	√
5	Peron	Pengaturan turun naik penumpang	Ada	√	√	√	√	√	√
	Peron (tempat naik penumpang)	Ada	√	√	√	√	√	√	√

20. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Integrasi Moda dan Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit/*Transit Oriented Development* (TOD)

Kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Berorientasi Angkutan Umum Massal di Jabodetabek yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 September 2019 tersebut diperoleh kesimpulan, sebagai berikut:

- a. Dalam Penanganan transportasi di Jabodetabek, BPTJ tidak dapat berdiri sendiri dan perlu dukungan dari stakeholders lain.

- b. Pengembangan Kawasan Berorientasi Angkutan Umum Massal (TOD) merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di Jabodetabek.
- c. Pemerintah Daerah masih menemui berbagai hambatan dalam mengimplementasikan Pengembangan Kawasan Berorientasi Angkutan Umum Massal (TOD).
- d. RITJ merupakan pijakan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk merencanakan suatu program atau pelaksanaan kegiatan dan menjadi dasar dalam penentuan target, dan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan dalam rangka percepatan pelaksanaan TOD.
- e. Perlu pendampingan dari BPTJ berupa pedoman teknis perencanaan dan pelaksanaan TOD yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan dokumen agar sesuai dengan apa yang tercantum di dalam RITJ.
- f. Terdapat dua permasalahan mendasar mengapa pelaksanaan pengembangan kawasan TOD menemui hambatan. Pertama adalah perlu dipastikan otoritas kelembagaan yang diberikan mandat untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kawasan TOD, dan yang kedua adalah terkait value dari Kawasan TOD itu sendiri.
- g. Perlu dibuatkan Grand Design Pengembangan Kawasan Berorientasi Angkutan Umum Massal (TOD) secara 3 dimensi dalam bentuk RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) untuk memudahkan perhitungan Land Value Capture dan proyeksi keuntungan finansial.
- h. Melalui kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Berorientasi Angkutan Umum Massal di Jabodetabek diharapkan dapat diperoleh gambaran terkait implementasi seluruh konsep yang tercantum di RITJ serta mendukung percepatan pengembangan kawasan TOD sehingga dapat segera menyelesaikan permasalahan transportasi di Jabodetabek.



Gambar 73. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Integrasi Moda dan Pengembangan Kawasan Bertransit Angkutan Umum

21. Pendampingan *Public Private Partnership* (PPP)/Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Maksud dari kegiatan pendampingan PPP/KPBU adalah untuk mengawal progres proyek kerjasama Pemerintah, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh BPTJ, dengan Badan Usaha. Berikut merupakan hasil dari progress perkembangan pembangunan terminal tipe A di Jabodetabek yang dikerjasamakan:

Tabel 4. Perkembangan Pelaksanaan KPBU Terminal Tipe A

Nama Pembangunan	Deskripsi	Issue Permasalahan	Progress		Hasil	Tindak Lanjut
Terminal Jatijajar	Terminal Jatijajar merupakan terminal tipe A yang dikelola oleh BPTJ di Kota Depok. Terminal Jatijajar saat ini sedang dalam proses pembangunan lanjutan terminal (pembongkaran atap, pembangunan arsitektur &	Akses jalan menuju Pintu Tol Cimanggis untuk mengurangi kepadatan di Jalan Raya Bogor.	Rapat	30 September 2019	Dirapatkan dengan Biro Perencanaan PUPR dengan diinisiasi Biro Perencanaan Kemenhub mengenai usulan pembangunan akses jalan.	- Bersurat kepada Kementerian PUPR untuk dapat melakukan pembebasan lahan jalan akses Tol sepanjang 4,5 km. - Rapat dengan BPJT untuk menawarkan Jalan tol akses Terminal.
		- Adanya penduduk yang membuat bangunan semi	Survey	14 Oktober 2019	Tinjauan lapangan bangunan disekitar Terminal Jatijajar.	- Subbag BMN untuk segera menyelesaikan Sertifikat Terminal

Nama Pembangunan	Deskripsi	Issue Permasalahan	Progress		Hasil	Tindak Lanjut
	<p>pembangunan masjid).</p> <p>Pada Tahun 2019 juga dilakukan studi Review DED dengan konsep TOD.</p>	<p>permanen pada lahan akses.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya sertifikat tanah Terminal Jatijajar termasuk sebagian lahan yang sudah dibebaskan untuk jalan akses. 				<p>Jatijajar sekalian balik nama.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bersurat kepada Pemda Kota Depok untuk klarifikasi IMB ruko dan warung di depan akses jalan Terminal Jatijajar. - Menerbitkan surat pemberitahuan larangan pemakaian tanah tanpa izin di Terminal Jatijajar. - Koordinasi dengan DPPKAD Kota Depok. - Usulan pemagararan lahan yang telah dibebaskan. - Menyurati Koordinator Terminal agar menindaklanjuti terkait tinjauan lapangan. - Koordinator Terminal agar segera menindaklanjuti pembongkaran 1 warung dan memindahkan 2 warung (menyurati Pemda Depok terkait izin mendirikan bangunan di sekitar terminal)
Terminal Baranangsiang	<p>Terminal Tipe A Baranangsiang merupakan terminal tipe A yang dikelola oleh BPTJ di Kota Bogor. saat ini Terminal Baranangsiang sedang dalam</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi pengendapan bus saat proses pembangunan belum tersedia. - PT, PP melakukan perhitungan dengan luas terminal hanya 13.000 m² apabila mencapai 18.200 m² maka akan 	Rapat	10 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Luas lokasi pengendapan bus menyesuaikan dengan luas desain terminal sementara. - Desain terminal & desain terminal sementara selama proses pembangunan belum 	<ul style="list-style-type: none"> - PT, PGI segera menyerahkan Desain terminal & desain terminal sementara selama proses pembangunan. - PT, PGI agar segera menghubungi

Nama Pembangunan	Deskripsi	Issue Permasalahan	Progress		Hasil	Tindak Lanjut
	<p>proses Bangun Guna Serah dengan PT. PGI.</p>	<p>menambah biaya konstruksi</p>			<p>diserahkan oleh PT. PGI.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. PP untuk menyampaikan terkait studi kelayakan proyek PT. PGI berlanjut atau tidak paling lambat 10 hari. 	<p>pemilik lahan untuk segera menyediakan lokasi pengendapan bus.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. PP memaparkan hasil studi kelayakan proyek PT. PGI.
		<ul style="list-style-type: none"> - PT. PGI sampai saat ini belum bisa menyelesaikan desain Terminal dikarenakan belum adanya kesepakatan di internal pemegang saham terkait luasan terminal sebesar 18.200 m². - PT PGI masih memperlakukan pemulihan jangka waktu perjanjian BGS. - Keberatan BPTJ terhadap keluarnya <i>Legal Opinion</i> dari Kejaksaan Agung. 	Rapat	22 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Akan dilakukan rapat antara BPTJ dengan seluruh pemegang saham konsorsium PGI untuk menandatangani kesepakatan. - PT. PGI setuju dengan penyerahan secara parsial dalam 2 Tahap, diawali tahap pembangunan Terminal terlebih dahulu. - PT. PGI akan bertemu dengan perwakilan Kejaksaan Agung untuk membahas revisi point 4 & 5 dalam LO No. B-505/G/Gtn.2/10/2019. 	<ul style="list-style-type: none"> - BPTJ bersurat ke PT. PGI untuk mengkonfirmasi penyelesaian desain terminal. - Legal Opinion dari Kejaksaan Agung belum dapat diberlakukan dan masih perlu diklarifikasi oleh BPK, BPKP, Biro Keuangan dan Itjen Kemenhub. - Perlu dilakukan rapat pembahasan dengan pihak PT PGI dan bersurat kepada Kemenko Maritim untuk menindaklanjuti LO tersebut.
		Kendala akses menuju lokasi terminal (akses jalan <i>underpass</i>)	Rapat	30 September 2019	Dirapatkan dengan Biro Perencanaan PUPR dengan diinisiasi Biro Perencanaan Kemenhub mengenai usulan pembangunan akses jalan.	Bersurat kepada Kementerian PUPR untuk dapat melakukan pembangunan <i>underpass</i> dari Terminal. Baranangsiang menuju jalan tol.
Terminal Poris Plawad	Terminal Poris Plawad merupakan terminal tipe A yang dikelola oleh BPTJ di Kota Tangerang Terminal Poris Plawad direncanakan untuk dibangun	Proses sudah berjalan tetapi terhambat dengan permasalahan ijin rekomendasi KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan)				<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada tindak lanjut sampai dengan saat ini, karena permasalahan ketinggian bangunan yang belum sesuai. - Membuat konsep surat undangan rapat koordinasi dengan calon

Nama Pembangunan	Deskripsi	Issue Permasalahan	Progress		Hasil	Tindak Lanjut
	melalui skema KPBU.					pengembang dan instansi terkait/ Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
Terminal Tipe A Pondok Cabe	Terminal Pondok Cabe merupakan terminal tipe A yang dikelola oleh BPTJ di Kota Tangerang Selatan, pada Tahun 2020 telah dianggarkan APBN untuk pembangunan Terminal Pondok Cabe.	Angkutan kota belum masuk terminal.	Rapat	8 April 2019	Sesuai kesepakatan, Metrotrans hanya dapat mengangkut penumpang di Terminal Pondok Cabe saja, tidak boleh mengangkut penumpang di sepanjang rute angkot.	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu dilakukan koordinasi dengan Dishub Provinsi Jawa Barat dan Dishub Tangerang Selatan untuk perubahan trayek Angkot dan Direktorat Angkutan Ditjendat untuk trayek AKAP. - Menyurati Direktur Angkutan, BPTJ agar segera melakukan rapat koordinasi penertiban terminal liar di sekitar Lebak Bulus, Pondok Cabe, dll. - Membuat Nota Dinas kepada Direktur Angkutan agar segera mengadakan rapat tindak lanjut dengan UPT Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
		Jalan akses menuju terminal kurang strategis.	Rapat	30 September 2019	Dirapatkan dengan Biro Perencanaan PUPR dengan dinisiasi Biro Perencanaan Kemenhub mengenai usulan pembangunan akses jalan.	Bersurat kepada Kementerian PUPR untuk dapat melakukan pembangunan Akses terminal langsung menuju Tol.



Gambar 74. KPBU dalam Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe A Jabodetabek

22. Bimbingan Teknis Integrasi Prasarana Transportasi Jalan dan Perkeretaapian

Berdasarkan kegiatan Bimbingan Teknis Integrasi Prasarana Jalan dan Kereta Api yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Januari – 1 Februari 2019.



Gambar 75. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Integrasi Prasarana Transportasi Jalan dan Perkeretaapian

23. Penataan Integrasi Simpul Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) di Jabodetabek

Penataan kawasan fasilitas integrasi dengan melibatkan infrastruktur yang menghubungkan simpul-simpul antar moda merupakan hal yang sangat dibutuhkan saat ini seperti terhubungannya stasiun kereta api dengan halte Bus Rapid Transit (BRT)/Transjakarta sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi

pengguna jasa transportasi untuk berpindah moda dan menjadikan perjalanan lebih efektif dan efisien.



Gambar 76. Survey Kondisi Eksisting Integrasi di Titik Simpul SAUM Jabodetabek

B. Direktorat Lalu Lintas

1. Pembangunan Sistem Perizinan Online Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)

Untuk mendukung transparansi dan elektronifikasi perizinan Andalalin di BPTJ maka dilakukan kegiatan Pembangunan Sistem Perizinan Online Andalalin BPTJ dengan tujuan:

- a. tercipta transparansi dalam proses penilaian Dokumen Hasil Andalalin;
- b. terciptanya elektronifikasi (*paperless*) dalam proses penilaian Dokumen Hasil Andalalin; dan
- c. mempermudah konsultan dan pengembang dalam pengurusan Rekomendasi Andalalin.



Gambar 77. Sistem Perizinan Online Andalalin BPTJ

2. Studi Trase *Light Rail Transit* (LRT) Cibubur - Baranangsiang Kota Bogor

Kegiatan Studi Trase LRT Cibubur - Baranangsiang ini adalah untuk mendapatkan pedoman, penilaian kajian kelayakan dan rancangan dasar jalur LRT Cibubur - Baranangsiang dari segi aspek teknis dalam rangka persiapan pembangunan jalur LRT Cibubur - Baranangsiang.

Berdasarkan hasil rapat laporan akhir studi trase LRT Cibubur - Baranangsiang bersama instansi-instansi terkait diperoleh beberapa hasil, sebagai berikut:

- a. trase yang berpotongan dengan jalan tol, dapat berpotensi meningkatkan *demand* dan perekonomian di kawasan tersebut;
- b. Stasiun Baranangsiang disepakati dibangun diatas Terminal Baranangsiang;
- c. area yang dibagi dalam opsi trase terpilih ini sesuai dengan masukan dan peninjauan kembali pada konsep laporan akhir; dan
- d. tipe konstruksi disesuaikan dengan yang ada saat ini (*elevated*).



Gambar 78. Kegiatan Studi Trase LRT Cibubur - Baranangsiang Kota Bogor

3. Pembangunan e-SPT dengan SMS Gateway

Sesuai dengan tata kelola administrasi Pemerintah bahwa dalam pelaksanaan survei dan koordinasi diperlukan Surat Tugas atau Surat Perintah Tugas sebagai dasar penugasan pegawai BPTJ. Pembangunan aplikasi e-SPT dilaksanakan untuk membuat SPT (Surat Perintah Tugas) secara *online*. E-SPT ini berfungsi untuk mempermudah dalam pembuatan SPT untuk penulisan nama, gelar, dan isi tugas yang diperintahkan serta meminimalisir adanya duplikasi penugasan pegawai BPTJ.



Gambar 79. Pembangunan e-SPT dengan SMS Gateway

4. Pengadaan Perangkat SMS Gateway

Kegiatan pengadaan perangkat SMS Gateway dilaksanakan sebagai server dari aplikasi e-SPT dengan SMS Gateway dimana setiap pegawai yang mendapat Surat Perintah Tugas akan menerima notifikasi SPT melalui SMS ke HP masing-masing pegawai.



Gambar 80. Perangkat SMS Gateway

5. **Perencanaan Teknis Pengembangan Matrik Asal Tujuan Jabodetabek**

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersususnya matrik asal tujuan Jabodetabek Tahun 2019 yang digunakan sebagai data dasar perencanaan dalam pengembangan dan peningkatan layanan transportasi yang terintegrasi di Jabodetabek.



Gambar 81. Perencanaan Teknis Pengembangan Matrik Asal Tujuan Jabodetabek

6. **Pembangunan Aplikasi *e-Ticketing***

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengaplikasikan *e-Ticketing* di Terminal Jatijajar yang berfungsi untuk mengumpulkan data penumpang yang terhubung pada mesin *gate* terminal yang akan terhubung pada perangkat komputer yang tersedia.



Gambar 82. Aplikasi e-Ticketing

7. Pengadaan Hardware e-Ticketing

Kegiatan pengadaan *hardware e-ticketing* berupa pengadaan 2 (dua) unit *gate e-ticketing* (beserta mesin), perangkat komputer, *min tab* dan *printer* untuk mencetak *QR code*. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengimplementasikan *e-ticketing* di Terminal Jatijajar.



Gambar 83. Hardware e-Ticketing

8. Monitoring Dampak Kebijakan Sektor Transportasi Tahun 2017 s.d. 2018 di Wilayah Jabodetabek

Kegiatan *monitoring* dampak kebijakan sektor transportasi tahun 2017 s.d. 2018 di wilayah Jabodetabek difokuskan pada implementasi paket kebijakan penanganan kemacetan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Jagorawi dan Jakarta-Tangerang yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2018 tentang Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Pembangunan Proyek Infrastruktur Strategis Nasional di Ruas Jalan Tol Jakarta - Cikampek dan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2018 tentang Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Tol Jakarta - Tangerang, Tangerang - Merak, dan Jakarta - Bogor - Ciawi.

Untuk mengatasi kemacetan di ruas Tol Jakarta - Cikampek, kebijakan yang diimplementasikan sebagai berikut:

- a. Pembatasan operasional angkutan barang di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek mulai pukul 06.00 – 09.00 WIB setiap hari kerja kecuali hari libur nasional, dimulai dari ruas Cawang sampai dengan Karawang Barat dan sebaliknya.
- b. Pembatasan lalu lintas mobil penumpang dengan sistem ganjil-genap arah Jakarta mulai pukul 06.00 – 09.00 WIB setiap hari kerja kecuali hari libur nasional pada akses masuk (*ramp on*) prioritas (yang telah diimplementasikan pada ramp on Bekasi Barat 1, Bekasi barat 2, dan Bekasi Timur 2).
- c. Lajur khusus angkutan umum untuk mobil bus arah Jakarta pukul 06.00 – 09.00 WIB setiap hari kerja kecuali hari libur nasional mulai dari pintu Tol Bekasi Timur hingga *exit* Tol Halim.

Untuk mengatasi kemacetan di ruas Tol Jakarta - Tangerang, kebijakan yang diimplementasikan sebagai berikut:

- a. Pembatasan operasional angkutan barang di ruas jalan Tol Jakarta-Tangerang dan Tangerang-Merak mulai pukul 06.00 – 09.00 WIB setiap hari kerja kecuali hari libur nasional, dilakukan pada akses masuk (*ramp on*) Cikupa, Bitung 2, Karawaci 4, Tangerang 2, dan Kunciran 2 (arah Jakarta).
- b. Pengaturan lalu lintas mobil penumpang dengan sistem ganjil-genap arah Jakarta mulai pukul 06.00 – 09.00 WIB setiap hari kerja kecuali hari libur nasional pada akses masuk (*ramp on*) Karawaci 2, Karawaci 4, Kunciran 2, dan Tangerang 2.
- c. Lajur khusus angkutan umum untuk mobil bus arah Jakarta pukul 06.00 – 09.00 WIB setiap hari kerja kecuali hari libur nasional mulai dari pintu Tol Tangerang 2 hingga *exit* Tol Kebon Jeruk.

Untuk mengatasi kemacetan di ruas Tol Jakarta - Bogor - Ciawi, kebijakan yang diimplementasikan sebagai berikut:

- a. Pengaturan lalu lintas mobil penumpang dengan sistem ganjil-genap arah Jakarta mulai pukul 06.00 – 09.00 WIB setiap hari kerja kecuali hari libur nasional pada akses masuk (*ramp on*) Cibubur 2.
- b. Lajur khusus angkutan umum untuk mobil bus arah Jakarta pukul 06.00 – 09.00 WIB setiap hari kerja kecuali hari libur nasional mulai dari pintu Tol Bogor hingga *exit* Tol Pasar Rebo.



Gambar 84. Monitoring Dampak Kebijakan Sektor Transportasi Tahun 2017-2018 di Wilayah Jabodetabek



Gambar 85. Monitoring Dampak Kebijakan Sektor Transportasi Tahun 2017-2018 di Wilayah Jabodetabek

9. Peningkatan Kinerja Lalu Lintas Ruas dan Simpang di Wilayah Jabodetabek

Kegiatan peningkatan kinerja ruas dan simpang di wilayah Jabodetabek tahun 2019 difokuskan pada penanganan kemacetan di Kawasan Tanjung Priok.

- a. Program Jangka Pendek
 - 1) sosialisasi dan himbauan penggunaan gerbang Tol Koja Barat untuk kendaraan Golongan 3 – 5.
 - 2) optimalisasi penggunaan mobile reader di Pintu Tol Kebon Bawang.
- b. Program Jangka Panjang

- 1) integrasi sistem pembayaran antara gerbang Tol Koja Barat dan gerbang Tol Kebon Bawang;
- 2) percepatan sistem pembayaran free flow di jalan tol;
- 3) pelebaran ruas jalan akses Marunda yang mengalami bottleneck;
- 4) efisiensi pergerakan truk dengan melakukan relokasi garasi dan depo kontainer, serta konsolidasi kontainer; dan
- 5) optimasi kereta barang dengan melakukan subsidi kereta api logistik dan optimasi penggunaan *dry port*.



Gambar 86. Kegiatan Peningkatan Kinerja Ruas dan Simpang di Wilayah Jabodetabek

10. *Monitoring* dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)

Kegiatan *monitoring* dan evaluasi dokumen hasil Andalalin merupakan bagian dari proses pemberian rekomendasi Andalalin dengan *output* persetujuan dokumen hasil Andalalin suatu objek kegiatan yang dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Realisasi PNBP Andalalin, sebagai berikut:



Gambar 87. Realisasi PNBP dari Rekomendasi Andalalin di BPTJ

11. **Pelatihan Sistem Operasi *Mass Rapid Transit* (MRT)**

Pelatihan Sistem Operasi MRT bagi pegawai di lingkungan BPTJ dan mitra kerja adalah memberikan pemahaman di bidang sistem operasi MRT. Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta pelatihan mampu:

- a. memahami regulasi transportasi massal berbasis rel;
- b. memahami sistem operasional moda transportasi MRT;
- c. memahami mekanisme pemeliharaan MRT dan prosedur keselamatan sistem MRT;
- d. memahami sistem konstruksi dan infrastruktur moda MRT; dan
- e. mengetahui rencana pengembangan jaringan MRT dan rencana pengembangan TOD berbasis moda MRT.



Gambar 88. Pelatihan Sistem Operasi MRT

12. **Monitoring dan Evaluasi Kinerja Jaringan dan Lalu Lintas Kereta Api Perkotaan di Wilayah Jabodetabek**

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh BPTJ meliputi Standar Pelayanan Minimum (SPM) pelayanan di stasiun dan kereta, ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan kereta (dalam hal ini KRL Jabodetabek dan kereta bandara Soekarno-Hatta) dan waktu perpindahan intra moda KRL di beberapa stasiun transit. Berdasarkan monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan didapat hasil, sebagai berikut:

- a. *Rampcheck* atau inspeksi kelengkapan SPM di perjalanan dan stasiun dalam rangka persiapan angkutan lebaran tahun 2019 PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta. Pelayanan angkutan penumpang di wilayah Daerah Operasi 1 Jakarta terhadap SPM secara

umum telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2015. Pada fasilitas pelayanan yang belum terpenuhi, diharapkan dapat segera dipenuhi kekurangan fasilitas dimaksud paling lambat sebelum masa Angkutan Lebaran 2019. Sedangkan terhadap seluruh fasilitas kelengkapan pelayanan yang sudah ada wajib dipertahankan dan dipelihara guna peningkatan pelayanan kepada seluruh pengguna jasa angkutan kereta api.

- b. *Rampcheck* atau inspeksi kelengkapan SPM di perjalanan dan stasiun dalam rangka persiapan Angkutan Lebaran 2019 PT. Kereta Commuter Indonesia dan PT. Railink. Dari hasil pemantauan bersama yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, BPTJ, PT. KAI, PT. KCI dan PT Railink masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dan dilengkapi dalam pemenuhan SPM di perjalanan maupun di stasiun, diantaranya:
 - 1) Untuk SPM di Perjalanan
 - a) ketepatan jadwal kedatangan dan keberangkatan kereta api, khususnya KRL; dan
 - b) CCTV di dalam kereta.
 - 2) Untuk SPM di Stasiun
 - a) kemiringan *ramp* yang masih di atas 10° sehingga menyusahakan bagi penumpang yang menggunakan kursi roda, disabilitas ataupun lanjut usia;
 - b) masih terdapat beberapa stasiun yang perlu menyediakan toilet untuk penumpang disabilitas; dan
 - c) ada beberapa stasiun yang perlu ditambahkan informasi petunjuk jalur evakuasi, prosedur evakuasi, titik kumpul evakuasi, nomor telepon darurat, stiker berisi nomor dan sms pengaduan dan *layout* stasiun.
- c. Survey waktu perpindahan intramoda KRL pada beberapa stasiun transit di wilayah Jabodetabek. Survey dilakukan pada beberapa stasiun transit, antara lain Stasiun Tanah Abang, Duri, Kampung Bandan, Jakarta Kota, Manggarai, Jatinegara dan Citayam. Berdasarkan hasil survey, ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian, sebagai berikut:
 - 1) Perlu ada fasilitas perpindahan penumpang yang memadai pada stasiun transit baik berupa tangga, eskalator maupun *lift*.
 - 2) Perlu adanya sinkronisasi jadwal intramoda KRL di stasiun transit, sehingga waktu tunggu kedatangan/keberangkatan KRL lanjutan tidak terlalu lama.
 - 3) Perlunya menambah jalur baru untuk KA Bandara di Stasiun Tanah Abang (misalnya menggunakan jalur 4 yang tidak dilewati KRL), sehingga headway KRL dengan lintas pelayanan Bogor - Angke dan sebaliknya dapat lebih rapat.

13. Pengoperasian Area Traffic Control System (ATCS) BPTJ

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek memiliki sistem ATCS yang terpasang pada 54 titik lokasi simpang yang tersebar di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi. Dalam pemanfaatannya, ATCS BPTJ terpasang pada persimpangan di ruas jalan nasional untuk mengatur arus-arus lalu lintas pengendara. Lokasi ATCS yang menjadi batasan lingkup pelaksanaan pengoperasian dan pemantauan, sebagai berikut:

Tabel 5. Lokasi ATCS Tempat Pelaksanaan Pengoperasian dan Pemantauan

No.	Kota Bekasi	Kota Bogor	Kota Depok	Kab. Bekasi	Kab. Bogor
1	Sp. Wahab Affan	Sp. Pomad	Sp. Pal UI	Sp. Sinde	Sp. Cibinong
2	Sp. Kranji	Sp. Talang	Sp. Cilodong	Sp. Kompas	Sp. Cikaret
3	Sp. Perumnas	Sp. Marwan	Sp. Bojong Sari	Sp. Exit Toll Cibitung	Sp. Gadog
4	Sp. Pemda	Sp. Pangrango	Sp. Sengon	Sp. Warung Bongkok	Sp. Ciawi
5	Sp. Kayu Ringin	Sp. Tugu Kujang	Sp. PLN	Sp. SGC	Sp. PM
6	Sp. BCP	Sp. Baranangsiang			Sp. Salabenda
7	Sp. Tol Barat	Sp. Bangbarung			Sp. Terminal Parung
8	Sp. Rawa Panjang	Sp. Pandu			Sp. IPB
9	Sp. Kartini	Sp. BORR			
10	Sp. Unisma/ SMP 2	Sp. Warung Jambu			
11	Sp. Lotte Mart	Sp. Ekalokasari			
12	Sp. Masuk Terminal	Sp. Yasmin			
13	Sp. Keluar Terminal	Sp. Lippo Plaza			
14	Sp. Bulak Kapal	Sp. Semplak			
15	Sp. Rawa Semut	Sp. SBJ			
16	Sp. Pekayon	Sp. Bubulak			
17	Sp. Kali Abang	Sp. Laldon			
18	Sp. Bank Jabar	Sp. Aspol			

Berdasarkan pemantauan secara rutin yang telah dilaksanakan, apabila diketahui terjadi permasalahan lalu lintas pada lokasi-lokasi terpantau akan dilakukan tindak lanjut penanganan. Berikut contoh hasil pemantauan jalan nasional yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 April - 3 Mei 2019, diperoleh kondisi lalu lintas yang memerlukan penanganan lebih lanjut, sebagai berikut:

- a. Simpang Ciawi dan Simpang Terminal Parung Kabupaten Bogor

Terdapat adanya hambatan samping seperti angkot yang menyetem terlalu lama di badan jalan dan mulut simpang sehingga mengganggu laju kendaraan lain serta terdapat pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan untuk berjualan.



Gambar 89. Pemantauan Jalan Nasional Simpang Ciawi dan Simpang Terminal Parung Kabupaten Bogor

b. Simpang Pal UI Depok

Terdapat adanya hambatan samping seperti angkot yang menyetem di badan jalan yang menyebabkan antrian kendaraan dan mengganggu laju kendaraan lain dan tidak menghiraukan adanya rambu larangan.



Gambar 90. Pemantauan Jalan Nasional Simpang Ciawi dan Simpang Pal UI Depok

c. Simpang Rawa Panjang Kota Bekasi

Terdapat adanya hambatan samping seperti angkot yang menyetem terlalu lama di badan jalan sehingga mengganggu laju kendaraan lain.



Gambar 91. Pemantauan Jalan Nasional Simpang Ciawi dan Simpang Rawa Panjang Kota Bekasi

Selain pemantauan untuk setiap simpang, ada juga pemantauan melalui alat detektor statistik ini dipasang di beberapa ruas jalan yang terletak di wilayah Kota Bekasi. Saat ini baru tersedia di empat titik, yaitu di simpang Kayu Ringin mengarah ke BCP dan mengarah ke Summarecon, di ruas Jalan Ahmad Yani, dan di dekat Simpang Pekayon arah simpang Rawa Panjang.

Alat detektor statistik ini dipasang untuk mendapatkan data terkait volume lalu lintas selama 24 jam. Data dari hasil detektor alat tersebut digunakan sebagai pengumpulan data lalu lintas yang nantinya dapat digunakan untuk optimalisasi kinerja ruas dan simpang. Pemantauan dengan alat detektor ini dilakukan untuk mengetahui kondisi lalu lintas pada ruas jalan tol dengan tujuan untuk:

- mengetahui waktu tempuh di ruas jalan tol;
- mengetahui kecepatan kendaraan di ruas jalan tol; dan
- mengetahui karakteristik lalu lintas di ruas jalan tol.

Dengan adanya pemantauan di ruas jalan tol secara rutin dan berkala diharapkan dapat segera dilakukan penanganan lebih cepat jika terjadi permasalahan lalu lintas sehingga tidak menimbulkan dampak berkepanjangan. Berikut ini beberapa laporan hasil pemantauan ruas jalan tol di wilayah Jabodetabek pada bulan april 2019:

- Jalan Tol Jakarta – Cikampek

Tabel 6. Laporan Hasil Pemantauan Ruas Jalan Tol Jakarta - Cikampek pada Bulan April 2019

Tanggal	Cikarang Utama - Tebet			Tebet - Cikarang Utama		
	Jarak (km)	Waktu Tempuh (menit)	Kecepatan (km/jam)	Jarak (km)	Waktu Tempuh (menit)	Kecepatan (km/jam)
22-Apr-2019	30	59	30,51	30	102	17,65
23-Apr-2019	30	103	17,48	30	91	19,78

Tanggal	Cikarang Utama - Tebet			Tebet - Cikarang Utama		
	Jarak (km)	Waktu Tempuh (menit)	Kecepatan (km/jam)	Jarak (km)	Waktu Tempuh (menit)	Kecepatan (km/jam)
24-Apr-2019	30	86	20,93	30	88	20,45
25-Apr-2019	30	98	18,37	30	102	17,65
26-Apr-2019	30	99	18,18	30	97	18,56

b. Jalan Tol Jakarta – Tangerang

Tabel 7. Laporan Hasil Pemantauan Ruas Jalan Tol Jakarta - Tangerang pada Bulan April 2019

Tanggal	Tangerang - Tebet			Tebet - Tangerang		
	Jarak (km)	Waktu Tempuh (menit)	Kecepatan (km/jam)	Jarak (km)	Waktu Tempuh (menit)	Kecepatan (km/jam)
22-Apr-2019	46	49	56,33	46	61	45,25
23-Apr-2019	46	50	55,20	46	56	49,29
24-Apr-2019	46	54	51,11	46	72	38,33
25-Apr-2019	46	65	42,46	46	58	47,59
26-Apr-2019	46	62	44,52	46	74	37,30

c. Jalan Tol Jakarta – Ciawi

Tabel 8. Laporan Hasil Pemantauan Ruas Jalan Tol Jakarta - Ciawi pada Bulan April 2019

Tanggal	Tangerang - Tebet			Tebet - Tangerang		
	Jarak (km)	Waktu Tempuh (menit)	Kecepatan (km/jam)	Jarak (km)	Waktu Tempuh (menit)	Kecepatan (km/jam)
22-Apr-2019	48	41	70,24	48	46	62,61
23-Apr-2019	48	52	55,38	48	49	58,78
24-Apr-2019	48	44	65,45	48	54	53,33
25-Apr-2019	48	45	64,00	48	46	62,61
26-Apr-2019	48	53	54,34	48	47	61,28

14. Monitoring Infrastruktur pada Titik Simpang

Dengan dilaksanakannya pengoperasian perangkat ATCS maka diperlukan suatu kegiatan *monitoring* terhadap infrastruktur terhadap perangkat ATCS pada setiap titik simpang yang dilakukan dengan metode survei lapangan. Kegiatan Monitoring ini telah dilaksanakan untuk mengetahui kondisi dan performa dari setiap perangkat yang terpasang di lapangan, terutama untuk optimalisasi lampu APILL dan *speaker announcer* mengingat kedua komponen tersebut tidak dapat dipantau secara langsung melalui ruang kontrol ATCS, serta apabila kondisi

aktual menunjukkan terjadinya kendala atau permasalahan di lokasi dapat dengan segera dilakukan penanganan lebih lanjut. Berikut rekap data laporan hasil monitoring infrastruktur pada titik simpang ATCS pada bulan April 2019:

Tabel 9. Laporan Survei Monitoring Simpang Area Traffic Control System Bulan April 2019

Koridor	Nama Simpang	Jenis Simpang	CCTV	Speaker	APILL
Kota Bekasi	Sp. Wahab Affan	Simpang 3	√	x	√
	Sp. Kranji	Simpang 3	√	x	√
	Sp. Perumnas	Simpang 3	√	√	√
	Sp. Pemda	Simpang 4	√	√	√
	Sp. Kayu Ringin	Simpang 4	√	x	Tidak Ada
	Sp. BCP	Simpang 4	√	x	√
	Sp. Tol Barat	Simpang 3	√	x	√
	Sp. Rawa Panjang	Simpang 4	√	√	√
	Sp. Kartini	Simpang 3	√	√	√
	Sp. Unisma/ SMP 2	Simpang 4	√	x	√
Kota Depok	Sp. Pal UI	Simpang 3	√	√	Flashing
	Sp. Cilodong	Simpang 3	√	x	Tidak Ada
Kota Bogor	Sp. Pomad	Simpang 4	x	x	√
	Sp. Talang	Simpang 3	x	x	√
	Sp. Marwan	Simpang 4	x	x	√
	Sp. Pangrango	Simpang 4	x	x	√
	Sp. Tugu Kujang	Simpang 3	x	x	√
	Sp. Baranangsiang	Simpang 3	x	x	√
Kab. Bogor	Sp. Cibinong	Simpang 3	x	x	Tidak Ada
	Sp. Cikaret	Simpang 3	x	x	√
	Sp. Gadog	Simpang 3	x	x	√
	Sp. Ciawi	Simpang 4	x	x	√

Tabel 10. Laporan Survei Monitoring Simpang Area Traffic Control System Bulan Mei 2019

Koridor	Nama Simpang	Jenis Simpang	CCTV	Speaker	APILL	Progress
Kota Bekasi	Sp. Wahab Affan	Simpang 3	√	x	√	Tidak Ada Progress
	Sp. Kranji	Simpang 3	√	x	√	Tidak Ada Progress
	Sp. Perumnas	Simpang 3	√	√	√	
	Sp. Pemda	Simpang 4	√	√	√	
	Sp. Kayu Ringin	Simpang 4	√	x	Tidak Ada	Tidak Ada Progress
	Sp. BCP	Simpang 4	√	x	√	Tidak Ada Progress
	Sp. Tol Barat	Simpang 3	√	x	√	Tidak Ada Progress
	Sp. Rawa Panjang	Simpang 4	√	√	√	

Koridor	Nama Simpang	Jenis Simpang	CCTV	Speaker	APILL	Progress
	Sp. Kartini	Simpang 3	√	√	√	
	Sp. Unisma/ SMP 2	Simpang 4	√	x	√	Tidak Ada Progress
Kota Depok	Sp. Pal UI	Simpang 3	√	√	Flashing	
	Sp. Cilodong	Simpang 3	√	x	Tidak Ada	Tidak Ada Progress
Kota Bogor	Sp. Pomad	Simpang 4	x	x	√	Tidak Ada Progress
	Sp. Talang	Simpang 3	x	x	√	Tidak Ada Progress
	Sp. Marwan	Simpang 4	x	x	√	Tidak Ada Progress
	Sp. Pangrango	Simpang 4	x	x	√	Tidak Ada Progress
	Sp. Tugu Kujang	Simpang 3	x	x	√	Tidak Ada Progress
	Sp. Baranangsiang	Simpang 3	x	x	√	Tidak Ada Progress
Kab. Bogor	Sp. Cibinong	Simpang 3	x	x	Flashing	Progress
	Sp. Cikaret	Simpang 3	x	x	√	Tidak Ada Progress
	Sp. Gadog	Simpang 3	x	x	√	Tidak Ada Progress
	Sp. Clawi	Simpang 4	x	x	√	Tidak Ada Progress

Tabel 11. Laporan Survei Monitoring Simpang Area Traffic Control System Bulan Juni 2019

Koridor	Nama Simpang	Jenis Simpang	CCTV	Speaker	APILL	Progress
Kota Bekasi	Sp. Wahab Affan	Simpang 3				
	Sp. Krangji	Simpang 3				
	Sp. Perumnas	Simpang 3				
	Sp. Pemda	Simpang 4				
	Sp. Kayu Ringin	Simpang 4				
	Sp. BCP	Simpang 4				
	Sp. Tol Barat	Simpang 3				
	Sp. Rawa Panjang	Simpang 4				
	Sp. Kartini	Simpang 3				
	Sp. Unisma/ SMP 2	Simpang 4	√	√	√	Progress
Kota Depok	Sp. Pal UI	Simpang 3	√	√	Flashing	
	Sp. Cilodong	Simpang 3	√	x	Tidak Ada	Tidak Ada Progress
Kota Bogor	Sp. Pomad	Simpang 4	√	√	√	
	Sp. Talang	Simpang 3	x	√	√	Progress Speaker
	Sp. Marwan	Simpang 4				
	Sp. Pangrango	Simpang 4	√	√	√	Progress
	Sp. Tugu Kujang	Simpang 3				
	Sp. Baranangsiang	Simpang 3				
Kab. Bogor	Sp. Cibinong	Simpang 3	x	x	Flashing	Progress
	Sp. Cikaret	Simpang 3	x	x	√	Tidak Ada Progress

Koridor	Nama Simpang	Jenis Simpang	CCTV	Speaker	APILL	Progress
	Sp. Gadog	Simpang 3	x	x	√	Tidak Ada Progress
	Sp. Ciawi	Simpang 4	x	x	√	Tidak Ada Progress

15. Pemeliharaan *Area Traffic Control System (ATCS) BPTJ*

Pemeliharaan ATCS, yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, penting dilakukan untuk menjaga kinerja ATCS agar tetap optimal demi meningkatkan keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas bagi pengguna jalan. Pemeliharaan tersebut antara lain melalui pemeriksaan kondisi *traffic light*, *video surveillance (CCTV)*, *vehicle detector* dan *server room* ATCS. Pemeliharaan perangkat ATCS BPTJ pada tahun 2019 meliputi:

- pemeriksaan dan perbaikan kabel *fiber optic*;
- pemeliharaan tiang panjang APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas); dan
- pemeliharaan peralatan dalam mesin kendali.

Dalam proses pengoperasian dan pemantauan ATCS tentu saja terdapat beberapa kendala atau kerusakan-kerusakan yang sering terjadi, seperti kamera CCTV terhalang oleh ranting pohon, kamera *blackout* dan *speakers* untuk announcer tidak berfungsi. Hal-hal tersebut menyebabkan ATCS tidak dapat dikontrol secara langsung melalui *Control Center (CC) Room* BPTJ. Berdasarkan kendala tersebut maka dilakukannya pemeliharaan terhadap peralatan maupun sistem ATCS. Sehingga membutuhkan proses untuk melakukan perbaikan alat maupun sistem agar fungsi dari ATCS dapat terpenuhi dengan baik.

Proses perbaikan biasanya menghabiskan waktu selama kurang lebih 2-6 hari, dan perbaikan akan kerusakan sistem tersebut langsung diperbaiki oleh tim penyedia jasa ATCS. Sedangkan untuk proses pemeliharaan terkait dengan terhalangnya kamera oleh ranting pohon dan tidak berfungsinya speakers akan dilaporkan terlebih dahulu sebelum dilakukan perbaikan atau penanganan lebih lanjut.



Gambar 92. Kegiatan Pemeliharaan ATCS di Jl. Jend. Ahmad Yani Kota Bekasi

16. Uji Coba Sistem 2-1 Jalur Puncak

Sampai dengan saat ini Kementerian Perhubungan (BPTJ), Kepolisian (Polres Kabupaten Bogor), Pemerintah Daerah, dan instansi terkait telah melakukan 2 (dua) kali uji coba skema optimasi sistem 2-1 jalur Puncak yang dikombinasikan dengan sistem *one-way* yang selama ini sudah dilakukan setiap akhir pekan di jalur Puncak.



Gambar 93. Uji Coba Skema Optimasi Sistem 2-1 Jalur Puncak yang Dikombinasikan dengan Sistem One-way

Uji coba implementasi kebijakan yang telah dilakukan dibagi ke dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

a. Uji Coba Tahap 1

Pada uji coba yang pertama, BPTJ, Satlantas Polres Bogor, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait berdasarkan hasil rapat persiapan yang telah dilakukan memutuskan untuk melaksanakan uji coba sistem 2-1 jalur Puncak pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019.

1) Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan uji coba tahap 1 adalah dengan memberlakukan pengaturan sistem 2-1 Jalur Puncak dari Simpang Gadog sampai Simpang Taman Safari Indonesia sepanjang ± 11 km. Pembatas tiap lajur menggunakan *traffic cone*, dengan jarak antar *traffic cone* ± 25 m. Sementara pembagian waktu penerapan sistem 2-1, sebagai berikut:

- a) pukul 03.00 – 13.00 WIB: 2 lajur ke arah Puncak dan 1 lajur ke arah Gadog.

- b) pukul 14.00 – 20.00 WIB: 1 lajur ke arah Puncak dan 2 lajur ke arah Gadog.

2) Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Pada pelaksanaan uji coba tahap 1 (satu) pada awalnya berjalan dengan lancar hingga pada siang hari. Namun, pada saat waktu peralihan dari 2 lajur ke arah Puncak dan 1 lajur ke arah Gadog menjadi 2 lajur ke arah Gadog dan 1 lajur ke arah Puncak terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pihak Kepolisian harus melakukan diskresi dikarenakan terjadi *stuck* di beberapa titik simpang krusial, seperti Simpang Megamendung dan Pasar Cisarua menyebabkan antrian kendaraan dan kemacetan panjang. Hal ini menyebabkan uji coba sistem 2-1 ini hanya dilaksanakan sampai siang hari dan selanjutnya dilakukan sistem *one-way* untuk mengurai kemacetan yang terjadi.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh tim teknis BPTJ dengan melakukan pengamatan di lapangan dan perhitungan kinerja lalu lintas pada saat pelaksanaan sistem 2-1 didapatkan hasil, sebagai berikut:

- a) Terdapat peningkatan waktu tempuh sebesar 34% dan volume rata-rata sebesar 5% pada tanggal pelaksanaan uji coba Sabtu 27 oktober 2019 dibandingkan dengan Sabtu sebelumnya tanggal 20 oktober 2019, diasumsikan peningkatan ini terjadi karena animo masyarakat untuk mencoba sistem 2-1 Jalur Puncak ini.
- b) Gangguan terhadap kapasitas jalan dikarenakan oleh parkir kendaraan dibadan jalan, aktivitas PKL di pinggir jalan, angkutan umum yang berhenti sembarangan, lebar jalan yang tidak homogen dan pekerjaan pelebaran jalan yang belum selesai di beberapa titik yang menyebabkan gangguan bagi pengendara yang melintas.
- c) Perilaku pengguna jalan yang tidak taat aturan.

b. Uji Coba Tahap 2

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi uji coba sistem 2-1 pada tahap pertama BPTJ, Satlantas Polres Bogor, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait memutuskan untuk melakukan uji coba sistem 2-1 tahap 2 pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019, namun pada uji coba kali ini sistem 2-1 akan dikombinasikan dengan sistem *one way* yang selama ini telah dilakukan di jalur puncak.

1) Metode Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan sistem 2-1 tahap 2 ini secara umum sama dengan pelaksanaan tahap 1 hanya ditambahkan beberapa penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi kegiatan sebelumnya, diantaranya:

- a) pemasangan *traffic cone* hanya 1 baris pada batas pemisahan jalur 2-1;
- b) jarak antar pemasangan *traffic cone* dirapatkan menjadi $\pm 10 - 15$ m dan di beberapa titik simpang yang ramai dipasang tali antar *traffic cone*;
- c) dilakukan manajemen rekayasa lalu lintas di beberapa titik simpang dan putar balik; dan
- d) waktu pelaksanaan sistem 2-1 disepakati pada siang hari pukul 12.00-16.00 WIB.

2) Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Pada uji coba tahap 2 ini yang mengkombinasikan sistem 2-1 dan sistem *one-way* dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar, tidak ditemui antrian kendaraan yang panjang seperti pada uji coba sebelumnya, ditambah juga respon masyarakat terhadap uji coba tahap 2 ini lebih positif. Berdasarkan perhitungan kinerja lalu lintas yang dilakukan oleh tim teknis BPTJ juga diperoleh hasil yang lebih baik dari uji coba minggu sebelumnya, sebagai berikut:

- a) Waktu tempuh rata-rata dari Simpang Gadog menuju Simpang Taman Safari Indonesia pada saat waktu penerapan sistem 2-1 adalah 41,25 menit dengan kecepatan rata-rata 17,41km/jam sedangkan untuk arah sebaliknya dari Simpang Taman Safari menuju Simpang Gadog pada waktu penerapan sistem 2-1 adalah 32 menit dengan kecepatan rata-rata 21,52 km/jam.
- b) Volume lalu lintas jam puncak pada saat pelaksanaan uji coba sistem 2-1 ini untuk arah Jakarta terjadi pada pukul 13.00-14.00 WIB dengan total kendaraan perjam sebesar 1.673 kendaraan dan untuk arah Puncak terjadi pada pukul 10.00-11.00 WIB dengan total kendaraan perjam sebesar 2.326 kendaraan.

C. Direktorat Angkutan

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi (RIT) Jabodetabek telah menandai babak baru dalam penanganan transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek. Perpres mengenai RIT Jabodetabek tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Juli 2018 lalu. Dengan demikian kebijakan dan langkah-langkah untuk menata transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek dapat dilakukan dengan terpadu berpedoman pada RIT Jabodetabek ini. Untuk mencapai sasaran sebagaimana tersebut di atas berikut ini disampaikan kegiatan strategis Direktorat Angkutan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019, yaitu:

1. Fasilitasi Teknis Antar *Stakeholder* Dalam Penyediaan Layanan Angkutan Umum

Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) tahun 2019 telah melakukan fasilitasi teknis dengan menjembatani antara pihak pengembang dengan pemilik Perusahaan *Otobus* (PO) melalui *flag off*

pembukaan rute dalam bentuk layanan JR *Connexion*, JA *Connexion*, Transjabodetabek premium dan reguler sebanyak 1.637 kendaraan (JR *Connexion* 87 kendaraan, JA *Connexion* 462 kendaraan, dan Transjabodetabek 1.088 kendaraan).

a. Jabodetabek *Residence* (JR) *Connexion*

Angkutan permukiman merupakan angkutan orang yang disediakan khusus untuk mengangkut para warga penghuni suatu kawasan permukiman dengan bangkitan yang tergolong besar dan belum terlayani angkutan umum dengan baik sehingga pergerakan warganya mayoritas masih menggunakan kendaraan pribadi. JR *Connexion* merupakan layanan angkutan orang tidak dalam trayek, yakni angkutan dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu, atau dari suatu tempat ke tempat lain, yang mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.

Pola pergerakan dari angkutan ini bersifat *point-to-point* sehingga dapat memangkas waktu tempuh karena tidak melayani transit untuk naik-turun penumpang di sepanjang perjalanan. Saat ini angkutan permukiman baru diterapkan di wilayah Jabodetabek untuk mengakomodir pergerakan warganya dengan sebutan Jabodetabek *Residence Connexion*.



Gambar 94. Flag Off JR Connexion oleh Kepala BPTJ di Scientia Square Park Serpong, Tanggal 12 Juni 2019

Kegiatan peluncuran (*flag off*) JR *Connexion* di Kawasan Pemukiman Scientia Square Park Serpong pada tanggal 12 Juni 2019 merupakan bagian dari program BPTJ untuk mengembangkan layanan angkutan umum massal bus dari pemukiman ke Jakarta hingga Tangerang. Selain itu juga untuk mengajak masyarakat agar beralih dari angkutan pribadi ke angkutan umum.

Peluncuran dilakukan oleh Kepala BPTJ, Bambang Prihartono, dihadiri oleh Bupati Kabupaten Tangerang, dan perwakilan dari Dishub Kabupaten Tangerang, Operator Bus dan Pengembang Kawasan Pemukiman serta sejumlah masyarakat di Scientia Square Park Serpong. Sementara itu, rute pelayanan JR *Connexion* yang tersedia di Jabodetabek saat ini berjumlah 24 lokasi keberangkatan dengan peta jaringan pelayanan, sebagai berikut:



Gambar 95. Jaringan Trayek Jabodetabek Residence Connexion

b. *Jabodetabek Airport (JA) Connexion*

Angkutan pemuat moda sangat diperlukan di kota-kota besar mengingat tingginya kebutuhan perjalanan menggunakan moda udara. Angkutan ini termasuk dalam kategori angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dengan pola perjalanan dari bandara menuju kawasan vital dan sebaliknya. Keberadaan angkutan pemuat moda bandara adalah untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang keluar/masuk bandara mengingat keterbatasan jalan akses bandara sehingga pelayanan yang disediakan oleh angkutan pemuat moda bandara harus sesuai dengan kebutuhan dari para penumpang pesawat baik dari sisi rute, armada, maupun pelayanan selama perjalanan. *Jabodetabek Airport Connexion* merupakan angkutan pemuat moda yang melayani rute secara langsung dari Bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdana Kusuma menuju kawasan komersil/hotel/perumahan maupun arah sebaliknya.

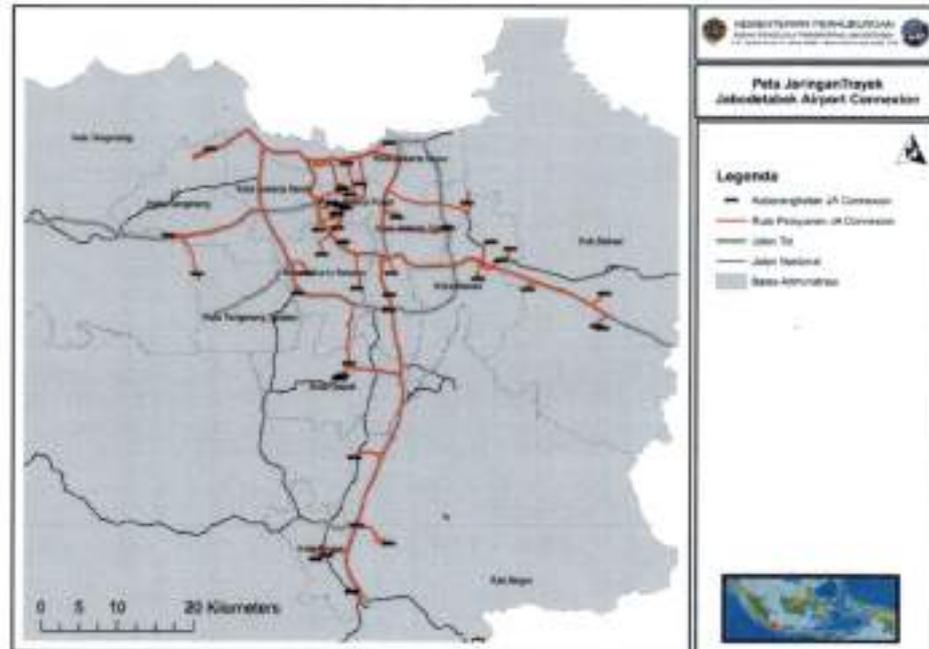


Gambar 96. Flag Off JA Connexion Lorena Halim Perdana Kusuma ke Bandara Soekarno Hatta (22 April 2019) dan JA Connexion Sinar Jaya di Perumahan Vida Bekasi ke Bandara Soekarno Hatta (16 Mei 2019)

Peluncuran dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono, dihadiri oleh perwakilan dari

Operator Bus dan Pengembang Kawasan Pemukiman. Kepala BPTJ juga meninjau ke dalam bus untuk mengetahui fasilitas-fasilitas yang terdapat di dalam bus dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada calon penumpang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan informasi mengenai peluncuran *JA Connexion* dan juga untuk mengajak masyarakat agar beralih dari angkutan pribadi ke angkutan umum.

Rute pelayanan *JA Connexion* yang tersedia saat ini berjumlah 45 titik keberangkatan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma dengan peta jaringan pelayanan, sebagai berikut:



Gambar 97. Peta Jaringan Trayek Jabodetabek Airport Connexion

c. Transjabodetabek Premium dan Reguler

Bus Transjabodetabek Premium dan Reguler dioperasikan untuk melayani beberapa titik-titik di daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menuju Jakarta dan sebaliknya. Selain itu, pada tanggal 28 September 2019 telah diluncurkan layanan bus angkutan perkotaan Jabodetabek Premium Puncak dengan narasumber Kepala BPTJ, Direktur Big Bird Indonesia dan Marketing Pasar Raya Blok M. Salah satu tujuan peluncuran layanan angkutan umum massal untuk pariwisata dilakukan untuk mengajak masyarakat agar beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Selain fasilitas layanan yang ditawarkan, kemudahan dalam pemesanan tiket menjadi salah satu daya tarik yang disampaikan kepada masyarakat. Transjabodetabek Premium memiliki perbedaan dengan Transjabodetabek Reguler, mulai dari segi kenyamanan hingga keamanannya. Transjabodetabek Premium para penumpang harus duduk di kursi yang telah disediakan, tidak boleh ada yang berdiri selama perjalanan sampai tujuan.



Gambar 98. Flag Off Tansjabodetabek Premium Puncak di Pasaraya Blok M pada Tanggal 28 September 2019

2. Penghargaan Pramudi dan Masinis Teladan di Wilayah Jabodetabek

Kegiatan Penghargaan Pramudi dan Masinis Teladan di Wilayah Jabodetabek dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara dan Tim Penilai yang telah ditunjuk dari perwakilan instansi masing-masing dan ditetapkan berdasarkan Surat Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Nomor: SK. 325 BPTJ Tahun 2019 Tentang Tim Penyelenggara Penghargaan Pramudi, Masinis Teladan dan Operator Angkutan Umum Terbaik di Wilayah Jabodetabek Tahun 2019 dan SK. 324 BPTJ Tahun 2019 Tentang Tim Penilai Penghargaan Pramudi, Masinis Teladan dan Operator Angkutan Umum Terbaik di Wilayah Jabodetabek Tahun 2019. Maksud dari Pramudi dan Masinis Teladan yaitu pramudi dan masinis yang dapat dijadikan contoh dari segala aspek indikator yang dinilai dari kegiatan penghargaan Pramudi dan Masinis Teladan di Wilayah Jabodetabek melalui hasil tes praktek dan wawancara, sehingga dapat dijadikan role model bagi pramudi dan masinis di wilayah Jabodetabek. Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 (empat) bulan mulai bulan Juni dan berakhir pada bulan September 2019. Penghargaan ini dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan Kemnhub kepada awak angkutan umum atas prestasi dan pengabdianya dalam bidang transportasi. Kegiatan ini terbagi menjadi 2 (dua) acara, yaitu:

- a. Pemilihan Pramudi dan Masinis Teladan di Wilayah Jabodetabek, dengan *output* dari kegiatan ini, diantaranya:
 - 1) hasil seleksi tes tertulis;
 - 2) hasil seleksi tes wawancara; dan
 - 3) hasil seleksi tes praktek.
- b. Finalisasi Pemilihan Pramudi dan Masinis Teladan di Wilayah Jabodetabek, dengan kategori pemilihan, sebagai berikut:
 - 1) Kategori Pramudi Teladan Berbasis Bus;
 - 2) Kategori Pramudi Teladan Berbasis Mobil Penumpang Umum/ Taksi;
 - 3) Kategori Masinis.



Gambar 99. Pemberian Penghargaan Pramudi dan Tes Praktek Pramudi di Hotel Redtop Jakarta pada Tanggal 15 Agustus 2019

Penetapan Pemenang Penghargaan Pramudi dan Masinis Teladan di Wilayah Jabodetabek berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Nomor SK. 350 BPTJ Tahun 2019, sebagai berikut:

1) Kategori Pramudi Teladan Berbasis Bus

No	Kategori	Nama	Perusahaan	Nilai
1.	Juara I	Agus Kusuma	PO Kosub Transport	8,6129
2.	Juara II	Fernando Hugo R.	PT. Hiba Utama	8,6110
3.	Juara III	Sahata	Perum PPD	8,6084
4.	Juara Harapan	Anggun Tria Mayangsari	PT. Mayasari Bhakti	8,5992

2) Kategori Pramudi Teladan Berbasis Mobil Penumpang Umum

No	Kategori	Nama	Perusahaan	Nilai
1.	Juara I	Sumamono	Blue Bird	7,7166
2.	Juara II	Yusep Purnomo	PT. Teknologi Pengangkutan	7,5292
3.	Juara III	Erwin Rachmawan	Blue Bird	7,4220
4.	Juara Harapan	Gunawan	PT. Teknologi Pengangkutan	7,3619

3) Kategori Masinis

No	Kategori	Nama	Perusahaan	Nilai
1.	Juara I	Iwan Fauzi	PT. KCI	45,0000
2.	Juara II	Andik Krisdianto	PT. KCI	44,9778
3.	Juara III	Harun	PT. KCI	44,7778
4.	Juara Harapan	Eko Purwanto	PT. KAI	44,7556

3. Penghargaan Operator Angkutan Umum Terbaik di Wilayah Jabodetabek

Kegiatan Penghargaan Operator Angkutan Umum Terbaik di Wilayah Jabodetabek dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara dan Tim Penilai yang telah ditunjuk dari perwakilan instansi masing-masing dan ditetapkan berdasarkan

Surat Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Nomor SK. 325 BPTJ Tahun 2019 tentang Tim Penyelenggara Penghargaan Pramudi, Masinis Teladan dan Operator Angkutan Umum Terbaik di Wilayah Jabodetabek Tahun 2019 dan SK.324 BPTJ Tahun 2019 tentang Tim Penilai Penghargaan Pramudi, Masinis Teladan dan Operator Angkutan Umum Terbaik di Wilayah Jabodetabek Tahun 2019.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 (empat) bulan mulai bulan Juni dan berakhir pada bulan September 2019. Penghargaan ini dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan Kementerian Perhubungan kepada perusahaan operator atas prestasi dan pengabdianya dalam bidang transportasi. Pelaksanaan penghargaan terbagi menjadi 2 (dua) acara, yaitu:

- a. Penilaian Lapangan ke Perusahaan Operator
 - 1) Pemeriksaan Dokumen Perusahaan
Para peserta Perusahaan Operator mengirimkan dokumen perusahaan sebagai kelengkapan persyaratan dalam Pemilihan Operator Angkutan Umum Terbaik. Berdasarkan dokumen tersebut dilakukan pemeriksaan dokumen perusahaan oleh Tim Penyelenggara BPTJ sebagai proses administrasi peserta.
 - 2) Penilaian Tinjauan Lapangan
Peninjauan Lapangan dilaksanakan kepada peserta yang telah melengkapi dokumen persyaratan yang diminta dan dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan mengunjungi kantor dan pool dari setiap perusahaan operator bersama Tim Penilai didampingi Tim Penyelenggara BPTJ.
- b. Finalisasi Penilaian Operator Angkutan Umum Terbaik di Wilayah Jabodetabek
 - 1) Paparan oleh Masing-masing Perusahaan Operator dan sesi tanya jawab dengan Tim Penilai.
 - 2) Rapat Penetapan Pemenang terhadap peserta Perusahaan Operator berdasarkan Kategori Pemilihan sebagai berikut:
 - a) Kategori Pelayanan Prima Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek;
 - b) Kategori Pelayanan Prima Angkutan Umum Dalam Trayek.



Gambar 100. Pemberian Penghargaan Kepada Operator Angkutan Terbaik di Hotel Redtop Jakarta pada Tanggal 29 Oktober 2019 dan Tinjauan Lapangan ke Perusahaan Angkutan pada Tanggal 27 Agustus 2019

Penetapan Pemenang Penghargaan Operator Angkutan Umum Terbaik di Wilayah Jabodetabek berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Nomor SK. 350 BPTJ Tahun 2019, sebagai berikut:

1) Kategori Pelayanan Prima Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek

No.	Predikat	Nama Perusahaan	Nilai
1.	Prima Utama	Blue Bird Grup	89,18
2.	Prima Madya	PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia	76,24
3.	Prima Pratama	PT. Ekspres Transindo	69,91
4.	Prima Pratama	Inkoppel	69,14
5.	Prima Pratama	PT. Transportasi Cendikia Bersama	67,40

2) Kategori Pelayanan Prima Angkutan Umum Dalam Trayek

No.	Predikat	Nama Perusahaan	Nilai
1.	Prima Utama	PT. Hiba Utama	86,12
2.	Prima Utama	PT. Sinar Jaya Megah Langgeng	85,05
3.	Prima Madya	PT. Transportasi Jakarta	81,93
4.	Prima Madya	Perum Damri	81,48
5.	Prima Madya	Perum PPD	80,98

4. Evaluasi Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan di Wilayah Jabodetabek

Fungsi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dalam pengawasan penyelenggaraan transportasi sangatlah diperlukan terutama dalam hal pengawasan keselamatan lalu lintas angkutan jalan bekerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang berlaku.

Evaluasi kinerja lalu lintas dan pelayanan angkutan dilaksanakan dengan maksud untuk mengevaluasi kinerja pelayanan angkutan umum di Jabodetabek yang tercakup dalam Indeks Kinerja Utama BPTJ dan sebagai bahan masukan dalam kebijakan terutama terkait Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.

Evaluasi Kinerja Lalu Lintas dan Pelayanan Angkutan dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat, Bekasi. Kegiatan survei primer dilakukan dengan jumlah responden sebanyak 52.745 orang dari 33 juta populasi penduduk Jabodetabek. Pemilihan sampel responden dengan metode random (lokasi berdasarkan jumlah penduduk kecamatan pada 13 kota/kabupaten di Wilayah Jabodetabek). Hasil survei sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pemilihan moda Jabodetabek sebanyak 66% menggunakan kendaraan pribadi, 21% angkutan umum dan 13% para transit.

- b. Kecepatan Rata-rata angkutan umum hasil survei sebesar 22,86 km/jam dari jumlah responden sebanyak 216 kendaraan pada 70 trayek lintas provinsi.
- c. Coverage layanan angkutan umum di Wilayah Jabodetabek mencapai 67% dari total Panjang jalan di Wilayah Jabodetabek/.Trayek angkutan umum yang dipertimbangkan adalah: Angkutan Permukiman, Angkutan Bandara, Trans Jabodetabek, Trayek AU Kota Bogor, Trayek AU Kota Bekasi, Trayek AU Kab. Tangerang, Trayek AU Kota Tangerang, Trayek AU Kota Depok, Trayek antar Terminal hasil survei.



Gambar 101. FGD Evaluasi Kinerja Lalu Lintas dan Pelayanan Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek pada Tanggal 27 Agustus 2019

5. Rencana Induk Terminal Barang Jabodetabek

Kegiatan Rencana Induk Terminal Barang Jabodetabek untuk mengidentifikasi kebutuhan terminal angkutan barang untuk mendukung pelayanan transportasi angkutan barang di Jabodetabek. Hal tersebut meliputi pula koordinasi teknis terhadap kendala dan permasalahan untuk penyelarasan program pendukung oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota. Kegiatan tersebut bertujuan agar tersusunnya SOP tata cara dan penetapan simpul dan lokasi terminal barang serta konsep peraturan Menteri Perhubungan tentang tata cara dan kriteria penetapan Simpul dan lokasi Terminal barang.

Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, terdapat delapan lokasi yang direncanakan menjadi terminal barang. Penanggungjawab dari perencanaan dan pembangunan terminal nantinya terminal barang tersebut adalah Kementerian Perhubungan atau Pemerintah Daerah.

Tabel 12. Pembangunan dan Pengembangan Terminal Barang di Jabodetabek

Pembangunan & Pengembangan Terminal Barang	Kab/ Kota	Waktu Pelaksanaan (Tahun)							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TB di Kawasan Marunda	Jakarta Utara								
TB di Kawasan Industri Pulo Gebang	Jakarta Timur								
TB (Kering) di Tanah Baru	Kota Depok								
TB (Basah) di Rancamaya	Kota Bogor								
TB di Kabupaten Tangerang	Tangerang								
TB di Kawasan Setu (Bekasi)	Kabupaten Bekasi								
TB di Rawa Pasung (Bekasi)	Kota Bekasi								
TB di Bantar Gebang	Kota Bekasi								



Gambar 102. Peta Sebaran Terminal Barang Eksisting dan Rencana di Jabodetabek



Gambar 103. Peta Potensi Lokasi Terminal Barang di Jabodetabek

Tabel 13. Indikasi Potensi Lokasi Terminal Barang di Jabodetabek

No.	Lokasi	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Provinsi
1	Lokasi 1	Koja	Koja	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta
2	Lokasi 2	Duri Kosambi	Cengkareng	Kota Jakarta Barat	DKI Jakarta
3	Lokasi3	Margahayu	Bekasi Timur	Kota Bekasi	Jawa Barat
4	Lokasi 4	Gandasari	Cikarang Barat	Kabupaten Bekasi	Jawa Barat
5	Lokasi 5	Jombang	Ciputat	Kota Tangerang Selatan	Banten
6	Lokasi 6	Kebagusan	Pasar Minggu	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta
7	Lokasi 7	Pondok Cina	Beji	Kota Depok	Jawa Barat
8	Lokasi 8	Cimande Hilir	Caringin	Kabupaten Bogor	Jawa Barat

Tabel 14. Kedekatan lokasi Potensi Lokasi Terminal Barang di Jabodetabek dengan Rencana

No.	Lokasi	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Rencana Terminal Barang Sesuai Perpres
1	Lokasi 1	Koja	Koja	Terminal Mobil dan Barang di Tanah Merdeka
2	Lokasi 2	Duri Kosambi	Cengkareng	
3	Lokasi3	Margahayu	Bekasi Timur	Rencana Terminal Barang Rawa Pasung, Kota Bekasi
4	Lokasi 4	Gandasari	Cikarang Barat	
5	Lokasi 5	Jombang	Ciputat	
6	Lokasi 6	Kebagusan	Pasar Minggu	
7	Lokasi 7	Pondok Cina	Beji	
8	Lokasi 8	Cimande Hilir	Caringin	Rencana Terminal Agribisnis di Kelurahan Rancamaya, Kota Bogor



Gambar 104. Kawasan Rencana Lokasi Terminal Barang Setu



Gambar 105. Kawasan Rencana Lokasi Terminal Barang Rawa Pasung



Gambar 106. Kawasan Rencana Lokasi Terminal Barang Kawasan Industri Delta Mas

6. Pendataan, Penataan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan

Kegiatan Pendataan, Penataan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan Jabodetabek diselenggarakan dengan maksud agar dapat terealisasinya suatu sistem Pendataan, Penataan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan yang terinventarisir, terstruktur dan terevaluasi dengan baik.

Tujuan kegiatan Pendataan, Penataan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan di Jabodetabek, sebagai berikut:

- a. mengevaluasi kinerja pelayanan angkutan umum di wilayah Jabodetabek; dan
- b. menjadi bahan masukan terkait kinerja pelayanan angkutan umum di wilayah Jabodetabek.

Kegiatan ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pendataan, penataan dan evaluasi kinerja pelayanan angkutan transportasi perkeretaapian, dan pendataan, penataan dan evaluasi kinerja pelayanan angkutan transportasi jalan.





Gambar 107. Kegiatan Pendataan, Penataan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan Barang di JICT (15-16 Agustus 2019) dan Jakarta Gudang (5-6 September 2019)



Gambar 108. Kegiatan Ujicoba Konsep Sinkronisasi Pengaturan Operasional Angkutan Barang Tambang Pada Tanggal 4 Februari 2019 di Jalan Tambang Wilayah Bogor – Tangerang

7. Pengawasan Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan di Wilayah Jabodetabek

Fungsi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dalam pengawasan penyelenggaraan transportasi sangatlah diperlukan terutama dalam hal pengawasan keselamatan lalu lintas angkutan jalan bekerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang berlaku.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menjaga kualitas dari SPM yang berorientasi pada aspek, seperti keselamatan, keamanan, kehandalan, kenyamanan, kemudahan, dan kesetaraan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019, sebagai berikut:

a. **Penegakan hukum angkutan umum Bandara Soekarno-Hatta.**

Pelaksanaan Penegakan Hukum Angkutan Umum di kawasan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta menemukan beberapa pelanggaran sebagaimana laporan dari data rekapitulasi operasi penegakan hukum di

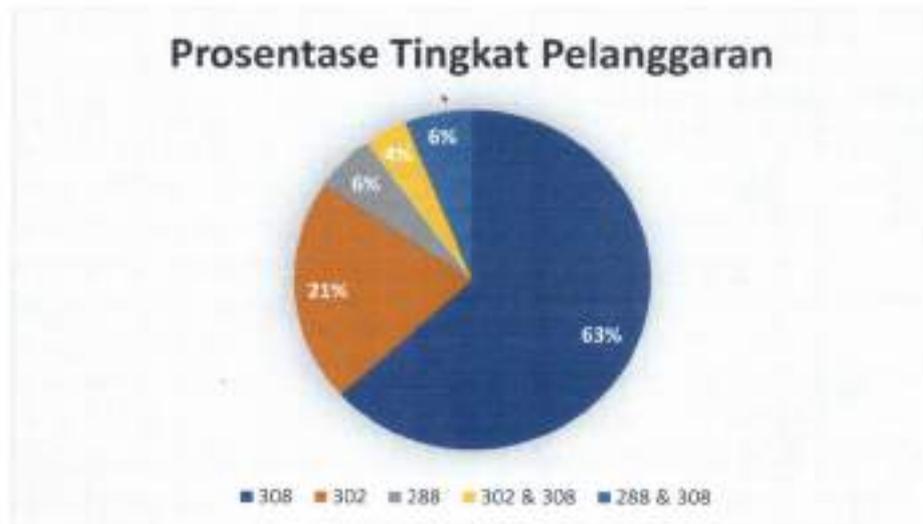
Terminal 1 dan 2 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yaitu bisa dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 109. Rekap Jumlah Kendaraan yang Melanggar

Sesuai dengan gambar di atas, dari dua lokasi pelaksanaan didapatkan dari hasil operasi angkutan umum sebanyak 95 kendaraan yang masih melanggar di Terminal 1 dan Terminal 2 sebanyak 84 kendaraan.

Berdasarkan data jenis pelanggaran teridentifikasi beberapa pelanggaran, seperti tidak ada Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) dan Kartu pengawasan (KP), habisnya masa berlaku STUK dan KP, Penyimpangan izin operasional dan Penyimpangan Trayek.



Gambar 110. Diagram Prosentase Pelanggaran

Pelanggaran terbanyak yang terjadi pada pasal 308 atau kendaraan tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan dan membawa izin kendaraan foto copy sebesar 63%.



Gambar 111. Penegakan Hukum Angkutan Umum Bandara Soekarno-Hatta pada Tanggal 19 Agustus 2019

- b. Pelaksanaan kegiatan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (*ramp check*) dalam mendukung pelaksanaan angkutan lebaran tahun 2019 (1440 H).

Guna meningkatkan pelayanan penumpang khususnya di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) perlu dilakukan kegiatan pemeriksaan kendaraan atau *ramp check*. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kelaikan kendaraan angkutan umum untuk menjamin keselamatan penumpang, terutama pada saat kesiapan dalam mendukung pelaksanaan angkutan lebaran.

Monitoring dan pelaksanaan pemeriksaan kelaikan sarana transportasi bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pengoperasian sarana transportasi dengan melakukan langkah-langkah, sebagai berikut:

- 1) Sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap sarana transportasi sebelum keberangkatan dan setelah tiba sesuai dengan ketentuan standar keselamatan.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap perawatan sarana transportasi agar selalu dilaksanakan sesuai dengan tata cara perawatan yang telah ditetapkan.
- 3) Mengambil tindakan secara dini, berkoordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait, apabila menemukan kondisi yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan dalam pengoperasian sarana transportasi.
- 4) Memberikan pembinaan kepada aparat pemerintah atau operator sarana transportasi untuk selalu memahami tugas dan tanggungjawabnya, serta memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kelayakan serta tata cara pengoperasian sarana dengan selamat dan aman.
- 5) Meningkatkan pengawasan terhadap seluruh aparat pada unit-unit pelaksana teknis dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pengoperasian, agar sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan.

Kegiatan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan bidang angkutan umum (*ramp check*) dalam mendukung pelaksanaan angkutan lebaran

tahun 2019 (1440 H) dilaksanakan oleh Tim Inspeksi dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dan Tim Pemeriksa dari Dinas Perhubungan terkait. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan sarana dititikberatkan pada armada bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dan Bus Pariwisata yang akan dipergunakan sebagai armada angkutan lebaran dengan mekanisme, sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan sarana angkutan dilakukan di Pool Bus dan Terminal Utama Jabodetabek.
- 2) Waktu pelaksanaan kegiatan pada tanggal 29 Mei s.d 13 Juni 2019.
- 3) Kegiatan dilaksanakan dengan pemeriksaan unsur administrasi, unsur teknis utama serta unsur penunjang sesuai dengan ketentuan yang diatur Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun pelaksanaan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan bidang angkutan umum (*ramp check*) dilakukan dengan perlengkapan, sebagai berikut:

- 1) formulir inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 2) stiker inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 3) alat tulis;
- 4) alat dokumentasi; dan
- 5) media pelaporan (WA *group*, alat komunikasi, dsb) serta *input* data hasil pemeriksaan inspeksi keselamatan melalui <http://pengawasan-bptj.com>.



Gambar 112. Rekapitulasi Kegiatan *Ramp Check* Angkutan Lebaran Tahun 2019 (1440 H) Periode 29 Mei s.d 13 Juni 2019

Total kendaraan yang dilakukan pemeriksaan inspeksi keselamatan pada masa penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2019 (1440H) tanggal 29

Mei s.d 13 Juni 2019 di seluruh lokasi sebanyak 2.385 unit bus, dengan rincian sebanyak 825 unit bus (35%) memenuhi persyaratan inspeksi keselamatan dan sebanyak 1.560 unit bus (65%) tidak memenuhi persyaratan inspeksi keselamatan.

Kesimpulan hasil rekapitulasi *ramp check* periode 29 Mei s.d 13 Juni 2019 wilayah Jabodetabek, sebagai berikut:

- 1) Kecenderungan yang terjadi adalah perusahaan AKAP kurang responsif, lalai melakukan perawatan serta tidak peduli dalam mempersiapkan armada untuk Angkutan Lebaran.
- 2) Perlu dilakukan pembinaan terhadap operator angkutan umum agar lebih peduli terhadap keselamatan penumpang maupun awak angkutan umumnya.
- 3) Memberikan bantuan subsidi angkutan berupa bantuan perbaikan/penggantian *spare part* kendaraan kepada perusahaan AKAP.



Gambar 113. Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan LLAJ oleh Personil PKB Tangerang Selatan di Terminal Pondok Cabe pada Tanggal 13 Juni 2019

- c. Inspeksi Keselamatan Kendaraan Guna Menunjang Pelaksanaan Angkutan Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019

Kegiatan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Bidang Angkutan Umum (*Ramp Check*) Dalam Mendukung Pelaksanaan Angkutan Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019 dilaksanakan oleh Tim Inspeksi dari pegawai Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dan Tim Pemeriksa dari Dinas Perhubungan terkait.

Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan sarana dititikberatkan pada angkutan dalam trayek seperti armada bus AKAP yang merupakan angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek. Selain itu, pemeriksaan sarana juga dilakukan pada angkutan tidak dalam trayek seperti bus pariwisata yang merupakan angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam trayek.

Adapun pelaksanaan pemeriksaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Bidang Angkutan Umum (*Ramp Check*) sama dengan pelaksanaan Pelaksanaan Angkutan Lebaran Tahun 2019. Berdasarkan hasil evaluasi pemeriksaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Bidang Angkutan Umum (*Ramp Check*) Tanggal 12 November s.d 17 Desember 2018 dapat dilaporkan, sebagai berikut:

- 1) Dari hasil penginputan data inspeksi keselamatan jalan, didapatkan banyaknya jumlah armada atau bus yang telah diperiksa pada semua lokasi baik yang di terminal maupun di pool sebanyak 1.863 unit bus.
- 2) Kegiatan inspeksi keselamatan jalan ini dilakukan langsung di lapangan, baik di terminal maupun di *pool* bus dengan rincian jumlah bus yang diperiksa berdasarkan lokai pemeriksaan yaitu seperti tabel di bawah.
- 3) Total kendaraan yang dilakukan pemeriksaan inspeksi keselamatan pada Masa Kesiapan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 tanggal 12 November s.d 17 Desember 2018 di seluruh lokasi sebanyak 1863 unit bus, dengan rincian sebanyak 597 unit bus (32%) memenuhi persyaratan inspeksi keselamatan dan sebanyak 1.263 unit bus (68%) tidak memenuhi persyaratan inspeksi keselamatan. Berikut adalah tabel detail dari hasil pemeriksaan secara keseluruhan baik yang diijinkan operasional, peringatan/perbaiki, dilarang operasional, tilang dan dilarang operasional.



Gambar 114. Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019



Gambar 115. Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019 di Terminal Pulo Gebang pada Tanggal 21 Desember 2019

8. Koordinasi Teknis Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Se-Jabodetabek

Koordinasi teknis pengawasan lalu lintas dan angkutan se-Jabodetabek dimaksudkan untuk mencapai sinergitas kegiatan operasional transportasi Jabodetabek yang menjadi wilayah tugas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dengan Kementerian/Lembaga serta dukungan penuh dari pemerintah daerah, karena pemerintah daerah merupakan motor penggerak utama dalam era otonomi daerah dalam upaya percepatan sasaran program penataan sektor transportasi se-Jabodetabek.

Dengan koordinasi teknis pengawasan lalu lintas dan angkutan se-Jabodetabek ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi agar operasional transportasi di Jabodetabek dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan ekonomis.



Gambar 116. Koordinasi Teknis Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Se-Jabodetabek Tahun 2019 di Arch Hotel pada Tanggal 14 November 2019

9. Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

Kegiatan ini meliputi Melakukan pemantauan penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2019, natal dan tahun baru 2020, dan antisipasi libur panjang serta berkoordinasi dengan instansi terkait, khususnya dengan Pemerintah Daerah

terutama pada wilayah Jabodetabek, Melakukan koordinasi dalam upaya pemeriksaan kelaikan sarana transportasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan umum.



Gambar 117. Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal 2019 dan Tahun Baru 2020

10. **Pengawasan dan *Monitoring* Pelaksanaan Perizinan Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek**

Pengawasan lalu lintas dan angkutan Jabodetabek dimaksudkan untuk mengawasi kegiatan operasional transportasi Jabodetabek yang menjadi wilayah tugas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Prinsip yang digunakan dalam melakukan pengawasan lalu lintas dan angkutan Jabodetabek adalah mengambil langkah untuk secara terus menerus mengendalikan lalu lintas dan angkutan serta upaya yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang timbul serta memprediksi sebelum permasalahan tersebut terjadi, untuk kemudian dipersiapkan solusi, jangan sampai permasalahan membesar dan tidak terkendali.

Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan RITJ Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah DKI Jakarta diselenggarakan dengan maksud terselenggaranya pengawasan RITJ bidang lalu lintas dan angkutan secara terus menerus serta upaya yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang timbul serta memprediksi sebelum permasalahan tersebut terjadi.



Gambar 118. Pengawasan dan *Monitoring* Pelaksanaan Perizinan Angkutan Umum di 9 (Sembilan) Wilayah Jabodetabek di Kabupaten Bogor pada Tanggal 26 Agustus 2019

11. Pengawasan dan *Monitoring* Kinerja Operasional Terminal Tipe A Jabodetabek

Salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan pada terminal adalah dengan melakukan pengawasan terhadap operasional pelayanan di terminal yang dilakukan oleh aparaturnegara yang dalam posisi saat ini Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek bertanggung jawab dalam pelayanan terminal di Jabodetabek. Menindaklanjuti hal tersebut, perlu dilakukan suatu pengawasan berkelanjutan pada minimal dua bulan sekali untuk mempertahankan pelayanan di terminal. Adapun dalam pelaksanaan kegiatan ini tersusun dalam tahapan kegiatan yang sinergi dan berkelanjutan, dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu Aspek Standar Pelayanan Minimal Terminal dan Aspek Keamanan dan Keselamatan.



Gambar 119. Pengawasan dan *Monitoring* Kinerja Operasional Terminal Tipe A Jabodetabek di Terminal Baranangsiang dan Terminal Pulo Gebang pada Tanggal 11 Februari 2019

12. Rencana Teknis Pengembangan Dana *Electronic Road Pricing* (ERP)

Kegiatan Rencana Teknis Pengembangan Dana ERP ini berguna untuk meningkatkan keselamatan pada ruas jalan yang dibangun di wilayah Jabodetabek.



Gambar 120. Rapat Rencana Teknis Pengembangan Dana ERP di Hotel Akmani pada tanggal 22 November 2019

13. Kajian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Angkutan Umum dan Peningkatan Keselamatan Jabodetabek

Kegiatan Kajian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Angkutan Umum dan Peningkatan Keselamatan Jabodetabek dilaksanakan agar dana prioritas yang dibutuhkan pemerintah Daerah terealisasi secara tepat dan benar.



Gambar 121. Dokumen Kajian DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk Angkutan Umum dan Peningkatan Keselamatan Jabodetabek

14. Pengadaan Peralatan Penunjang Pengawasan Angkutan

Peralatan pengawasan jalan/lalu lintas dapat digunakan dalam beberapa kegiatan, misalnya: monitoring kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan rutin, inspeksi prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 206 ayat (7) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengandung maksud bahwa hasil pengawasan terhadap pelaksanaan program keamanan dan keselamatan LLAJ yang terdiri dari audit, inspeksi dan pengamatan serta pemantauan ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum. Khusus untuk kegiatan pengamatan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran bidang LLAJ tersebut dilaksanakan dengan dukungan dari peralatan pengawasan pelanggaran bidang LLAJ.



Gambar 122. Pengadaan Peralatan Penunjang Pengawasan Angkutan

15. Pemeliharaan Aplikasi Pengawasan Angkutan Jalan di Terminal Tipe A Jabodetabek

Pemeliharaan Aplikasi Pengawasan Angkutan Jalan di Terminal Tipe A Jabodetabek dimaksudkan guna memaksimalkan penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media elektronik mengenai data pelaporan jumlah penumpang dan bus per harinya dari dan mempermudah tiap terminal tipe A untuk menyampaikan laporan terbarunya.



Gambar 123. Pemeliharaan Aplikasi Pengawasan Angkutan Jalan di Terminal Tipe A Jabodetabek

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) secara umum telah sesuai dengan rencana. Namun demikian, dalam pelaksanaan masih dijumpai permasalahan-permasalahan terutama jumlah SDM (PNS) yang ada masih sangat terbatas dan fasilitas penunjang pekerjaan seperti komputer yang masih kurang memadai. Untuk mengatasi permasalahan ini maka pada tahun anggaran 2019 telah ditambahkan tenaga kerja honorer (PPNPN) agar dapat membantu penyelesaian pekerjaan di BPTJ.

Pada tahun anggaran 2019, terdapat 2 (dua) kegiatan strategis yang telah dikerjakan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), yaitu Pembangunan *Area Traffic Control System* (ATCS) Koridor DKI Jakarta - Tangerang dan Lanjutan Pembangunan Terminal Tipe A Jatijajar. Namun, selain kedua kegiatan strategis tersebut, BPTJ telah melaksanakan sejumlah program/kegiatan dalam rangka mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jabodetabek. Hal ini dilaksanakan demi meningkatkan pelayanan transportasi untuk masyarakat yang sesuai dengan prinsip dasar SPM, yaitu selamat, aman, handal, nyaman, mudah, dan setara. Selain itu, BPTJ juga berupaya untuk meningkatkan integrasi pelayanan angkutan umum di wilayah Jabodetabek untuk meningkatkan *share* angkutan umum.

Pencapaian BPTJ selama tahun 2019 tidak terlepas dari peran aktif seluruh jajaran Pejabat Struktural, Fungsional, dan Staf di BPTJ yang telah bekerja sama dan melakukan koordinasi dengan baik dengan semua pihak terkait. Selain itu, dukungan sumber daya yang memadai sangat diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tercapainya kegiatan yang telah diprogramkan pada tahun anggaran 2019.